

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

AGRESI MILITER BELANDA I

21 JULI 1947

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Purniyawati

NIM: 021314061

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2006

SKRIPSI
AGRESI MILITER BELANDA I
21 JULI 1947

Oleh
Purniyawati
NIM: 021314061

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal... 21 Okt. 2006

Pembimbing II



Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.

Tanggal... 21 Okt. 2006

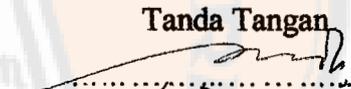
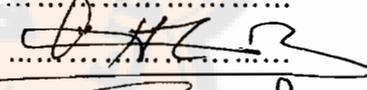
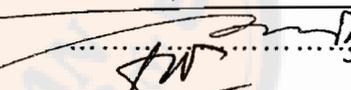
SKRIPSI
AGRESI MILITER BELANDA I 21 JULI 1947

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Purniyawati
NIM: 021314061

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 28 Oktober 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R, S.Th.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.	
Anggota	: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R, S.Th.	
Anggota	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	

Yogyakarta, 28 Oktober 2006

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma




Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed, Ph.D.

ABSTRAK

AGRESI MILITER BELANDA I 21 JULI 1947

Oleh : Purniyawati
NIM: 021314061

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947. Dalam skripsi ini ada tiga permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 1) Faktor-faktor pendorong Belanda mengambil tindakan militer yang pertama terhadap Republik Indonesia; 2) Reaksi yang muncul baik dari dalam negeri maupun luar RI terhadap Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947; 3) Pengaruh Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 terhadap kedudukan RI.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multidimensional yang meliputi: pendekatan historis, pendekatan politik, dan pendekatan sosial. Penelitian ini dikaji secara deskriptif analitis.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor pendorong Belanda melancarkan serangan militer yang pertama terhadap RI adalah berkuasanya Kabinet Scermerhorn-Drees, keadaan Indonesia pasca kemerdekaan, dan gagalnya pelaksanaan Perjanjian Linggajati; 2) Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 mendapat reaksi dari dalam RI dalam bidang militer dan politik, dan reaksi dari luar RI dalam bidang politik berupa: resolusi Dewan keamanan PBB tentang Gencatan Senjata, Komisi Tiga Negara, dan Perjanjian Renville; 3) Gagalnya Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 berpengaruh terhadap kedudukan RI baik dalam negeri maupun luar negeri yaitu kedudukan RI semakin kuat dan mendapat simpati dari dunia internasional berupa pengakuan kemerdekaan RI secara *de facto*.

ABSTRACT

THE FIRST DUTCH MILITARY AGGRESSION OF 21 JULY 1947

This thesis writing aims to describe and analyze the first Dutch military aggression in 21 July 1947. There are three problems to be discussed in this thesis, they are: (1) The motivating factors that encourage Dutch in taking the first military action on the Republic of Indonesia; (2) The emerging reactions from inside as well as outside of Republic of Indonesia; (3) The impact of Dutch Military Action I of 21 July 1947 on RI position.

The method applied for this study is historical method that includes: heuristic, resource critic, interpretation, and historiography. The approach used in the study is multidimensional approach comprising historical approach, political approach, and social approach. The writing of the thesis is analyzed in the manner of analytical descriptive.

The result derived from the study are: (1) The motivating factors encouraging Dutch in taking the first military attack on RI are the Scermerhorn-Dress Cabinet that come into rule, Indonesian's conditions following the independence proclamation, and the failure of Linggarjati Agreement; (2) The first Dutch military aggression of 21 July 1947 has drawn internal reaction concerning military and political issues, and also external reaction politically in the form of DK resolution on truce matter, three country commission, and Renville Agreement; (3) The failure of the first Dutch military aggression of 21 July 1947 had the impact on RI position both in national scope and international scope in which it grew stronger and gained sympathies from international world that ended with RI's independence international acknowledgement and *de facto* admission of the Republic of Indonesia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 28 Oktober 2006

Penulis



Purniyawati

PERSEMBAHAN



Dengan segala cinta dan syukur kepada Allah SWT kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

- ◆ *Ayah dan Ibundaku (Alm)*
- ◆ *Adik-adikku*
- ◆ *Kekasihku*
- ◆ *Saudara dan sahabatku*
- ◆ *Guru dan almamaterku*

MOTTO

- ◆ **Bukanlah suatu karya jika tanpa pengorbanan, dan bukanlah suatu keberhasilan jika tanpa perjuangan**
- ◆ **Kesabaran tidak ditentukan dari seberapa lama kita dapat menahan tekanan dari luar, tetapi seberapa lama kita dapat menahan tekanan dari diri sendiri**
- ◆ **Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka harus merubah keadaan yang ada dalam diri mereka sendiri (QS. 13: 11)**
- ◆ **Guru yang bijaksana apabila dia tidak menawari kalian untuk memasuki rumah kebijaksanaannya, tetapi membimbing kalian ke ambang pintu pikiran kalian sendiri**

◆ ***Jaya Dvipantara***

◆ ***Jaya Nusantara***

◆ ***Jaya Indonesia***

"Sesuatu akan indah pada saatnya"

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi berjudul “Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947” ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
3. Bapak Prof. Dr. P.J. Suwamo, S.H., selaku pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis, serta memberi banyak saran, masukan, pikiran, dan referensi yang mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th., selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis, serta memberi banyak saran, masukan, pikiran, dan referensi yang mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Bapak Drs. A.K Wiharyanto, M.M., selaku dosen pembimbing akademik, semua dosen Prodi Sejarah dan Prodi Ilmu Sejarah, dan pihak sekretariat Pendidikan Sejarah yang telah memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini khususnya dan dukungan serta bimbingan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
6. Staf Perpustakaan Sanata Dharma, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan referensi berupa buku, kamus, majalah, koran, dan pelayanan *workstation*.
7. Ayah dan Ibundaku (alm), adik-adikku, dan seluruh keluargaku atas perhatian dan pengertiannya.
8. “Sinang B” atas cinta, perhatian, semangat, dorongan, dan semuanya.
9. Teman-teman Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2002 khususnya dan semua kakak tingkat maupun adik tingkat atas dukungan, persahabatan, kerjasama, dan kebersamaannya selama penulis menyelesaikan studi di Sanata Dharma.
10. Semua sahabat dan teman-temanku (Nining Ur, Dhiyah, Valent, Lia & semua anak Brojodento 2) atas bantuan kebersamaan dan persahabatannya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian pada umumnya dan bagi Universitas Sanata Dharma pada khususnya.

Yogyakarta,

2006

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Landasan Teori.....	15
G. Hipotesis.....	24
H. Metode Penelitian dan Pendekatan.....	27

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II FAKTOR-FAKTOR PENDORONG BELANDA MENGAMBIL

TINDAKAN MILITER YANG PERTAMA TERHADAP RI

DAN MELETUSNYA AGRESI MILITER BELANDA I 21

JULI..... 41

A. Faktor Pendorong Belanda Mengambil Tindakan Militer Pertama

Terhadap RI..... 41

1. Berkuasanya Kabinet Scermerhorn-Dress..... 41

2. Keadaan Indonesia Pasca Kemerdekaan..... 51

3. Gagalnya Pelaksanaan Perjanjian Linggajati..... 63

B. Meletusnya Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947..... 70

BAB III REAKSI DARI DALAM DAN DARI LUAR RI TERHADAP

AGRESI MILITER BELANDA I..... 80

A. Reaksi Dalam RI..... 80

1. Bidang Militer..... 80

2. Bidang Politik..... 90

B. Reaksi Dari Luar RI..... 93

1. Resolusi DK PBB tentang Gencatan Senjata..... 93

2. Komisi Tiga Negara..... 96

3. Perjanjian Renville..... 102

BAB IV PENGARUH AGRESI MILITER BELANDA I 21 JULI 1947

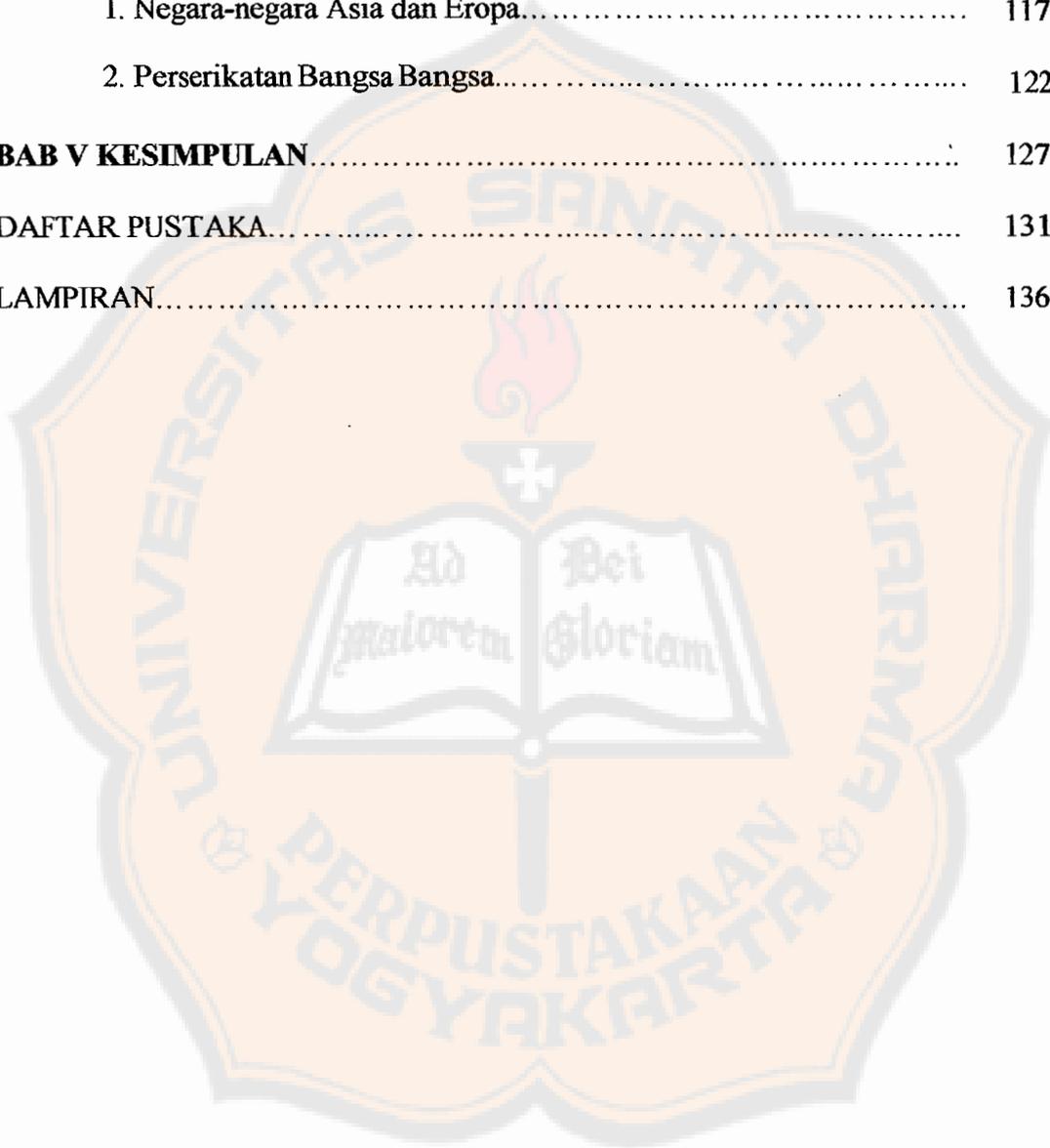
TERHADAP KEDUDUKAN RI DIDALAM NEGERI DAN

LUAR NEGERI RI..... 107

A. Dalam RI..... 107

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Kedudukan RI di Wilayah yang Diakui Secara <i>De Facto</i>	107
2. Kedudukan RI di Luar Kekuasaan <i>De Facto</i>	114
B. Luar Negeri RI.....	117
1. Negara-negara Asia dan Eropa.....	117
2. Perserikatan Bangsa Bangsa.....	122
BAB V KESIMPULAN	127
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN.....	136



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peta Daerah yang diduduki Belanda Bulan Mei 1947	136
Lampiran 2 : Peta Agresi Militer Belanda 21 Juli 1947 di Pulau Jawa	137
Lampiran 3 : Peta Agresi Militer Belanda 21 Juli 1947 di Jawa Tengah.....	138
Lampiran 4 : Peta Agresi Militer Belanda 21 Juli 1947 di Jawa Timur	139
Lampiran 5 : Peta Kedudukan Brigade Belanda di Sumatera.....	140
Lampiran 6 : Peta Agresi Militer Belanda 21 Juli 1947 di Sumatera.....	141
Lampiran 7 : Peta Kedudukan Tentara Belanda di Sumatera Selatan.....	142
Lampiran 8 : Peta Kedudukan Tentara Belanda di Sumatera Tengah.....	143
Lampiran 9 : Kedudukan Tentara Belanda di Sumatera Utara.....	144
Lampiran 10 : Peta Daerah yang diduduki Belanda Setelah Agresi Militer Belanda I.....	145
Lampiran 11 : Peta Garis Demarkasi van Mook.....	146
Lampiran 12 : Isi Perjanjian Renville.....	147
Lampiran 13 : Silabus.....	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir ketika Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg Stachouwer dan di bawah Panglima tentaranya Jenderal Ten Porten menyerah di Lapangan Terbang Kalijati di hadapan penguasa militer Jepang Jenderal Hitoshi Imamura dan stafnya pada tanggal 9 Maret 1942.¹ Dengan demikian Hindia Belanda jatuh di bawah penguasaan Jepang yang tidak bertahan lama, akhir penguasaan Jepang di Indonesia ditandai peristiwa pada tanggal 15 Agustus 1945 pada saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. Sekutu membentuk SEAC (*South East Asia Command*) yang dipimpin oleh Admiral Lord Mountbatten untuk menerima penyerahan Jepang dan menjalankan misi Sekutu di Indonesia.²

Penyerahan Jepang tanpa syarat kepada tentara Sekutu merupakan kabar gembira bagi Belanda karena lepasnya kekuasaan Belanda di Indonesia tidak berarti bahwa Belanda tidak berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Dalam rangka merealisasikan cita-citanya tersebut Pemerintah Belanda membentuk *Nedherlandsch Indies Civil Administrations* (NICA) di Australia semasa Perang Dunia II dengan maksud untuk sewaktu-waktu menerima kembali

¹ Muhammad Ridhwan Indra dan Sophian Marthabaya, 1987, *Peristiwa-peristiwa di Sekitar Proklamasi 17-8-1945*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

² Basuki Suwarno, 1999, *Hubungan Indonesia – Belanda Periode 1945-1950*, PT. Setio Acness, Jakarta, hlm. 16.

pemerintahan di Indonesia, setelah pendudukan tentara Sekutu selesai.³ Belanda yang ingin segera dapat mengambil alih Hindia-Belanda bergegas mengirimkan kesatuan kecil tentara Belanda dan NICA yang resminya diperbantukan pada SEAC (*South East Asia Command*) tetapi ternyata pasukan Belanda hanya menginginkan kehendaknya sendiri untuk menguasai kembali Indonesia.⁴ Di Indonesia bagian timur dan Kalimantan merupakan tanggung jawab Australia di bawah Panglima pasukan Australia yaitu Panglima Blamey yang bekerjasama dengan NICA sehingga NICA dapat melakukan tugasnya sebagai pamong-praja di wilayah Indonesia bagian timur dan Kalimantan.

Belanda berharap besar untuk bisa mengembalikan kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina dari London pada tanggal 7 Desember 1942 yang mana Pemerintah Belanda sudah merasa cukup mempunyai satu landasan untuk mengadakan perubahan-perubahan politik di Indonesia karena menurut Belanda setelah pasukan Sekutu ditarik mundur Belanda berhak menerima kembali penyerahan Hindia Belanda kepada Pemerintah Belanda.⁵

Sebelum rencana Belanda tersebut terlaksana, bangsa Indonesia telah lebih dahulu berhasil mendirikan sebuah negara merdeka dan berdaulat, ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan yang diproklamlirkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00

³ Seskoad, 1990, *Serangan Umum 1 Maret 1949*, PT. Citra Lantoro-Gung Persada, Jakarta, hlm. 56.

⁴ Basuki Suwarno, *op.cit.*, hlm 16.

⁵ Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, *Dari Negara Indonesia Timur ke RI Serikat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 2-3.

pagi WIB bertempat di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.⁶ Walaupun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Pemerintah Belanda di Den Haag maupun Pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal van Mook yang berkedudukan di Brisbane (Australia) masih memimpikan bahwa Pemerintah Hindia Belanda akan dapat mengembalikan pemerintahan kolonial di Indonesia seperti sebelum tahun 1942.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata meningkatkan semangat nasionalisme rakyat yang semakin menggelora. Kemerdekaan yang dicapai dengan perjuangan berdarah dan korban yang tidak terhitung sudah selayaknya untuk dipertahankan dengan sekuat tenaga dilandasi dengan nilai-nilai dan semangat perjuangan yang tinggi, kesetiaan terhadap negara, dan sikap pantang menyerah. Situasi tersebut tidak diduga oleh Gubernur Jenderal van Mook yang beranggapan bangsa Indonesia masih seperti yang dulu, yang lemah dan mudah diatur sehingga Belanda tidak perlu menaruh perhatian kepada RI karena RI hanya kreasi dari Jepang dan bukan usaha bangsa Indonesia serta menganggap persoalan di Indonesia adalah mudah.

Ketika Gubernur Jenderal van Mook tiba di Jakarta dari Australia pada tanggal 2 Oktober 1945, ia melihat di jalan-jalan dikuasai oleh para pemuda yang meneriakan "Merdeka tetap Merdeka" dan bangunan-bangunan yang sudah banyak dicoreti dengan tulisan yang menegaskan keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka dan bersedia mempertahankan kemerdekaan itu dengan jiwa dan raga mereka. Kedatangan tentara Belanda mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia sehingga di mana-mana terjadi insiden antara militer Belanda dan

⁶ Muhammad Ridhwan Indra dan Sophian Marthabaya, *op.cit.*, hlm. 1.

tentara RI ketika tentara Belanda mendarat di wilayah Indonesia seperti pertempuran yang terjadi di Surabaya tanggal 10 November 1945.

Kondisi Indonesia yang masih labil membuat Belanda harus mengambil langkah hati-hati guna mencapai keinginannya. Tidak dapat disangkal bahwa tujuan Pemerintah Belanda adalah untuk menguasai kembali Hindia Belanda. Pada saat itu Belanda sedang lemah dalam bidang militer sehingga jika tindakan militer diambil dapat dipastikan Belanda kalah melawan pasukan RI yang bersatu dan siap mengusir penjajah. Sebelum pasukan Sekutu datang, RI sudah berhasil membentuk KNIP dan membentuk kabinet presidensiil di bawah Presiden Soekarno sehingga kedudukan RI semakin kuat dan kemerdekaan RI diakui oleh negara tetangga seperti Mesir, India dan Pakistan di mana negara tersebut kemudian membuka perwakilan konsuler di negara RI. Pengakuan negara tetangga terhadap kemerdekaan RI ini sungguh memperkuat kedudukan RI.

Pasukan Inggris atas nama Sekutu tiba di Indonesia tanggal 29 September 1945 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Crishton yang langsung menyatakan bahwa pasukan Inggris hanya melakukan tugas Sekutu dan tidak bersedia membantu Belanda memulihkan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Gubernur Jenderal van Mook sadar bahwa Inggris tidak bisa diminta bantuannya dan mempertimbangkan kondisi Belanda yang lemah maka ia mengambil kebijakan mendekati Pemerintah RI untuk mengadakan perundingan mengenai masa depan Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Pemerintah Belanda kepadanya. Usaha Gubernur Jenderal van Mook berhasil didukung juga oleh munculnya figur Soetan Sjahrir di pihak Indonesia yang mulai memegang

pimpinan Pemerintah RI dengan menjabat Perdana Menteri RI pada tanggal 14 November 1945. Soetan Sjahrir secara gigih memelopori pemikiran untuk mengadakan perundingan dengan pihak Belanda untuk mencapai penyelesaian masalah tanpa harus terjadi pertempuran mengingat kondisi militer RI yang lemah. Kebijakan Soetan Sjahrir ditentang oleh kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka yang menghendaki agar Belanda dan Sekutu diusir dari wilayah Indonesia sehingga Indonesia mencapai kemerdekaan seratus persen tanpa campur tangan asing seperti Inggris selaku penengah karena Inggris hanya sebagai pengemban misi Sekutu.⁷

Perundingan resmi antara pihak Belanda dan RI dimulai tanggal 13 Maret 1946, Delegasi RI dipimpin oleh Soetan Sjahrir dan Delegasi Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal van Mook dengan penengah Sir Archibald Clark Kerr dari Inggris. Perundingan berjalan alot dan masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya. Soetan Sjahrir terikat dengan program kabinet yang menentukan agar perundingan berdasarkan pengakuan terhadap negara RI seratus persen merdeka dan sederajat dengan Belanda.⁸ Perundingan demi perundingan dilaksanakan tetapi ternyata titik temu belum juga diperoleh sampai pada tanggal 14-24 April 1946 dilaksanakan perundingan di Hoge Veluwe dan mengalami kegagalan. Usaha kedua pihak untuk menyelesaikan masalah secara diplomatis membuahkan hasil ketika kedua pihak melaksanakan perundingan Linggajati yang menghasilkan Perjanjian Linggajati dan resmi ditandatangani

⁷ Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. viii.

⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

tanggal 25 Maret 1947 yang sebelumnya sudah didahului perjanjian Gencatan Senjata tanggal 14 Oktober 1946.⁹

Perundingan yang begitu sulit dirumuskan ternyata tidak sebanding dengan pelaksanaannya, pelaksanaan perjanjian itu berjalan sangat lamban dan sulit. Kedua belah pihak rupanya memasukkan tafsiran mereka masing-masing. Pihak RI merasa bahwa Belanda tidak jujur dalam cara penyelesaian perselisihan, sedangkan pihak Belanda melakukan pelanggaran-pelanggaran dan memutuskan tindakan sepihak.

Perselisihan pendapat sebagai akibat perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Linggajati makin memuncak. Belanda tetap mendasarkan tafsirannya pada pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 bahwa Indonesia akan dijadikan anggota *Commonwealth* dan akan berbentuk federasi, sedangkan hubungan luar negerinya diurus Belanda. Belanda juga menuntut agar segera diadakan *gendarmarie* bersama. RI merasa usul-usul Belanda tersebut sangat memberatkan, terlebih aturan tentang hubungan luar negeri RI yang diwakili Belanda yang berarti menganggap bahwa RI adalah negara bagian Belanda dan tidak sederajat dengan Belanda.

Berawal pada nota tanggal 27 Mei 1947, Belanda semakin keras menekan RI untuk menerima usul Belanda yang merugikan pihak RI. Terdorong oleh kesulitan ekonomi negaranya yang makin memburuk, Belanda berusaha menyelesaikan masalah Indonesia dengan cepat. Akhirnya Belanda memutuskan untuk tidak terikat lagi pada Perjanjian Gencatan Senjata dan Perjanjian Linggajati karena pihak RI tidak mau menerima usul-usul yang diajukan Belanda

⁹ *Ibid.*, hlm. 240.

sehingga Belanda mengambil tindakan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 dengan tujuan menghancurkan RI baik dalam bidang politik, militer, maupun ekonomi.¹⁰

Agresi yang dilancarkan Belanda dimulai pada tanggal 21 Juli 1947 dan resminya berakhir tanggal 4 Agustus 1947. Adapun daerah-daerah yang menjadi sasaran Agresi Militer Belanda I adalah Jawa Barat, Jawa Tengah yaitu Semarang, Jawa Timur dan Sumatera sebelum akhirnya menguasai Yogyakarta sebagai Ibukota RI. Di samping daerah-daerah tersebut, Belanda juga menduduki daerah-daerah perkebunan dan daerah penghasil minyak seperti Deli, Palembang, Sumatera dan sekitarnya. Hal ini dilakukan Belanda untuk memutuskan jalur-jalur strategis yang bersifat ekonomis. Belanda berhasil menduduki pelabuhan-pelabuhan dan mengepung Ibukota RI. Dalam bidang ekonomi RI menjadi lemah karena daerah penghasil beras jatuh ke tangan Belanda dan hubungan luar sulit karena blokade Belanda. Dalam rangka penghancuran TNI Belanda mengalami kegagalan karena TNI siap bertempur menggunakan siasat pertahanan linier yang kemudian diganti dengan strategi *defensif* dan *ofensif*.¹¹ Agresi Belanda yang pertama ini mengalami kegagalan yang disebabkan kurang matang dalam persiapan menghadapi RI karena ternyata RI adalah negara yang kuat dan siap melawan Belanda demi mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai.

Agresi Militer Belanda I ini tidak berlalu begitu saja tanpa mendapat perhatian dari dunia internasional. Amerika Serikat dan Inggris tidak setuju dengan aksi tersebut, India dan Australia mengajukan resolusi bersama ke Dewan

¹⁰ G. Moedjanto, 1989, *Indonesia Abad Ke-20 Jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 15.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 15.

Keamanan PBB. Rusia membentuk Komisi Pengawas gencatan senjata didukung AS, Australia, Brasilia, Columbia, dan Polandia. PBB menerima usul AS dengan membentuk Komisi Jasa-jasa Baik dikenal dengan Komisi Tiga Negara, Belanda memilih Belgia, Indonesia memilih Australia, dan kedua negara memilih Amerika Serikat sebagai penengah.¹² Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Dewan Keamanan PBB, dalam pertemuannya di Sidney pada tanggal 20 Oktober 1947 KTN memutuskan untuk membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda dengan cara damai.

KTN bertugas sebagai mediator dalam rangka penyelesaian masalah di Indonesia. Sebelum KTN datang ternyata pada tanggal 29 Agustus secara sepihak Belanda memproklamasikan garis demarkasi van Mook sehingga posisi RI semakin sulit dan sempit. Akhirnya KTN berhasil mempertemukan wakil-wakil Belanda dan RI pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal AS, Renville dan berhasil mencapai Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 disusul dengan instruksi penghentian tembak menembak pada tanggal 19 Januari 1948.

Perjanjian Renville terdiri dari 10 pasal persetujuan gencatan senjata, 12 pasal prinsip perundingan politik, dan 6 pasal prinsip tambahan KTN. Perjanjian Renville merupakan sarana penghentian permusuhan Indonesia-Belanda agar dapat melanjutkan perundingan mengenai masalah Indonesia-Belanda. Perjanjian Renville memberikan keuntungan bagi pihak Belanda secara politis maupun militer. Sementara itu bagi RI persetujuan itu berarti pula kesempatan yang lebih baik untuk membina kembali kekuatan militer serta timbulnya simpati dunia

¹² *Ibid.*, hlm. 17.

yang makin lama makin besar karena RI selalu bersedia menerima petunjuk-petunjuk KTN yang mewakili PBB serta selalu menunjukkan sikapnya yang cinta damai. Di samping itu, penerimaan Perjanjian Renville oleh Indonesia tidak dapat diartikan bahwa RI menyerahkan daerah-daerah yang diduduki Belanda dalam Agresi I, karena di daerah-daerah itu, nantinya akan diadakan plebisit. Dalam keadaan normal RI yakin plebisit yang akan diselenggarakan akan dimenangkan pihak RI, ini merupakan faktor mengapa RI mau menerima naskah Perjanjian Renville yang merugikan itu.¹³

Penulis tertarik untuk meneliti Sejarah Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 karena dengan mengkaji kembali peristiwa ini kita dapat melihat bahwa Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 membuktikan bahwa Indonesia memang berdiri menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan didukung oleh dunia internasional. Agresi yang dilancarkan oleh Belanda membuat Indonesia semakin yakin jalan diplomasi yang selalu dijalankan tidak berguna karena selalu dilanggar oleh pihak Belanda. Rakyat siap berjuang untuk tetap mempertahankan kemerdekaannya dan sejarah membuktikan Belanda gagal menguasai RI. Berbagai alasan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia seperti melancarkan Agresi I membuat bangsa Indonesia mendapat simpati dari dunia Internasional dan memantapkan posisi Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat karena berhasilnya Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dari serangan Belanda. Agresi Belanda I mengalami kegagalan, itu membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat yang didukung oleh seluruh rakyatnya dengan sekuat tenaga mempertahankan kemerdekaannya.

¹³ *Ibid.*, hlm. 23.

Perjanjian Renville yang ditandatangani dan disetujui oleh Indonesia walaupun merugikan pihak Indonesia ternyata juga mengandung hikmah di mana kesediaan RI menuruti usul-usul KTN membuat RI semakin mendapat simpati dan dukungan dari negara luar dengan reaksi menentang tindakan Belanda. Perjanjian Renville juga berarti kesempatan bagi RI untuk membina kembali kekuatan militer guna menghadapi kemungkinan serangan Belanda. RI yakin bahwa dengan adanya dukungan dari negara-negara luar, kemerdekaan yang telah dicapai dapat dipertahankan karena negara luar mendukung kemerdekaan RI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong Belanda mengambil tindakan militer pertama terhadap RI?
2. Apa reaksi yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947?
3. Apa pengaruh Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 bagi kedudukan RI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Faktor-faktor yang mendorong Belanda mengambil tindakan militer pertama terhadap RI.
2. Reaksi yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947.
3. Pengaruh Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 bagi kedudukan RI.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang “Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947” ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang berguna antara lain:

1. Bagi ilmu sejarah untuk memperkaya penulisan Sejarah khususnya Sejarah Indonesia Baru; memberikan sumbangan pemikiran lebih lanjut untuk penulisan dan penelitian lainnya yang lebih luas dan mendalam terhadap penulisan sejarah Nasional.
2. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan bahan pengajaran di sekolah pada umumnya sehingga dapat menambah pengetahuan siswa tentang sejarah Indonesia.
3. Bagi pembaca sekalian, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang peristiwa Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947, dan khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa dapat berperan bagi penanaman sikap nasionalisme dan patriotisme.

4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan perbandingan apabila ada penelitian sama yang dilakukan pada waktu yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Sumber merupakan unsur pokok dalam penulisan sejarah. Sumber tertulis maupun sumber lisan dapat dibagi atau dikategorikan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari para saksi mata atau pelaku peristiwa sejarah itu sendiri yang terlibat secara langsung maupun yang menyaksikan secara langsung peristiwa itu terjadi; atau berupa dokumen resmi dan penting pada masa peristiwa itu terjadi. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata atau hasil karya orang lain yang berasal dari kesaksian seorang saksi.¹⁴

Skripsi ini menggunakan sumber tertulis dalam merekonstruksi peristiwa Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 yaitu sumber primer dan sumber sekunder untuk memperoleh data. Buku yang termasuk dalam kategori sumber primer adalah buku yang ditulis oleh orang yang menyaksikan secara langsung suatu peristiwa maupun orang yang hidup sejaman dengan peristiwa itu. Buku-buku yang termasuk sumber primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda I*, karya A.H Nasution, diterbitkan oleh Angkasa, Bandung, tahun 1978. Dalam buku ini dijelaskan mengenai seluk-beluk Agresi Militer Belanda I 21 Juli

¹⁴ Louis Gootschalk, 1986, *Mengerti Sejarah (terjemahan)*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, hlm. 30.

1947 dan campur tangan Dewan Keamanan PBB dalam masalah Indonesia-Belanda khususnya setelah Belanda melancarkan agresi militer pertamanya. Buku ini oleh Penulis digunakan sebagai sumber untuk membahas bab II, bab III, dan bab IV.

2. *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*, karya Ide Anak Agung Gde Agung, diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Nusatama bekerjasama dengan Sebelas Maret University Press, tahun 1995. Dalam buku ini dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mendorong Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947, yaitu berkuasanya Kabinet Schermerhorn-Drees yang merupakan kabinet koalisi dan Partai Katolik memegang peranan penting, kabinet itu mempunyai pandangan yang reaksioner mengenai politik di Indonesia pasca PD II yaitu menginginkan berkuasanya kembali pemerintah Belanda di Indonesia dengan berbagai cara. Buku ini juga membahas Persetujuan Linggarjati dimana gagalnya Belanda memaksakan kehendaknya menggunakan tudung bahwa Linggarjati tidak bisa dilaksanakan sehingga Belanda berhak mengambil tindakan militer. Buku ini oleh penulis digunakan sebagai sumber untuk membahas bab II.

Buku yang termasuk dalam kategori sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah buku yang ditulis oleh orang yang tidak menyaksikan secara langsung suatu peristiwa terjadi, penulis menulis berdasarkan kesaksian dari orang lain. Buku tersebut adalah:

1. *Yogyakarta Benteng Proklamasi*, yang dihimpun oleh Badan Musyawarah Musea, diterbitkan oleh Penerbit Perwakilan, Jakarta, tahun 1986. Dalam

buku ini dijelaskan mengenai serangan militer Belanda yang pertama terhadap RI pada tanggal 21 Juli 1947. Dalam buku ini juga dijelaskan tindakan militer Indonesia sebagai reaksi atas serangan Belanda. Buku ini oleh penulis digunakan sebagai sumber untuk membahas bab III.

2. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, karangan K.M.L. Tobing, diterbitkan oleh Gunung Agung, Jakarta, tahun 1986. Dalam buku ini dijelaskan tentang proses perundingan Linggarjati dan pelaksanaan persetujuan Linggarjati yang mengalami kegagalan sampai akhirnya Belanda mengambil tindakan militer yang pertama terhadap RI pada tanggal 21 Juli 1947. Buku ini oleh penulis digunakan sebagai sumber untuk membahas bab II dan bab III.
3. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, karangan K.M.L. Tobing, diterbitkan oleh Gunung Agung, Jakarta, tahun 1986. Dalam buku ini dijelaskan tentang proses perundingan Renville atas prakarsa Dewan Keamanan PBB melalui Komisi Jasa-jasa Baik atau Komisi Tiga Negara dan tercapainya Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville terdiri dari 10 pasal persetujuan gencatan senjata, 12 pasal prinsip perundingan politik, dan 6 pasal prinsip tambahan KTN. Perjanjian Renville merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan Indonesia-Belanda dan penghentian pertempuran dan persengketaan Indonesia-Belanda sehingga dapat dilaksanakan penyelesaian masalah antara kedua belah pihak secara damai tanpa ada insiden militer. Buku ini oleh penulis digunakan sebagai sumber untuk membahas bab IV.

F. Landasan Teori

Dalam pembahasan masalah tentunya sering muncul istilah-istilah yang menyangkut isi dari penulisan ini, agar terdapat persamaan persepsi mengenai konsep-konsep yang dikemukakan, maka perlu penjelasan beberapa konsep seputar judul dan istilah yang sering muncul yaitu agresi, perang, perjuangan, kemerdekaan, dan revolusi. Konsep-konsep itu penting karena merupakan landasan berpikir dan sebagai pembatasan masalah sehingga diharapkan adanya persamaan persepsi mengenai konsep-konsep yang dikemukakan.

Berkaitan dengan konsep agresi, terdapat beberapa konsep yang mirip tetapi jelas berbeda seperti konsep perang, infiltrasi, subversif, dan agitasi. Dalam hal tindakan atau gerakan dari konsep-konsep tersebut, terdapat saling keterkaitan dan biasanya saling menyertai. Perang adalah permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dan lain-lain); pertempuran bersenjata antara dua pasukan (tentara, laskar, dan sebagainya).¹⁵ Perang kemerdekaan adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan RI dan Belanda dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran terjadi karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan RI dan berupaya menguasai kembali. Bangsa Indonesia menolak keras kehadiran Belanda sehingga meletuslah perang kemerdekaan seperti pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pertempuran Ambarawa, serangan 1 Maret 1949, Bandung Lautan Api, dan sebagainya.¹⁶ Perang kemerdekaan Indonesia yang terbesar ketika Belanda melancarkan Agresi Militer

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 751.

¹⁶ Tim Penyusun, 2005, *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 8*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 57-58.

pertamanya yang merupakan serangan semesta terhadap RI dan kita juga telah membalasnya dengan perlawanan rakyat semesta baik oleh militer maupun oleh rakyat. Perang antara Indonesia dan Belanda tidak hanya dalam bidang militer tetapi juga dalam bidang politik maupun bidang ekonomi dengan cara blokade dan sabotase.

Infiltrasi adalah suatu gerakan kekuatan bersenjata yang melewati suatu kawasan yang dikuasai oleh pasukan lawan atau pihak sendiri baik dalam wujud organisasi militer (tentara reguler) maupun organisasi bersenjata pada umumnya. Gerakan ini dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil atau disebar secara individual. Interval dan kurun waktu gerakan biasanya longgar dan tidak beraturan sehingga tidak terlacak oleh pihak lawan. Apabila gerakan tersebut dilakukan terhadap pihak lawan, segala bentuk kontak dengan lawan sedapat mungkin dihindari. Infiltrasi militer merupakan tindakan penempatan seseorang atau agen ke daerah sasaran di daerah lawan. Lazimnya hal ini melibatkan aksi menyeberangi perbatasan lawan atau daerah yang dikawal oleh lawan.¹⁷ Infiltrasi juga merupakan satu penyusupan atau penyelundupan ke daerah musuh.¹⁸ Belanda melakukan infiltrasi ke dalam wilayah RI berupa penyelundupan tentara KNIL ke dalam kesatuan tentara Sekutu.

Subversif adalah tindakan yang berusaha menggulingkan kekuasaan pemerintah yang sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang dan melemahkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.¹⁹ Subversif juga merupakan

¹⁷ Tim Penyusun, 1989, *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 7*, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta, hlm. 150.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *op cit.*, hlm. 95.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 862.

tindakan seseorang atau suatu gerakan yang mengambil bagian dalam usaha atau rencana untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang.²⁰

Agitasi adalah hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara (pemberontakan, dan sebagainya), biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivis partai politik.²¹ Agitasi merupakan usaha untuk menimbulkan/menghasut semangat masyarakat dan mendukung keributan politik untuk mengacaukan *status quo*; pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi masa.²² Agitasi dilakukan dengan keras dan terus menerus untuk menimbulkan rangsangan emosi orang banyak. Tujuannya untuk membentuk pendapat umum yang sama mengenai sesuatu. Agitasi biasanya dilakukan dengan cara himbauan, desakan, diskusi atau demonstrasi. Pendapat yang hendak dibentuk itu dapat menyangkut soal politik, ekonomi, maupun sosial.²³

Tindakan Belanda di wilayah Indonesia merupakan tindakan-tindakan infiltrasi, subversif, dan agitasi yang berujung pada peristiwa Agresi Militer. Belanda melakukan infiltrasi pasukannya melalui NICA yang bekerjasama dengan tentara Sekutu berupa penyusupan tentara KNIL guna memperkuat kedudukannya di wilayah Indonesia. Belanda melakukan subversif guna memperoleh kembali wilayah Hindia Belanda dari tangan RI dengan jalan kekerasan militer yang terbukti dengan adanya tindakan militer pada tanggal 21 Juli 1947 yang jelas merupakan cara di luar undang-undang. Tindakan agitasi

²⁰ Jahja Muhaimin, dkk, 1985, *Kamus Politik, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 257.*

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 10.

²² Jahja Muhaimin, dkk, *op.cit.*, hlm. 4.

²³ Tim Penyusun, *op.cit.*, hlm. 150.

Belanda berupa usaha Belanda melakukan propaganda-propaganda menentang kekuasaan RI yang dianggap sebagai kreasi Jepang dan Belanda masih merupakan penguasa sah Indonesia menurut Tata Hukum Pemerintahan Belanda. Propaganda Belanda dilakukan di negara-negara Asia, Eropa, Australia bahkan di wilayah Indonesia sendiri guna mencari dukungan. Belanda melakukan agitasi terhadap rakyat di luar Jawa untuk melakukan perlawanan terhadap Pemerintah RI.

Dari semua konsep yang diuraikan di atas, tindakan Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 merupakan tindakan agresi sesuai dengan penjelasan konsep agresi berikut ini. Agresi adalah penyerangan atau serangan suatu negara terhadap negara lain; perasaan marah atau tindakan kasar sebagai akibat kekecewaan atau kegagalan di dalam mencapai suatu tujuan yang ditujukan kepada pihak lain; perbuatan bermusuhan yang bersifat penyerangan fisik atau psikis terhadap pihak lain.²⁴ Agresi juga merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk merongrong kedaulatan politik atau keutuhan wilayah negara lain dengan cara kekerasan dan sama sekali tidak ada unsur provokasi sebelumnya oleh negara yang diserang itu dan karena itu tidak mempunyai dasar pembenaran secara moral dan hukum dalam hukum internasional. Agresi didefinisikan sebagai setiap tindakan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain yang tidak bersifat membela diri atau tidak berdasarkan wewenang internasional atau tidak berdasarkan persetujuan dengan negara yang menderita tindakan agresi itu. Piagam PBB mengatur tindakan agresi dalam pasal 39. PBB menentukan bahwa

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 11-12.

pihak yang tidak mematuhi gencatan senjata dalam persengketaan itu sebagai pihak yang melakukan agresi.²⁵

Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 adalah serangan militer yang dilancarkan oleh Pemerintah Belanda terhadap RI pada tanggal 21 Juli 1947 berdasarkan instruksi dari Pemerintah Belanda melalui menteri Jonkman kepada Gubernur Jenderal Van Mook, agresi dimulai pukul 00.00 dini hari dengan cara menyerbu kota-kota yang diduduki tentara RI guna menghancurkan RI dari segala penjuru baik darat, laut, maupun udara; sebagai akibat gagalnya Belanda memaksakan kehendaknya terhadap pemerintah RI melalui nota ultimatif berdasarkan Perjanjian Linggajati.²⁶

Belanda tidak puas dan menganggap RI tidak bersedia mentaati Perjanjian Linggajati, oleh karena itu pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat lagi pada Perjanjian Linggajati dan bebas bertindak. Ini berarti agresi bagi RI yang dilancarkan tanggal 21 Juli 1947 dengan menyerang daerah-daerah RI baik di Jawa maupun Sumatera dengan menggunakan seluruh kekuatannya, Yogyakarta juga menjadi sasaran pemboman.²⁷ Adapun tujuan agresi Belanda adalah menghancurkan RI baik dalam bidang politik (pengepungan Ibukota RI dan penghapusan *de facto* RI), ekonomi (perebutan daerah-daerah penghasil bahan makanan, tambang, dan bahan ekspor), dan militer (penghancuran TNI).²⁸

Pemerintah Belanda menyatakan bahwa tindakannya itu merupakan tindakan kepolisian yang sangat terbatas, tidak ditujukan untuk mengurangi

²⁵ Jahja Muhaimin, dkk, *op.cit.*, hlm. 6.

²⁶ Ide Anak Agung Gde Agung, 1995, *Pesetujuan Linggajati Prolog dan Epilog*, Yayasan Pustaka Nusantara-Sebelas Maret University Press, hlm. 388.

²⁷ G. Moedjanto, 1988, *Indonesia Abad ke-20 Jilid 1*, Kanisius. Yogyakarta, hlm.189.

²⁸ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 15.

integritas RI dan segera setelah otoritas Belanda dipulihkan lagi maka Belanda siap untuk melaksanakan isi Perjanjian Linggajati. Tujuan Aksi Militer I untuk memberikan dan sekaligus memberantas adanya aksi-aksi perusakan, teror, penculikan, dan sebagainya. Itu sebabnya disebut aksi kepolisian. Aksi tersebut disebut terbatas karena Belanda belum siap melakukan perang yang lebih besar lagi, tetapi dari pihak RI tindakan Belanda tersebut merupakan pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati yaitu Perjanjian Gencatan Senjata dan Perjanjian Linggajati. Belanda telah mengadakan ofensif politik, psikologis, militer, dan ekonomi sehingga pihak RI tidak bisa membiarkan, sehingga terjadilah pertempuran melawan pihak Belanda dan RI menyebutnya sebagai Perang Kemerdekaan I yang merupakan reaksi atas Agresi Militer Belanda I.²⁹

Dari seluruh tindakan Belanda dalam usahanya menguasai Indonesia, tindakan Belanda melancarkan serangan pada tanggal 21 Juli 1947 disebut sebagai tindakan agresi karena Belanda dinyatakan oleh PBB sebagai negara agresor karena Belanda yang melanggar setiap kesepakatan damai dalam hal menghentikan pertempuran seperti pelanggaran Perjanjian Gencatan Senjata. Menurut Perjanjian Gencatan Senjata, Belanda dan RI harus menghentikan pertempuran mulai tanggal 4 Agustus, tetapi ternyata Belanda melanggar dan terus melancarkan serangan ke daerah perbatasan dan daerah yang masih dikuasai RI.

²⁹ Basuki Suwarno, *Hubungan Indonesia Belanda Periode 1945-1950 Jilid II*, 1990, PT Setio Acness, Jakarta, hlm. 314-318.

Kemerdekaan adalah keadaan berdiri sendiri; dalam artian bebas, lepas, dan tidak terjajah lagi.³⁰ Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 bertujuan untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan yang telah dicapai dalam segala bidang kehidupan, sehingga Indonesia bisa hidup bebas tidak terikat oleh negara lain atau di bawah kekuasaan negara lain, bebas menentukan nasib sendiri, dan mempunyai sistem pemerintahan sendiri atau berdaulat baik ke dalam maupun ke luar. Konsep tentang kemerdekaan bagi Indonesia adalah terjaminnya partisipasi rakyat dalam pemerintahannya sendiri tidak seperti kehidupan pada masa penjajahan baik penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang.

Revolusi adalah perubahan ketatanegaraan/pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata); perubahan yang cukup mendasar di suatu bidang.³¹ Revolusi juga dapat diartikan sebagai perubahan dalam pemerintahan maupun kondisi sosial politik yang berlangsung secara cepat atau mendadak. Tahapan revolusi yaitu periode kehancuran, periode transisi dan periode rekonstruksi (penataan kembali). Revolusi pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti: struktur dan kondisi masyarakat; perubahan kependudukan; struktur dan konjungtur perekonomian masyarakat atau negara; dinamika konsep pemikiran kelas

³⁰ *Ibid.*, hlm. 648.

³¹ *Ibid.*, hlm. 839.

menengah dalam masyarakat; evolusi politik; dan keresahan sosial yang diakibatkan kemiskinan, kesenjangan sosial dan ketidakadilan hukum.³²

Pada umumnya revolusi dipahami sebagai perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam struktur ekonomi dan sosial, dalam lembaga sosial, perimbangan dalam hukum, dalam cara kehidupan berpikir manusia. Saat revolusi meletus adalah ketika pemerintahan lama tiba-tiba runtuh karena serangan gerakan revolusioner, atau sebab lain dan kemenangannya ditentukan oleh angkatan bersenjata yang mendukungnya. Kaitannya dengan dinamika revolusi Indonesia, revolusi mengandung pengertian bertumbuhnya kekuatan-kekuatan baru dalam masyarakat yang mendorong tercapainya ekuilibrium (keseimbangan) dan berlangsung pada tahun 1945-1949. Revolusi yang berlangsung selama lima tahun itu adalah revolusi nasional berupa usaha mempertahankan RI dengan sepenuh tenaga dan pikiran, terutama menghadapi perubahan-perubahan dunia pasca PD II. Sikap dan usaha itu tampaknya ada pada kaum politisi yang membidani lahirnya RI dan merumuskan dasar-dasar diplomasi.³³

Pengertian revolusi di atas sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia, revolusi adalah proses politik yang timbul dalam situasi krisis dan pada waktu golongan-golongan konflik mengusahakan perubahan politik dengan cara-cara radikal. Semua organisasi pada umumnya menerima nilai-nilai umum revolusi

³² Abdul Syukur, 2005, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar Jilid 9*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

³³ Abdurrahman Suryomihardjo, 1997, *Dinamika Revolusi Indonesia dalam Sejarah Indonesia*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, hlm. 24.

seperti kemerdekaan, demokrasi, dan hak-hak dasar manusia.³⁴ Periode revolusi adalah masa krisis sosial dan politik dengan intensitas tinggi yang disebabkan perasaan tidak aman dan gelisah menyangkut kelangsungan hidup. Pengawasan tentara Jepang ditarik, begitu pula pimpinan administratif pusat mundur dan belum diganti. Pemerintah lokal bertindak dalam skala terbatas tanpa dukungan kekuasaan pusat. *Foci* kekuasaan bergerak ke arah golongan kekuasaan baru, ialah kelompok-kelompok bersenjata dan bermacam-macam organisasi yang beroperasi dari kota-kota. Ancaman akan kembalinya kekuasaan kolonial menimbulkan kegelisahan yang eksplosif, perlawanan bersenjata meluas, krisis yang berkepanjangan mengakibatkan lahirnya perserikatan-perserikatan dan golongan fungsional yang menjadi alat efektif untuk menjamin kelangsungan hidup golongan.³⁵

Sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia dimulai ketika RI hendak dijajah kembali sesudah Perang Dunia II oleh Pemerintah Belanda yang mengklaim Indonesia sebagai wilayahnya, sebab menurut Hukum Tata Negara Belanda, Indonesia masih merupakan bagian dari kerajaan Belanda yang berada di wilayah Seberang Lautan walaupun dalam kenyataannya Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 atas wilayah Hindia Belanda. Perbedaan pandangan hukum Indonesia dan Belanda menyebabkan kedua belah pihak tersebut saling mengklaim wilayah yang sama dengan posisi hukum internasional yang berbeda. Di satu pihak menganggap

³⁴ Sartono Kartodirdjo, 1970, *Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sejarah Indonesia*, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 4.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

sebagai bagian dari wilayah kerajaan Belanda, dan di pihak lain yaitu Indonesia mengklaim menjadi negara yang merdeka dan berdaulat yang telah memenuhi syarat sah sebagai sebuah negara.

Revolusi kemerdekaan Indonesia merupakan usaha mempertahankan kemerdekaan dan memperoleh pengakuan kemerdekaan secara internasional dengan langkah nyata berupa pengusiran Belanda dari wilayah Indonesia melalui perundingan atau diplomasi yaitu dari Linggajati sampai Konferensi Meja Bundar. Perjuangan bersenjata dikenal dengan Perang Kemerdekaan I yang merupakan reaksi atas Agresi Militer Belanda I. Revolusi kemerdekaan Indonesia berhasil berkat perjuangan berat seluruh rakyat Indonesia dengan tekad dan semangat yang tidak mengenal menyerah dan pantang mundur demi mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai. Akhirnya Indonesia mendapat pengakuan secara *de facto* dan *de jure* atas seluruh wilayah Hindia Belanda baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian. Hipotesis merupakan pedoman bagi peneliti, maka hipotesis harus dirumuskan sebelum penelitian dilakukan. Hipotesis akan dibuktikan dalam penelitian. Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Kalau pelaksanaan perjanjian Linggajati gagal maka Belanda mengambil tindakan militer yang pertama terhadap RI.



Kegagalan pelaksanaan Perjanjian Linggajati dilatarbelakangi oleh sikap Belanda yang berusaha memaksakan kehendaknya melalui ultimatum atas perintah Komisi Jenderal yang mendesak RI menerima usul Belanda yang merugikan pihak RI yaitu pembentukan *gendarmerie* atau polisi bersama dan peraturan Belanda mengenai hubungan luar negeri RI yang diwakili oleh Belanda, hal ini menegaskan kedudukan RI yang tidak sejajar dan sederajat dengan Belanda serta penyangkalan kemerdekaan seratus persen RI.³⁶ Walaupun pihak RI sudah bersedia menerima usul Belanda tetapi Belanda tetap pada pendiriannya untuk melancarkan aksi militer yang dipengaruhi juga oleh berkuasanya Partai Katolik dalam Kabinet Belanda, selain itu Gubernur Jenderal van Mook juga mendapat mandat penuh untuk melancarkan serangan terhadap pihak RI oleh Pemerintah Belanda guna mencapai tujuannya memulihkan kekuasaan Pemerintah Kolonial di Indonesia.³⁷

2. Kalau rakyat Indonesia dan negara-negara luar RI mendukung Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, maka mereka akan bereaksi menentang Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947.

Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 ternyata merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan kemerdekaan RI di mana RI telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga mendapat reaksi keras pihak RI yang terbukti dengan terjadi perlawanan baik oleh militer maupun sipil guna mempertahankan kemerdekaan. Reaksi yang diberikan berupa terjadinya pertempuran baik melalui darat maupun udara sehingga upaya Belanda

³⁶ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 372.

³⁷ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 42.

menguasai daerah Indonesia secara keseluruhan termasuk Yogyakarta sebagai Ibukota RI gagal.³⁸ Proklamasi kemerdekaan RI selaras dengan Piagam Perdamaian (*Charter of Peace*) PBB sehingga reaksi yang muncul dari luar negeri RI pada umumnya menentang tindakan Belanda yang merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB, *Atlantic Charter*, pelanggaran HAM dan pelanggaran Perjanjian Gencatan Senjata. Negara-negara yang mendukung RI antara lain: Amerika Serikat, Australia, India, Inggris, dan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. Wujud dukungan mereka yaitu mengajukan resolusi kepada DK PBB. Ikut campur tangan PBB dalam masalah Indonesia dan Belanda berarti suatu kekalahan politik bagi Belanda. PBB memprakarsai berdirinya KTN sebagai jalan untuk menempuh perundingan Indonesia-Belanda.³⁹

3. Kalau Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 gagal maka kedudukan RI baik di dalam negeri maupun di luar negeri akan semakin kuat.

Dapat dikatakan bahwa Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 gagal dalam upayanya menghancurkan RI baik dalam bidang militer, politik, maupun ekonomi.⁴⁰ Garis demarkasi van Mook yang diproklamirkan Belanda tidak menyurutkan bangsa Indonesia untuk terus berjuang; Perjanjian Renville yang merugikan RI ternyata merupakan kesempatan RI untuk membina kekuatan terutama bidang militer dan menimbulkan simpati dunia sehingga dunia mendukung RI dan mengakui kedudukan dan kedaulatan RI. Pasca Agresi

³⁸ Badan Musyawarah Musea, 1985, *Yogyakarta Benteng Proklamasi*, Perwakilan, Yogyakarta, hlm. 114.

³⁹ K.M.L. Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 8.

⁴⁰ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 15.

Militer Belanda I, RI semakin kuat posisinya dalam negeri dan luar negeri.⁴¹ Hal itu membuat RI yakin bahwa hak sebagai negara yang merdeka dan berdaulat akan diperoleh.

H. Metode Penelitian dan Pendekatan

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dan pendekatan menguraikan secara jelas tentang langkah-langkah kerja yang akan digunakan. Penelitian sejarah mempunyai ciri tersendiri dibanding dengan penelitian ilmu sosial. Penelitian sejarah lebih menekankan pada dua hal yaitu ruang dan waktu atau *scope spatial* dan *scope temporal* serta segi diakronis dan sinkronisnya, oleh karena itu setiap topik penelitian sejarah yang kemudian menjadi historiografi harus mengandung unsur tersebut.⁴²

Metode adalah prosedur atau langkah-langkah kerja dalam rangka membuat analisis dan sintesis atas bahan yang dikaji.⁴³ Metode penelitian secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*, metode penelitian kuantitatif yaitu bentuk metode penelitian yang menggunakan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian dikonversi dalam bentuk angka-angka; *kedua*, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang datanya berupa pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat. Karena skripsi ini disajikan dalam bentuk data-

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴² Kuntowijoyo, 1999, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, hlm. 4.

⁴³ Tim Penyusun, 2005, *Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Sejarah*, Jurusan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

data yang berupa pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat, maka termasuk penelitian kualitatif.

Dalam metode penelitian kualitatif dapat ditempuh melalui dua cara yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian lapangan, peneliti mencari sumber dengan wawancara langsung, penyebaran kuesioner, dan sebagainya. Penelitian kepustakaan atau disebut dengan *library research*, peneliti mencari data-data yang telah dibukukan baik yang berupa buku, majalah, artikel, maupun surat kabar.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) karena data-data diperoleh melalui studi pustaka. Dengan penelitian kepustakaan ini, penulis ingin menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah dikemukakan para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang akan dipilih, memanfaatkan data sekunder dan menghindari duplikasi penelitian.⁴⁴

Dalam mencari sumber-sumber tulisan, penulis menggunakan sumber sejarah yang disebut data historis atau data sejarah. Data historis menurut bahasa Inggris *datum* (bentuk tunggal), *data* (bentuk jamak); bahasa Latin *datum* yang berarti pemberian.⁴⁵ Sumber yang ditulis harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis dan harus berhubungan dengan proses perkembangan historis dari fenomena atau gejala-gejala sosial dalam perurutan temporal yang mengandung dimensi waktu dan yang memberikan sampel pembentuk sehingga terwujud

⁴⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (eds), 1987, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hlm. 45.

⁴⁵ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 94.

keadaan sekarang.⁴⁶ Data historis dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang ada di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, internet, koran, dan majalah yang berhubungan dengan sejarah yang ditulis.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sehingga banyak buku yang digunakan dalam rangka pengumpulan dan penafsiran gejala-gejala untuk diinterpretasikan guna menemukan generalisasinya. Analisis digunakan untuk meramu data yang telah didapat guna membuktikan hipotesis yang dikemukakan sehingga diperoleh kesimpulan. Jadi, penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari beberapa permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah berdasar latar belakang yang dikemukakan.

Metode sejarah adalah prosedur atau langkah-langkah kerja yang digunakan dalam proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan historis. Rekonstruksi yang imajinatif terhadap masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses tersebut disebut historiografi atau penulisan sejarah. Dengan menggunakan metode sejarah dan historiografi (sering dipersatukan dengan nama metode sejarah), sejarawan berusaha untuk merekonstruksi masa lampau manusia sebanyak-banyaknya.⁴⁷ Menurut Louis Gottschalk, metode penelitian sejarah mempunyai empat tahap, yaitu: heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi dan historiografi.⁴⁸

a. Heuristik

⁴⁶ Kartini Kartono, 1980, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, ALUMNI, Bandung, hlm. 225-226.

⁴⁷ Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 32.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 35-38.

Heuristik adalah kegiatan peneliti mengumpulkan sumber yang digunakan dalam penelitian.⁴⁹ Heuristik juga merupakan kegiatan pengumpulan sumber yang diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.⁵⁰ Dalam heuristik terdapat kegiatan memilih subyek untuk diteliti dan mengumpulkan sumber-sumber informasi untuk keperluan subyek yang diteliti. Untuk memperoleh data, penulis melakukan studi literatur dan dokumen sejarah tentang Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 secara lengkap dan menyeluruh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Sanata Dharma, di antaranya adalah buku karangan A.H. Nasution *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 4 Periode Linggajati, Jilid 5 Agresi Militer Belanda I, Jilid 6 Perang Gerilya Semesta I*; buku yang ditulis oleh Ide Anak Agung Gde Agung, *Perjanjian Linggajati Prolog dan Epilog, Dari Negara Indonesia Timur ke RI Serikat, Renville*; buku yang dihimpun oleh Badan Musyawarah Musea, *Yogyakarta Benteng Proklamasi*; buku yang dikarang oleh K.M.L Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggajati dan Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*; buku yang ditulis oleh G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid 1 dan Indonesia Abad ke-20 Jilid 2*.

Penulis juga menggunakan berbagai macam buku dan majalah untuk kelengkapan data, penulis juga mencari data dari internet, koran dan majalah yang berhubungan dengan penelitian tentang Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1945.

⁴⁹ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 94.

⁵⁰ Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 34.

b. Verifikasi atau kritik sumber

Kritik sumber atau verifikasi merupakan uji keabsahan sumber. Verifikasi ada dua macam, yaitu kritik *intern* dan kritik *ekstern*.⁵¹ Kritik sumber bertujuan untuk menghindari kepalsuan sumber, yang mana sumber yang digunakan kebanyakan merupakan sumber sekunder. Dengan demikian, peneliti melakukan pemilihan terhadap sumber secara cermat dan maksimal supaya mendekati kebenaran. Adapun cara yang ditempuh adalah melakukan kritik terhadap sumber yang telah dikumpulkan agar sumber yang diperoleh otentik dan kredibel.

1) Kritik *Ekstern*, untuk mengetahui otentisitas atau keaslian sumber.

Kritik ini dilakukan dengan cara meneliti jenis bahan, gaya penulisan, bahasanya, ungkapannya, tintanya, kalimat yang digunakan, dan jenis huruf yang digunakan serta semua penampilan luar untuk mengetahui otentisitasnya.

Dalam penelitian ini kritik ekstern perlu dilakukan untuk mengetahui otentisitas sumber yang digunakan. Caranya yaitu dengan menggunakan buku pustaka asli yang merupakan hasil karya asli dari para pelaku sejarah atau saksi sejarah maupun bukan saksi atau pelaku sejarah tetapi bukunya relevan dengan topik dari penelitian ini. Penulis menggunakan semua sumber yang berupa buku asli bukan *foto copy* sehingga otentisitas sumber tidak diragukan. Dari seluruh sumber yang digunakan, menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 99.

- 2) Kritik *Intern*, untuk mengetahui kredibilitas atau kelayakan sumber untuk dipercayai.

Kritik ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang ada, sehingga dapat diperoleh fakta yang merupakan unsur untuk rekonstruksi suatu peristiwa.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kredibilitas suatu sumber digunakan metode perbandingan, yaitu membandingkan satu sumber dengan sumber yang lain. Kesamaan informasi oleh beberapa sumber dipandang benar, apabila terdapat perbedaan informasi tentang suatu masalah maupun informasi maka pemecahan yang ditempuh adalah mengikuti informasi yang disampaikan kebanyakan sumber yang relevan.

Contoh penggunaan kritik intern dalam penulisan skripsi ini adalah: terdapat perbedan informasi mengenai hasil dari perundingan yang dilaksanakan di Hoge Veluwe tanggal 14-24 April 1946. Dalam buku yang ditulis Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur Ke RI Serikat*, menyatakan bahwa perundingan di Hoge Veluwe guna menyelesaikan masalah Indonesia Belanda tidak sepenuhnya gagal karena perundingan yang berlangsung juga menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama tetapi Belanda menginginkan bentuk dari persetujuan itu berupa protokol, sedangkan dari pihak RI menginginkan persetujuan harus berbentuk perjanjian (*treaty*). Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid 1* dan buku yang ditulis oleh Samawi, *25 Tahun Merdeka*, keduanya menyatakan bahwa perundingan di Hoge

Veluwe mengalami kegagalan dan tidak menghasilkan apa-apa. Pemecahan yang ditempuh oleh penulis adalah mengikuti informasi yang disampaikan oleh banyak sumber yaitu perundingan di Hoge Veluwe mengalami kegagalan karena tidak dicapai suatu perjanjian, walaupun sudah dicapai kesepakatan tetapi bentuknya tidak ada sehingga jelas perundingan di Hoge Veluwe gagal dan pertemuan antara dua pihak Indonesia dan Belanda tidak menghasilkan apa-apa.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah kegiatan menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya melalui kegiatan verifikasi yang selanjutnya menganalisis sumber dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu rangkaian peristiwa.⁵² Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subyektivitas. Sebagian benar, tetapi sebagian salah. Benar karena, tanpa penafsiran sejarawan tidak bisa berbicara, sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh sehingga orang lain dapat melihat dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subyektivitas penulis sejarah diakui, tetapi juga perlu dihindari. Interpretasi itu ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis.⁵³

- 1) Analisis, berarti menguraikan informasi atau data dari berbagai sumber dan mengkaitkannya antara satu dengan yang lain.

Contoh cara menganalisis, jalan diplomasi memang merupakan pilihan pihak Belanda dan Indonesia untuk menyelesaikan masalah. Perjanjian Linggajati merupakan realisasi bahwa kedua belah pihak benar-

⁵² *Ibid.*, hlm. 99.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 100-101.

benar serius ingin menyelesaikan masalah secara damai, tetapi dalam pelaksanaannya, Belanda melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan pihak RI seperti pelanggaran perjanjian Gencatan Senjata dan Perjanjian Lingajati yang berpuncak pada peluncuran Agresi Militer I tanggal 21 Juli 1947. Melihat kenyataan tersebut, dapat dianalisis bahwa Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 merupakan taktik Belanda dalam upaya mempercepat pemulihan kedudukan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia yang disebabkan Belanda gagal memaksakan kehendaknya melalui jalur diplomasi, karenanya tindakan militerlah yang dirasa dapat memenuhi keinginan Belanda untuk memulihkan Pemerintahan Kolonial di Indonesia seperti sebelum tahun 1942.

- 2) Sintesis, berarti menyatukan atau mengelompokkan informasi atau temuan dari berbagai sumber.

Contoh, penulis melakukan sintesis dengan cara menyatukan informasi dari berbagai sumber yaitu buku yang ditulis oleh A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 5 Agresi Militer Belanda I*, buku karangan G. Moejdanto, *Indonesia Abad ke -20 Jilid 2*, buku yang ditulis oleh Samawi, *25 Tahun Merdeka*, buku yang dihimpun oleh Badan Musyawarah Musea, *Yogyakarta Benteng Proklamasi*, dan buku yang ditulis oleh K.M.L. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, bahwa Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 mendapat reaksi dari dalam negeri dan dari negara-negara luar seperti Amerika Serikat, Inggris, India, Australia, Arab, dan lain-lain. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, Agresi Militer Belanda I

merupakan pelanggaran atas Perjanjian Gencatan Senjata dan Perjanjian Linggajati yang ditentang oleh pihak RI dan luar negeri karena mereka mendukung kemerdekaan RI.

d. Historiografi (penulisan sejarah)

Historiografi merupakan penggambaran atau pengkisahan kembali suatu runtutan peristiwa yang telah terjadi berdasarkan data yang diperoleh dan telah diuji kebenarannya. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis sangat penting. Penulisan sejarah hendaknya dilakukan secara kronologis, sistematis, dan menggunakan tata bahasa yang baku dan ilmiah. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memenuhi kriteria suatu penulisan sejarah yaitu berpedoman pada cara penulisan yang ilmiah.

Penelitian tentang Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 ini telah melalui tahap-tahap metode penelitian sejarah, yaitu *heuristik*, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penulisan skripsi ini mencakup hal-hal penting yang diperhatikan oleh penulis seperti topik, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

Penelitian ini dikaji secara deskriptif analitis, prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan ⁽¹⁾tau melukiskan keadaan obyek penilaian pada saat seka⁽¹⁾ng berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta pada penemuan sebenarnya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Untuk memberi bobot lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan harus diberi arti tidak sekedar menyajikan secara deskriptif, fakta atau data yang terkumpul harus diolah dan ditafsirkan.⁵⁴

Metode deskriptif banyak memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam masalah. Jadi deskriptif analisis merupakan metode penulisan mengenai suatu kejadian dengan data atau fakta yang diolah secara analitis. Deskriptif analisis hendak menguraikan kausalitas, faktor-faktor kondisionil, dan deteminan-determinan dari peristiwa sejarah. Implikasi metodologis dari penyusunan sejarah yang analitis ialah bahwa konsep-konsep, hipotesis-hipotesis, dan teori-teori harus dirumuskan secara eksplisit, sehingga lebih terbuka untuk penilaian secara obyektif.⁵⁵

Penelitian ini dikaji secara deskriptif analisis sehingga tulisan merupakan hasil penggambaran dan pengkisahan tentang Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947; di sini sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan

Pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk memecahkan persoalan dalam penelitian.⁵⁶ Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu pendekatan yang menggunakan berbagai jenis konsep, hipotesis, dan teori sebagai kerangka referensi yang dipakai untuk mencari dan

⁵⁴ Moh. Nazir, 1992, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 63.

⁵⁵ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 4.

⁵⁶ Tim Penyusun, *op.cit.*, hlm. 44.

mengatur data sehingga penulisan sejarah dapat lebih lengkap dalam mempelajari fenomena historis yang kompleks. Pendekatan ini dipilih karena fenomena historis sebagai kompleksitas dapat diinterpretasikan melalui sudut pandang ekonomi, sosiologi, antropologi, dan politik. Pandangan yang semakin meluas terhadap peristiwa sekitar manusia sebagai hasil dari banyaknya data yang terkumpul, metode yang semakin efisien serta terminologi-terminologi yang eksak dari cabang-cabang ilmu sosial menuntut agar ilmu sejarah menggunakan hasil yang diperoleh dari disiplin ilmu lain.⁵⁷

Pendekatan yang multidimensional ini sangat relevan untuk mempelajari fenomena historis yang kompleks dan mempunyai nilai heuristik tinggi untuk menunjukkan peranan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupannya, sehingga lebih tampak kontinuitas sejarah Indonesia dalam berbagai seginya. Nilai strategis dari pendekatan multidimensional ini adalah daya penerangnya untuk mengatasi pendekatan yang berakar pada filsafah tertentu dan menimbulkan determinisme. Pendekatan multidimensional dapat membantu mengisi kekurangan-kekurangan dan menghilangkan kepincangan-kepincangan seperti corak kesatupihakan, gambaran sejarah yang datar, sifat statis dari sejarah yang dikuasai oleh pendekatan legal-institusional, unsur-unsur biografis yang mengambil tempat banyak dalam sejarah Indonesia.⁵⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang peristiwa Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 ini adalah pendekatan historis, politis dan pendekatan sosiologis.

⁵⁷ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 5.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

Pendekatan historis sangat relevan dengan penelitian ini karena topik yang dibahas adalah peristiwa masa lampau yang merupakan sejarah. *History* menurut Louis Gottschalk berarti masa lampau umat manusia.⁵⁹ Menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah tidak hanya mengungkap peristiwa masa lampau saja tetapi juga mengungkap fakta mengenai apa saja, siapa saja, kapan, dan di mana serta menerangkan bagaimana sesuatu telah terjadi. Sejarah juga merupakan rekonstruksi masa lalu dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh orang. Sejarah terikat pada prosedur penelitian ilmiah yang bersandar pada fakta, berarti apa yang sudah selesai. Kebenaran sejarah terletak dalam kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan akan mengungkap sejarah secara obyektif. Hasil akhir yang diharapkan ialah kecocokan pemahaman sejarawan dengan fakta.⁶⁰

Pendekatan historis dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 sehingga diperoleh rekonstruksi sejarah yang obyektif berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga diperoleh sejarah Agresi Militer Belanda I yang lengkap dan sistematis serta berguna bagi kajian ilmiah tentang sejarah Indonesia.

Pendekatan politik digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini, karena penelitian tentang Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 ini termasuk kategori sejarah politik. Pendekatan politik digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang faktor-faktor yang mendorong Belanda mengambil tindakan militer yang pertama terhadap RI. Reaksi yang muncul baik dari dalam

⁵⁹ Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 31.

⁶⁰ Kuntowjyo, *op.cit.*, hlm. 16.

maupun luar RI terhadap Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947, dan dampak Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 terhadap kedudukan RI baik dari dalam maupun luar RI.

Secara politis usaha Belanda menguasai kembali wilayah Hindia Belanda dilakukan melalui usahanya mendekati pihak RI dan menempuh jalan diplomasi yang berhasil mencetuskan Perjanjian Linggajati sehingga memberi kesempatan pihak Belanda menguasai Hindia Belanda karena RI hanya diakui secara *de facto* atas Jawa, Sumatera dan Madura. Kegagalan Belanda membentuk negara-negara federal termasuk RI dan kegagalan Perjanjian Linggajati akhirnya menyebabkan Belanda mengambil tindakan militer pada tanggal 21 Juli 1947 sebagai cara penyelesaian masalah politik di Indonesia dan penguasaan seluruh Indonesia yang ternyata mengalami kegagalan.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memberi gambaran mengenai kondisi masyarakat Indonesia dan negara Belanda sebelum, sewaktu dan sesudah terjadi Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947. Dengan pendekatan sosiologis, kita mengetahui bahwa pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan merupakan masa krisis bagi bangsa Indonesia terutama dalam bidang ekonomi karena seluruh sumber ekonomi Indonesia oleh Jepang diorientasikan dalam rangka mensukseskan perang Pasifik sehingga sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia tercapai, kehidupan ekonomi belum pulih, akibatnya rakyat hidup melarat, kesulitan sandang dan pangan serta tingkat kesehatan yang rendah.

Berada di bawah pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, Hindia Belanda telah dikuras, prasarana hancur, tetapi rakyat mendapat gembelangan fisik maupun

mental sehingga tidak mudah untuk mengembalikan lagi menjadi rakyat seperti masa kolonial Belanda. Rakyat yang dulu terkenal sebagai rakyat yang lemah lembut (*het zachtche volk der aaide*) telah berubah menjadi rakyat yang ulet, tahan uji, dan sanggup menghadapi berbagai macam tantangan apapun, ditambah adanya gembleran Jepang yang semula ditujukan agar dapat ikut membantu pembentukan Asia Timur Raya. Pemuda Indonesia pasca PD II telah menjelma menjadi pembela-pembela tanah air yang tangguh. Pendidikan fisik yang diterima dari Jepang menyebabkan rakyat sedikit banyak mengetahui seni bela bangsa sehingga tidak akan mudah bagi penjajah untuk datang kembali menjajah Indonesia, apalagi kemerdekaan telah diproklamirkan yang menggugah para pemuda untuk bangkit bersiaga mempertahankan kemerdekaan negaranya.⁶¹

Gelora kemerdekaan yang baru dicapai membuat mereka semakin bersemangat berjuang demi mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan RI sampai titik darah penghabisan dan terbukti dengan gagalnya Agresi Militer Belanda I sehingga kedaulatan Indonesia tetap utuh. Segi positif dari pendudukan Jepang adalah rakyat pada waktu itu terutama pemuda dilatih keras dalam bidang militer sehingga setelah Jepang meninggalkan Indonesia, pemuda Indonesia adalah pemuda yang tangguh dan terlatih dalam hal perang walaupun tidak dilengkapi dengan persenjataan modern tetapi dengan siasat perang gerilya ternyata RI melalui TNI dapat menghadapi serangan Belanda dan berhasil memenangkan perang melawan Belanda.

⁶¹ Basuki Suwarno, 1999, *Hubungan Indonesia Belanda Periode 1945-1950 Jilid I*, PT Setio Aness, Jakarta, hlm. 122.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG BELANDA MENGAMBIL TINDAKAN MILITER YANG PERTAMA TERHADAP RI DAN MELETUSNYA AGRESI MILITER BELANDA I 21 JULI 1947

A. Faktor-Faktor Pendorong Belanda Mengambil Tindakan Militer yang Pertama terhadap RI

1. Berkuasanya Kabinet Scermerhorn-Drees

Pada saat Presiden Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Belanda di Den Haag (Negeri Belanda) maupun Pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal van Mook yang berkedudukan di Brisbane (Australia) masih memimpikan bahwa pemerintah Belanda akan dapat mengembalikan pemerintahan kolonial di atas tanah jajahannya dahulu yaitu Hindia Belanda sekalipun dalam bentuk yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi politik sesudah berakhirnya Perang Pasifik.⁶²

Di negeri Belanda terjadi perkembangan yang sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Inggris mengenai masalah kolonisasi di wilayah Asia Tenggara pasca Perang Pasifik yang mana berpengaruh pada politik luar negeri kedua negara tersebut terhadap RI. Kebijakan pemerintah Inggris dapat dilihat pada cara pemerintahan Partai Buruh di bawah PM Attlee yang ingin mewujudkan dekolonisasi di Asia Tenggara termasuk di India secara damai, hal ini

⁶² Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, *Dari Negara Indonesia Timor ke RI Serikat*, Gajah Mada University Press, hlm. 1.

berpengaruh pada sikap Inggris dalam menghadapi masalah yang terjadi di Indonesia yang mana Inggris lebih liberal dibanding Belanda.

Setelah Pemerintah Jerman takhluk dan peperangan di Eropa usai, Pemerintah Belanda di Pengasingan London di bawah pimpinan Gerbrandy kembali ke Den Haag pada tanggal 24 Juni 1945 membentuk kabinet baru Belanda di bawah pimpinan Scermerhorn dan W. Drees. Kabinet Scermerhorn-Drees dapat dianggap sebagai suatu kabinet peralihan yang akan berkuasa sampai diadakan pemilu pada bulan Mei 1946. Di dalam kabinet ini diangkat J.A. Logemann sebagai Menteri Tanah Jajahan yang kemudian diganti nama menjadi Menteri Urusan Tanah Seberang. Beliau di masa penjajahan Belanda di Indonesia menjabat guru besar pada Sekolah Tinggi Hukum di Batavia dan termasuk golongan *Stuw*, yaitu suatu kelompok orang-orang Belanda yang dianggap mempunyai pandangan progresif terhadap Indonesia dalam pelaksanaan politik etis pemerintah Belanda di tanah jajahannya.⁶³

Kabinet Scermerhorn-Drees adalah sebuah kabinet koalisi dan di dalamnya turut serta partai-partai agama. Di antara partai-partai itu, Partai Katolik atau *Katholieke Volks Partij* (KVP) menjadi unsur yang terpenting di samping Partai Buruh sebagai oposisinya. Kabinet Schermerhorn-Drees mempunyai pandangan yang sangat reaksioner mengenai perkembangan politik di Indonesia setelah PD II. Mereka menghendaki agar sesudah PD II Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sebelum tahun 1942 dapat dipulihkan kembali sehingga Pemerintah Belanda dapat meneruskan kembali pemerintah jajahan di Hindia Belanda seperti

⁶³ Ide Anak Agung Gde Agung, 1995, *Perjanjian Linggajati Prolog dan Epilog*, Yayasan Pustaka Nusatama-Sebelas Maret University Press, hlm. 2-3.

dahulu. Mereka hanya bersedia mengadakan sekedar perubahan politik sesuai dengan pidato Ratu Belanda Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942. Pidato tersebut ternyata tidak memberikan unsur positif untuk dapat mengadakan perubahan politik mendasar di Indonesia sesuai PD II karena hanya mengungkapkan bahwa akan diadakan perubahan politik *intern* dan kemudian ada kemungkinan dilangsungkan konferensi kerajaan (*Rijksconferentie*), di mana hubungan ketatanegaraan antara Indonesia dan Belanda akan dibicarakan. Dalam pidato radio tersebut tidak disinggung mengenai hak menentukan nasib sendiri bangsa Indonesia di kemudian hari.⁶⁴

Dengan penjelasan tersebut, jelas bahwa kabinet Scermerhorn-Drees dan demikian juga parlemen sementara yang mendukung kabinet itu tidak mempunyai maksud untuk mengadakan perubahan politik mendasar di Indonesia sesuai PD II yang dapat mendekati aspirasi kebangsaan para pemimpin Indonesia. Dengan perkataan lain, Pemerintah Belanda bertujuan tidak mengadakan dekolonisasi di Indonesia dan berkeras kepala mengembalikan lagi tata susunan pemerintah kolonial Indonesia seperti sebelum tahun 1942, walaupun kenyataan yang ada di Indonesia tidak seperti yang dibayangkan oleh Belanda. Gubernur Jenderal van Mook tidak mendapat gambaran yang jelas dari intelijen Belanda dan Sekutu mengenai perkembangan politik di Indonesia pada masa pendudukan Jepang, oleh karena itu ia tidak dapat menyadari tentang bergelornya arus kebangsaan di Indonesia. Reaksi pertama Gubernur Jenderal van Mook mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 tiada lain adalah rekayasa Jepang dan tidak

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.3.

mendapat dukungan dari masyarakat luas, walaupun di Indonesia sudah terbentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPR) dan pada tanggal 2 September 1945 dibentuk Kabinet RI I yang berdasarkan UUD 1945 yang berbentuk presidensiil dengan Presiden Soekarno sebagai kepala pemerintahan. Dalam masa tersebut RI dapat bertindak tanpa ada hambatan politik dari siapapun.

Admiral Lord Mountbatten dari Inggris juga membenarkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan RI tidak semata-mata kreasi Jepang, akan tetapi merupakan hasil dari suatu perjuangan kebangsaan yang murni yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya Admiral Lord Mountbatten memberikan instruksi kepada Letnan Jenderal Cristison bahwa dalam menghadapi masalah di Indonesia haruslah diambil sikap yang pragmatis dan luwes serta menghindarkan agar pasukan Inggris tidak terlibat di dalam pertikaian antara pihak Belanda dan Indonesia. Berdasarkan instruksi tersebut Letnan Jenderal Cristison setibanya di Jakarta menyatakan bahwa tugas pasukan Sekutu yang utama ialah membebaskan tahanan perang dan melucuti pasukan Jepang dan tidak mempunyai kepentingan dalam soal politik apalagi terlibat dalam masalah politik *intern* di Indonesia.⁶⁵ Menanggapi pernyataan Letnan Jenderal Cristison, Gubernur Jenderal van Mook sangat keberatan dan menganggap pernyataan tersebut sebagai pengakuan *de facto* terhadap Pemerintah RI di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Disini jelas bahwa Inggris tidak mungkin membantu Belanda dalam hal pemulihan pemerintah kolonial di Indonesia, ditambah dengan desakan Letnan Jenderal Cristison terhadap

⁶⁵ Ide Anak Agung Gde Agung. *op.cit.*, hlm. 5.

Gubernur Jenderal van Mook untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan Presiden Soekarno dan Pemerintah RI guna mendapat jalan keluar dari dilema politik yang dihadapi.

Pada tanggal 6 Oktober 1945 Menteri Urusan Tanah Seberang J.A. Logemann dalam pidatonya mengenai masalah Indonesia mengatakan bahwa pangkal tolak Pemerintah Belanda dalam penyelesaian masalah Indonesia adalah pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942 dan bersedia mengadakan pendekatan dengan pemimpin Indonesia tetapi tidak dengan Presiden Soekarno yang dianggap berkolaborasi dengan pihak Jepang. Pernyataan J.A. Logemann tersebut membuat kedudukan Gubernur Jenderal van Mook menjadi lebih sulit karena RI mendapat dukungan luas dari masyarakat, maka Gubernur Jenderal van Mook condong untuk menerima saran Admiral Lord Mountbatten yaitu mengadakan pendekatan dengan Presiden Soekarno yang dipergunakan sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan rencana-rencana politik Pemerintah Belanda.

Tindakan Gubernur Jenderal van Mook mendapat reaksi keras dari pihak Belanda karena merupakan suatu pelanggaran instruksi pemerintah yang berakibat Gubernur Jenderal van Mook dipecat, tetapi karena intervensi Ratu Wilhelmina, Gubernur Jenderal van Mook terhindar dari pemecatan. Pertemuan kedua belah pihak RI-Belanda menyebabkan perkembangan hubungan RI-Belanda memburuk.

Pada bulan Mei 1946, di Negeri Belanda berlangsung kampanye pemilu untuk memilih anggota parlemen. Dalam pertarungan sengit antara partai-partai,

Partai Katolik keluar sebagai pemenang dan Partai Buruh muncul sebagai partai yang kedua, maka pembentukan kabinet harus berdasarkan koalisi antara Partai Katolik dan Partai Buruh.⁶⁶ Sebagaimana diketahui Partai Katolik dengan Partai Kristen lain merupakan suatu kelompok dalam masyarakat Belanda yang sangat menentang perundingan yang diadakan pihak Belanda dan RI. Mereka menghendaki agar dipulihkan kembali kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terlebih dahulu jika perlu dengan kekuatan militer dan sesudah itu baru diadakan perundingan dengan pihak Indonesia. Pokok-pokok pendirian mereka adalah bahwa Indonesia dalam bentuk susunan ketatanegaraan baru akan tetap dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Mereka bersedia menerima suatu perubahan intern ketatanegaraan di Indonesia akan tetapi sama sekali tidak ingin melepaskan Indonesia sebagai negara merdeka di luar lingkungan Kerajaan Belanda.⁶⁷

Partai Katolik memenangkan pemilu dan memegang peranan penting dalam kabinet yang akan dibentuk. Pandangan orang sangat pesimistis bahwa perundingan antara pemerintah Belanda dan RI akan menghasilkan suatu persetujuan. Seperti biasanya pembentukan kabinet di Belanda membutuhkan waktu yang lama apalagi pada waktu itu kabinet harus menghadapi pertikaian Belanda dan Indonesia dan Partai Katolik akan menghalang-halangi setiap bentuk persetujuan yang akan memberi konsesi kepada pihak RI. Oleh karena Partai Katolik memperoleh kursi terbanyak dalam parlemen Belanda, maka Ratu Belanda menunjuk L.J.M. Beel dari Partai Katolik sebagai formatur kabinet yang

⁶⁶ Ide Anak Agung Gde Agung. *op.cit.*, hlm. 94.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

menjabat menteri dalam negeri dalam kabinet Scemerhorn-Dress. Pada tanggal 3 Juli 1946 formatur kabinet L.J.M. Beel berhasil membentuk kabinet, L.J.M. Beel sebagai Perdana Menteri dan. J.A. Jonkman diangkat menjadi Menteri Urusan Daerah Seberang.⁶⁸

Dalam program kabinet Scemerhorn-Drees yang paling penting ialah mengadakan segala upaya untuk mencapai penyelesaian masalah politik di Indonesia. Antara Partai Katolik dan Partai Buruh terdapat perbedaan paham mengenai masalah politik di Indonesia. Partai Buruh menghendaki pemecahan masalah Indonesia melalui jalan perundingan dengan RI, sedangkan Partai Katolik menghendaki pemecahan masalah Indonesia secara militer. Oleh karena itu dalam menyusun program kabinet yang difokuskan pada pemecahan masalah politik di Indonesia terjadi pembicaraan yang alot antara kedua partai dan akhirnya menghasilkan suatu kompromi yang tidak jelas jalan mana yang akan ditempuh oleh pemerintah Belanda. Hal tersebut merupakan suatu tragedi bagi Pemerintah Belanda karena dalam perkembangan selanjutnya pemerintah tidak mempunyai pendirian yang tegas dan konsisten sehingga pemecahan masalah di Indonesia menjadi berlarut-larut sampai menimbulkan aksi militer.⁶⁹

Memang diakui tidak ada jalan lain lagi kecuali mengadakan perundingan dengan pihak RI, apalagi Partai Katolik juga sadar bahwa Pemerintah Belanda tidak mempunyai kekuatan militer yang cukup di Indonesia untuk memaksakan keinginannya memulihkan kembali pemerintahan kolonial di Indonesia. Partai Katolik juga kurang mempunyai kepercayaan terhadap Gubernur Jenderal van

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 97.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

Mook yang dianggap telah banyak memberi konsesi kepada pihak RI dalam perundingan yang dilakukan di masa lampau. Beberapa golongan dari Partai Katolik dan juga golongan Partai Kristen lain menganggap Gubernur Jenderal van Mook sebagai penghianat negara. Untuk mengatasi hal tersebut, diadakan kompromi antara Partai Katolik dan Partai Buruh yaitu dibentuk Komisi Jenderal yang bertugas untuk melakukan perundingan dengan pihak RI yang berhasil dilaksanakan dan membuahkan hasil Perjanjian Linggajati yang disahkan pada tanggal 25 Maret 1947 atas kerja keras Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Scermerhorn dan Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Soetan Sjahrir.

Pelaksanaan Perjanjian Linggajati berjalan alot dan buntu sehingga berdasarkan rapat menteri-menteri Belanda dan Komisi Jenderal memutuskan untuk mengajukan nota kepada pihak RI yang bersifat ultimatif mengingat tersendat-sendatnya perundingan yang tidak menghasilkan apa-apa. Dalam nota itu disebutkan masalah-masalah yang belum diperoleh permufakatan antara kedua belah pihak yang mana pihak Belanda sudah mengajukan saran-sarannya. Jika saran Belanda tidak disetujui pihak RI maka harus dipilih beberapa alternatif di dalam pemecahan masalah politik di Indonesia. Adapun alternatif-alternatif itu adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Tindakan militer terhadap Jawa Barat dan menduduki daerah ini
- b. Tindakan militer terhadap wilayah RI sesuai dengan kekuatan militer Belanda dan menduduki daerah itu
- c. Membicarakan kesulitan dalam pemecahan masalah Indonesia dengan AS dan Inggris

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 261.

d. Mengajukan masalah Indonesia kepada DK PBB.

Dalam analisa Komisi Jenderal itu disebutkan bahwa jika alternatif 3 dan 4 akan dipakai maka memakan waktu panjang sehingga dipilih alternatif 1 dan 2. Dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Mei 1947 dalam pemikiran Komisi Jenderal telah timbul kemungkinan untuk mengadakan aksi militer terhadap RI sebagai alternatif pemecahan masalah politik di Indonesia karena Belanda menganggap perundingan dengan pihak RI mengenai pelaksanaan Perjanjian Linggajati tanpa ada harapan memperoleh hasil.

Pada bulan Mei 1947, belum diputuskan bahwa pemerintah Belanda akan melaksanakan aksi militer, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Hindia Belanda Letnan Jenderal S. Spoor sudah mengadakan persiapan untuk melaksanakan aksi militer karena beliau adalah orang yang sangat ambisius dalam pemecahan masalah Indonesia melalui tindakan militer. Dari perkembangan pertukaran nota sejak nota pertama Belanda tanggal 27 Mei 1947, Gubernur Jenderal van Mook berpendapat sudah tidak perlu dilakukan pertukaran nota dan merencanakan untuk mengadakan aksi militer yang didukung oleh Letnan Jenderal S. Spoor dan Panglima Angkatan Laut Belanda di Hindia Belanda Laksamana Pinke.

Pada tanggal 17 Juli 1947, diadakan sidang kabinet dan terjadi perdebatan antara menteri-menteri Partai Katolik dan Partai Buruh. Partai Katolik menganggap usul-usul Gubernur Jenderal van Mook yang termuat dalam nota adalah kompromi terakhir dari pihak Belanda, jika kompromi ini tidak dapat disetujui pihak RI maka konsekuensinya adalah aksi militer. Berbeda dengan usul Partai Katolik, Partai Buruh menyetujui usul dari Scermerhorn yaitu tidak



menyetujui aksi militer terhadap RI dan jika perlu menyerahkan pemecahan masalah pertikaian antara pemerintah RI dan Belanda kepada pihak ketiga yaitu dunia internasional seperti AS dan Inggris untuk mencegah diadakannya aksi militer yang akan membawa malapetaka besar bagi Belanda. Oleh karena menteri-menteri dari Partai Katolik mengancam akan keluar dari kabinet jika saran Scermerhorn diterima dan untuk menghindari adanya krisis kabinet diputuskan untuk melancarkan aksi militer terhadap RI.⁷¹ Di sini terlihat kelemahan Partai Buruh yang tidak bersedia mempertahankan pendiriannya mengenai masalah politik di Indonesia dengan mempertaruhkan kedudukannya di kabinet. Dengan demikian Pemerintah Belanda terpaksa mengikuti pendirian Partai Katolik yang sangat reaksioner dalam pemecahan masalah di Indonesia.

Berdasarkan keputusan kabinet, pada hari Jumat tanggal 18 Juli 1947 Menteri Jonkman mengirim kawat kepada Gubernur Jenderal van Mook yang memberi kuasa kepadanya untuk melancarkan aksi militer terhadap RI.⁷² Berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Gubernur Jenderal van Mook, selanjutnya Gubernur Jenderal van Mook memerintahkan kepada Letnan Jenderal S. Spoor untuk melaksanakan aksi militer itu tepat pada hari Minggu tengah malam pukul 00.00 tanggal 21 Juli 1947.⁷³

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa Proklamasi Kemerdekaan RI memaksa Belanda untuk menentukan sikapnya terhadap keinginan kemerdekaan dari bangsa Indonesia yang bertolak belakang dengan keinginan Belanda terhadap Indonesia. Dengan aksi militer yang

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 369.

⁷² *Ibid.*, hlm. 376.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 378.

pertama yang dilancarkan oleh pihak Belanda, tampaknya membuktikan kedudukan Ketua Komisi Jenderal yaitu Scermerhorn yang sangat tragis dalam menghadapi masalah di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan Scermerhorn agar mencegah tindakan militer yang fatal itu karena ia yakin bahwa tindakan itu akan memusnahkan kepercayaan pihak RI terhadap Belanda dan pihak luar terutama Inggris, AS, dan Australia yang tidak akan memahami tindakan militer itu karena telah nyata RI sudah menerima hampir 95% usul Belanda dan hanya menolak diadakannya *gendarmerie*.

Dengan aksi militer pertama, Pemerintah Belanda telah mengambil tindakan yang mempunyai konsekuensi yang sangat dalam, mengenai usahanya menguasai RI. Tindakan fatal ini untuk selamanya mensirnakan kemauan baik dan kepercayaan pihak Indonesia terhadap pihak Belanda dan timbulnya jurang pemisah yang sangat lebar antara pendirian Belanda dan RI yang sangat sulit dijembatani lagi, sebagaimana dapat dibuktikan dalam perkembangan selanjutnya di sekitar pemecahan masalah politik di Indonesia.

2. Keadaan Indonesia Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan, di Jakarta terdapat empat kelompok yang masing-masing mempunyai tugas tertentu. *Pertama*, Pemerintah RI di bawah pimpinan Presiden Soekarno yang didukung oleh rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjalankan pemerintahan. *Kedua*, pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Cristison yang akan menjalankan tugas Sekutu. *Ketiga*, Pemerintah Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal van Mook yang ditugaskan oleh pemerintahnya di Den Haag untuk melakukan segala upaya

memulihkan kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda seperti sebelum tahun 1942 (*gezagsherster en restauratie*). Dan keempat, tentara Jepang yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta mempertahankan *status quo* politik Indonesia sebelum pasukan sekutu tiba di Indonesia.⁷⁴ Pemerintah RI berhasil melaksanakan konsolidasi susunan pemerintahan sebelum tentara sekutu tiba di Indonesia yaitu membentuk KNIP yang bertindak sebagai DPR sementara dan membentuk kabinet presidensiil di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan sudah ditunjuk para gubernur untuk propinsi-propinsi RI.

Latar belakang Sekutu datang ke Indonesia adalah berkat Konferensi Potsdam pada bulan Juni 1945 menjelang penyerahan Jerman dan berakhirnya PD II, dalam konferensi tersebut diputuskan bahwa Thailand, Indocina, Malaya, dan Hindia Belanda, akan termasuk di dalam suatu wilayah komando Inggris yang diberi nama SEAC di bawah pimpinan Laksamana Inggris Admiral Lord Mountbatten dan bermarkas besar di Singapura. Dengan demikian Inggrislah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas Sekutu sesudah berakhirnya PD II sesuai dengan keinginan Inggris untuk memainkan peranan politik dan mempertahankan martabatnya sebagai penguasa besar di wilayah Timur Jauh.⁷⁵ Tentara Inggris yang ditugaskan ke Indonesia disebut AFNEI (*Allied Forces for Netherlands East Indies*) yang terdiri dari kesatuan-kesatuan tentara Inggris berkebangsaan India disebut tentara *Gurkha*. Secara terperinci tugas tentara Sekutu adalah sebagai berikut:

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

⁷⁵ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 3.

- a. Menerima penyerahan tentara Jepang tanpa syarat dan melucuti serta mengembalikannya ke tanah airnya,
- b. Membebaskan APWI (*Allied Prisoners and War Interness*) tugas ini disebut RAPWI (*Recovery of Allied Prisoners and War Interness*),
- c. Menciptakan ketertiban hukum dan keamanan sehingga dapat diwujudkan penyerahan kekuasaan yang tertib dari kekuasaan militer Inggris kepada pemerintah sipil dari penguasa yang secara sah berkuasa di wilayah itu,
- d. Mencari keterangan tentang dan mengadili para penjahat perang.

Pada tanggal 29 September 1945 kontingen pertama pasukan India tiba di Indonesia bersama Letnan Jenderal Cristison yang diangkat oleh Admiral Lord Mountbatten menjadi panglima tertinggi Inggris di Jawa dan Sumatera.⁷⁶ Di Indonesia bagian timur dan Kalimantan terjadilah suatu perkembangan yang berbeda dari apa yang terjadi di Jawa. Berakhirnya PD II, daerah tersebut sebagian besar diduduki oleh pasukan Australia di bawah komando Panglima Blamey yang bermarkas besar di Pulau Morotai. Oleh karena itu Admiral Lord Mountbatten menyerahkan kekuasaannya untuk melaksanakan tugas Sekutu kepada Panglima Blamey dan pada tanggal 10 Nopember Panglima Angkatan Perang Jepang menyerah di P Morotai kepada panglima pasukan Australia.⁷⁷ Keadaan tersebut membawa dampak yang jauh karena perkembangan politik di Jawa dan Sumatera berbeda dengan Indonesia bagian timur dan Kalimantan. Oleh karena Panglima pasukan Australia bekerjasama dengan NICA maka NICA dapat

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷⁷ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 6.

melakukan tugasnya sebagai pamong praja di wilayah Indonesia bagian timur dan Kalimantan yang telah diduduki oleh tentara Australia.

Menghadapi pertikaian RI-Belanda, Presiden Soekarno sadar bahwa pihak Inggris menghendaki agar perundingan antara RI-Belanda segera dilakukan guna mendapat penyelesaian masalah sehingga memudahkan Inggris melaksanakan tugas Sekutu di Indonesia jika keadaan aman. Pada tanggal 9 Nopember 1945, Presiden Soekarno mengangkat Soetan Sjahrir sebagai Perdana Menteri dan berhasil membentuk suatu kabinet parlementer pada tanggal 14 Nopember 1945.⁷⁸ Munculnya Soetan Sjahrir sebagai PM dan Menteri Luar Negeri RI membuat Gubernur Jenderal van Mook menjadi puas dan jelas siapa yang akan menjadi mitra dalam perundingan, yaitu Soetan Sjahrir sehingga Presiden Soekarno tidak mempunyai wewenang.

Soetan Sjahrir diterima oleh pihak Belanda dan dunia internasional karena ia tidak pernah berkolaborasi dengan Jepang dan tidak mempunyai pandangan bahwa untuk penyelesaian masalah Indonesia melalui jalur militer dan perlu diadakan perundingan dengan pihak Belanda untuk meletakkan dasar kerjasama antara RI dan Belanda. Pandangan Soetan Sjahrir mendapat tantangan dari golongan muda kiri di bawah pimpinan Tan Malaka dengan membentuk Persatuan Perjuangan dan programnya mengusir Belanda dan Sekutu serta semua tentara asing dari wilayah Indonesia dengan kekerasan dan kekuatan senjata dengan harapan mencapai kemerdekaan 100%. Akhirnya tetap dimufakati bahwa jalan diplomasi yang dipilih yang didasari bahwa perjuangan bersenjata tidak akan berhasil mencapai sasaran tetapi juga tidak dikesampingkan karena

⁷⁸ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 12.

kemerdekaan dipandang lebih dapat dicapai dan dipertahankan melalui proses diplomasi yang melibatkan mediasi pihak ketiga.⁷⁹

Dengan latar belakang di atas, dimulailah serentetan pertemuan untuk membicarakan perundingan dan atas desakan Letnan Jenderal Cristison, pada tanggal 17 Nopember 1946 diadakan perundingan pertama antara Soetan Sjahrir dan Gubernur Jenderal van Mook untuk membicarakan usul-usul Belanda. Dari perundingan di Hoge Veluwe tanggal 14-24 April 1946 yang mengalami kegagalan sampai dengan Perjanjian Gencatan Senjata 14 Oktober 1946 dan Perjanjian Linggajati 15 Nopember 1945 ternyata belum bisa menyelesaikan masalah RI-Belanda.

Setelah perundingan di Hoge Veluwe mengalami kegagalan, Gubernur Jenderal van Mook tidak dapat berbuat sesuatu apa sampai berakhirnya pemilu di Negeri Belanda pada tanggal 17 Mei 1946 yang akan mewujudkan pemerintahan baru yang tentunya mempunyai tanggung jawab pertama untuk merumuskan suatu kebijakan politik baru dalam rangka mencari penyelesaian masalah di Indonesia. Untuk menutup kegagalan pihak Belanda, Gubernur Jenderal van Mook berusaha mengalihkan perhatian politik luar negeri yang ditujukan pada pendekatan terhadap daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal van Mook mulai mengambil suatu prakarsa untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan pemimpin-pemimpin di Timur Besar dan Kalimantan guna menyusun struktur ketatanegaraan baru sesuai dengan perkembangan wilayah ini sesudah PD II. Pada tanggal 8 Juli 1946 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal van Mook No. 4 dibentuklah suatu Komisariss

⁷⁹ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 39.

Pemerintah Umum untuk wilayah ini yang diberi tugas mempelajari dan mengadakan persiapan pembangunan dan pembaharuan ketatanegaraan.⁸⁰

Di pihak RI, setelah gagalnya perundingan di Hoge Veluwe, Soetan Sjahrir mencoba melakukan “diplomasi beras”, yaitu pengiriman beras ke India dan Indonesia menerima bahan pakaian dan alat-alat pertanian. “Diplomasi beras” ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai subjek hukum internasional di dunia internasional dan menerobos blokade ekonomi Belanda. Akibat “diplomasi beras” ini, India juga melakukan tekanan kepada pihak Inggris agar segera menarik kembali pasukan India yang tergolong dalam tentara Sekutu di wilayah Indonesia kembali ke tanah air mereka.⁸¹ RI yang mempunyai hubungan resmi dengan luar negeri akan menarik perhatian dunia internasional lebih besar dan akan lebih mempersulit Belanda untuk memperoleh kembali RI.

Kalau RI berusaha memperkuat posisinya dalam hukum internasional, Gubernur Jenderal van Mook berusaha memperkuat posisinya dalam bidang hukum tata negara di Indonesia dengan membentuk Negara Federal sementara di wilayah Indonesia di luar Jawa dan Sumatera. Usaha Gubernur Jenderal van Mook mendapat dukungan dari kabinet baru yang dilantik tanggal 3 Juli 1946 oleh L.J.M. Beel. Untuk mewujudkan Negara Federal, Gubernur Jenderal van Mook berhasil memprakarsai konferensi Malino yang dilaksanakan tanggal 16-25 Juli 1946 yang mendasari konferensi Denpasar tanggal 7-24 Desember 1946 dan berakhir dengan pembentukan Negara Indonesia Timur. NIT yang terbentuk dapat mengkonsolidasikan pemerintahannya, terpilihlah Tjokorde Gde Rake

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

⁸¹ D. Sidik Suraputra, 1991, *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional*, Universitas Indonesia Press, hlm. 84.

Soekowati sebagai presiden NIT dan Nadjamudin Daeng Malewa sebagai Perdana Menteri yang berhasil membentuk kabinet Nadjamudin sampai dua kali dan berakhir tanggal 11 Oktober 1947.⁸²

RI memandang bahwa Negara-negara Malino ciptaan Gubernur Jenderal van Mook tidak lain hanya negara-negara boneka belaka. Maksud utama dari Gubernur Jenderal van Mook mengenai gagasan negara federal adalah menjadikan RI salah satu diantara Negara Malino dan apabila berhasil, maka penguasaan wilayah Indonesia selesai. Gagasan negara federal ini akan selalu diajukan dalam perundingan dengan RI sebagai salah satu cara untuk mengembalikan kedaulatan Belanda. Bagi RI usul Belanda mengenai negara federal merupakan suatu hambatan untuk memperoleh kembali kesatuan wilayah.

Inggris sadar bahwa setelah gagalnya perundingan di Hoge Veluwe sulit mempertemukan lagi pihak Belanda dan Indonesia untuk berunding tetapi Inggris tetap mengadakan tekanan diplomatik kepada Belanda untuk segera memulai lagi perundingan. Alasan Inggris melakukan tekanan itu karena akan segera dilangsungkan Sidang Umum PBB sehingga dikhawatirkan masalah Indonesia ditempatkan dalam agenda PBB. Pada tanggal 4 Agustus 1946, PM Attle mengambil prakarsa dan mendesak Belanda agar segera membentuk Komisaris Jenderal untuk berunding dengan Indonesia.

Desakan Inggris diterima oleh Belanda sehingga pada tanggal 2 September 1946, berdasarkan UU Pembentukan Komisi Jenderal diputuskan bahwa pemerintah Belanda mengangkat tiga anggota Komisaris Jenderal yaitu: Scermerhorn sebagai ketua dengan anggota M.J.M. van Pol (anggota parlemen

⁸² Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 179.

Belanda dari Partai Katolik) dan F de Boer (mewakili golongan pengusaha Belanda) yang berarti Pemerintah Belanda bersedia melanjutkan perundingan dengan RI dan bersedia menerima tuntutan RI dalam hal pengakuan kekuasaan *de facto* Pemerintah RI di Sumatera dengan syarat bahwa hal itu merupakan keinginan mayoritas penduduk Sumatera. Sehubungan dengan kesanggupan Belanda tersebut pada bulan Agustus 1946, Pemerintah Inggris menunjuk Lord Killearn, Komisaris Agung untuk Asia sebagai penengah perundingan antara RI dan Belanda.⁸³

Perundingan dimulai dengan pengajuan pihak Belanda dan pihak RI atas pendiriannya masing-masing. Belanda berpegang pada lima prinsip dasar perundingan yaitu: Belanda bersedia mengakui RI tetapi tetap terikat dalam lingkungan Kerajaan Belanda; RI itu bukan negara kesatuan tetapi negara federasi; RI diakui berkuasa secara *de facto* di Jawa, dikurangi dengan tempat-tempat yang telah diduduki Belanda, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya; pengakuan terhadap RI tetap mengandung paham bahwa RI mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia; dan Wakil Mahkota Belanda tetap berada di Indonesia. Pihak RI menyatakan pendiriannya berdasarkan keputusan kabinet yang terdiri dari lima pasal program minimum pemerintah dalam penyelesaian sengketa dengan Belanda yaitu: berunding atas dasar pengakuan RI merdeka 100%; mempersiapkan rakyat di segala lapangan politik, ketentaraan, ekonomi dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan RI; menyusun pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis; berusaha segiat-giatnya menyempurnakan

⁸³ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 99.

pembagian makanan dan pakaian; dan perusahaan dan perkebunan dikuasai oleh negara sesuai UUD pasal 33.⁸⁴

Perbedaan usulan antara RI dan Belanda menyebabkan sebagian rakyat menjadi gelisah terutama kaum oposisi yang menghendaki kemerdekaan penuh. Kesempatan ini dipakai oleh golongan yang tidak setuju dengan program pemerintah sehingga berakibat terjadinya penculikan Soetan Sjahrir pada tanggal 27-6-1946 dan usaha pergantian pemerintahan (kudeta) pada tanggal 3 Juli 1946 oleh Tan Malaka. Penangkapan besar-besaran dilakukan oleh pemerintah terhadap orang-orang yang dicurigai antara lain: Iwa Kusuma Sumantri, Subarjo, Moh Yamin, Sayuti Melik, Adam Malik, Sudarsono, Khaerul Saleh, dan lain-lain, kemudian Presiden membubarkan kabinet Soetan Sjahrir II yang sebenarnya sudah demisioner.⁸⁵

Setelah Komisi Jenderal tiba di Jakarta pada tanggal 20 September 1946, Presiden Soekarno menyadari bahwa Pemerintah Belanda akan mendesak untuk menghidupkan kembali perundingan antara RI dan Belanda. Presiden Soekarno yakin kalau kabinet presidensilnya dapat melakukan perundingan dan diterima oleh Belanda. Satu-satunya orang yang dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk menghadapi Belanda di meja perundingan ialah Soetan Sjahrir. Presiden Soekarno meminta Soetan Sjahrir membentuk Kabinet Soetan Sjahrir III pada tanggal 2 Oktober 1946 yang akan menghadapi Komisi Jenderal. Soetan Sjahrir dan Scermerhorn memainkan peranan penting dalam usaha memperoleh

⁸⁴ Samawi, 1970, *25 Tahun Indonesia Merdeka*, Badan Penerbit Kedaulatan, Yogyakarta, hlm. 28.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

penyelesaian masalah RI-Belanda dibantu oleh penengah, Lord Killearn dari Inggris.⁸⁶

Kedua belah pihak mendapat kata sepakat untuk berunding kembali dan pada tanggal 7 Oktober 1946 dibuka konperensi antara kedua delegasi di kediaman Konsul Jenderal Inggris di Jakarta. Delegasi Indonesi terdiri atas Soetan Sjahrir sebagai ketua dengan anggota Mohammad Roem, Soesanto, Sudarsono, dan Ali Budiarjo sebagai Sekretaris Jenderal, serta penasehatnya terdiri dari Soerachman, Darmawan, AK. Pringgodigdo, Oetojo, dan Nasir Pamoentjak. Delegasi Belanda terdiri dari anggota-anggota Komsi Jenderal yaitu Scermerhorn sebagai ketua, M.J.M.van Poll, F.de Boer, dan Gubernur Jenderal van Mook sebagai Sekretaris Jenderal, serta penasehatnya Idenburg, Koets, Abdul Kadir, Verboet, dan Massen. Inggis sebagai penengah diwakili oleh Lord Killearn dengan penasehatnya terdiri dari Wright, Mac Kereth, dan. Balleod.⁸⁷

Konferensi tanggal 7 Oktober menghasilkan kesepakatan membentuk Komite Gencatan Senjata yang merupakan hasil yang sangat penting karena merupakan batu ujian apakah perundingan mengenai masalah politik antara RI-Belanda dapat dilangsungkan. Konferensi pada tanggal 14 Oktober 1946 menyepakati resolusi gencatan senjata.⁸⁸ Resolusi itu mempunyai makna penting dalam membuka jalan untuk melanjutkan dialog politik karena perundingan politik akan dapat dilangsungkan dalam suasana damai dan tenang di mana diketahui setelah tentara Sekutu dan Belanda datang ke wilayah Indonesia

⁸⁶ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 108.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 112

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

terjadilah pertempuran antara tentara RI dan tentara Belanda sebagai wujud penolakan rakyat Indonesia terhadap pasukan Sekutu maupun Belanda.

Pelaksanaan gencatan senjata sudah berjalan baik sehingga Komisi Jenderal dan Delegasi Indonesia memulai perundingan kembali. Sebelum sampai pada perundingan Linggajati, sudah dilakukan empat kali perundingan pendahuluan yaitu tanggal 22 Oktober, 24 Oktober, 1 Nopember, dan 4 Nopember. Perundingan pertama membahas konsep pembentukan Negara Uni yang diperdebatkan tetapi akhirnya ditolak oleh Soetan Sjahrir. Pada perundingan kedua, Belanda menyatakan Indonesia harus menjadi tuan rumah dalam rumah sendiri dan Indonesia harus bekerjasama secara erat dalam pembentukan Uni Indonesia-Belanda, selain itu Belanda juga mengakui kekuasaan RI atas Jawa, Madura dan Sumatera tetapi RI harus terikat dalam Uni Indonesia Belanda. Pertemuan Ketiga masih membahas pembentukan Uni dan perdebatan berkisar pada pengakuan Belanda terhadap RI yang merdeka dan akhirnya diambil kesimpulan kalau Belanda ingin mendapat kesepakatan dari RI, maka harus melalui wadah perjanjian internasional yang mencerminkan kesamaan derajat dalam hukum internasional antara kedua negara, sedangkan RI harus menerima gagasan pembentukan negara uni. Dalam rapat keempat, gagasan Uni diterima tetapi kedudukan Ratu Belanda sebagai kepala Uni ditentang oleh pihak Indonesia.⁸⁹

Pada tanggal 5 Nopember diadakan rapat tidak resmi yang menghasilkan titik temu dan disetujui untuk melanjutkan perundingan resmi di Linggajati yang melibatkan Presiden Soekarno dan Moh. Hatta agar diperoleh masukan pendapat.

⁸⁹ D. Sidik Suraputra, *op.cit.*, hlm. 107.

Pihak RI mengajukan konsep perjanjian yang terdiri dari 10 pasal dan Belanda juga telah menyampaikan konsep persetujuan yang disepakati untuk dirundingkan di Linggajati, Cirebon.

Perundingan Linggajati dimulai pada tanggal 11 Nopember yang merupakan sidang kelima dan berakhir pada tanggal 15 Nopember 1946 yaitu pada sidang kesembilan. Perundingan pada tanggal 11 Nopember dimulai pukul 15.30 di penginapan Scermerhorn dihadiri oleh kedua delegasi dan penengah yaitu Lord Killearn beserta penasehatnya. Dalam rapat pertama dimufakati untuk menggunakan konsep persetujuan Delegasi Belanda yang telah disampaikan pada tanggal 3 Nopember kepada Delegasi RI sebagai kertas kerja dan disepakati untuk membahas pasal-pasal agar dicapai persetujuan. Rapat kedua dan ketiga dilaksanakan tanggal 12 Nopember di kediaman Prof. Scermerhorn. Rapat keempat dilaksanakan tanggal 13 Nopember menghasilkan suatu naskah persetujuan sehingga kedua delegasi meninggalkan Linggajati.

Untuk membicarakan masalah-masalah kecil yang belum dicapai di Linggajati, pada tanggal 15 Nopember diadakan rapat di Kantor Komisi Jenderal di Jakarta yang dihadiri kedua delegasi dan menghasilkan kesepakatan mengenai *arbitrage* atau badan banding.⁹⁰ Dengan demikian naskah Perjanjian Linggajati dapat diparaf dan dilangsungkan upacara penandatanganan Perjanjian Linggajati di kediaman Soetan Sjahrir di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada pukul 17.00.⁹¹

Terwujudnya Perjanjian Linggajati merupakan sarana untuk bersama-sama memecahkan kesulitan mengenai masalah politik di Indonesia. Naskah Perjanjian

⁹⁰ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 166.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 168.

Linggajati dicapai dengan jalan kompromi antara kedua belah pihak RI dan Belanda, sebagaimana lazimnya dalam suatu perundingan untuk mencapai hasil maka kedua pihak tidak dapat mempertahankan secara integral pendiriannya dan terpaksa memberi konsesi timbal balik. Demikian juga dengan apa yang terjadi selama perundingan Linggajati berlangsung sehingga menghasilkan naskah Perjanjian Linggajati.

3. Gagalnya Pelaksanaan Perjanjian Linggajati

Setelah naskah Perjanjian Linggajati diparaf pada tanggal 15 Nopember 1946 di Jakarta, baik Komisi Jenderal maupun Soetan Sjahrir meninggalkan Jakarta untuk menghubungi pemerintah masing-masing dan mengusahakan ratifikasi pengesahan Perjanjian Linggajati oleh badan perwakilan rakyat masing-masing. Komisi Jenderal bertolak dari Jakarta pada tanggal 22 Nopember dan tiba di Belanda tanggal 26 Nopember, sedangkan Delegasi RI meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta.⁹²

Berdasarkan sidang KNIP pada tanggal 28 Februari berakhir dengan pernyataan setuju atas Dekrit Presiden Nomor 6 dan Naskah Perjanjian Linggajati. Parlemen Belanda juga telah menyetujui naskah Perjanjian Linggajati sekalipun dengan tambahan kebijakan pemerintah Belanda sebagaimana dilakukan oleh Menteri Jonkman yang memberikan penafsiran secara sepihak mengenai Perjanjian Linggajati di muka sidang Parlemen Belanda tanggal 10 dan 19 Desember 1946, disusul dengan Mosi Romne-van der Goes

⁹² *Ibid.*, hlm. 178.

Naters yang menyetujui Perjanjian Linggajati jika dalam satu paket dengan keterangan Menteri Jonkman dan penjelasan Komisi Jenderal.⁹³

Perkembangan politik di Indonesia berubah ketika Komisi Jenderal tiba kembali di Jakarta untuk mengesahkan Perjanjian Linggajati. Walaupun sudah disepakati adanya gencatan senjata mulai tanggal 14 Oktober 1946 tetapi dilanggar dan pertempuran antara pasukan RI dan Belanda tidak terhindarkan seperti di Surabaya, Bogor, dan Palembang yang sangat mengeruhkan suasana politik pada waktu itu ditambah penolakan PNI terhadap Perjanjian Linggajati karena melihat tafsiran sepihak dari Belanda.

Setelah beberapa kali pertemuan, kedua delegasi dapat menyepakati naskah Perjanjian Linggajati yang akan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 tanpa mengundang Lord Killearn sebagai penengah karena penandatanganan secara resmi ini berlangsung sesudah pihak Inggris meninggalkan Indonesia pada tanggal 30 Nopember 1946 yaitu ketika tugas Sekutu berakhir.⁹⁴ Upacara penandatanganan Perjanjian Linggajati dilaksanakan dalam upacara meriah di Istana Rijswijk pada tanggal 25 Maret 1947 pukul 17.30.⁹⁵

Pasca penandatanganan Perjanjian Linggajati, tugas berat menanti yaitu melaksanakan Perjanjian Linggajati. Persetujuan itu hanya merupakan dasar yang dipergunakan sebagai pedoman dan petunjuk untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Pemerintah RI sadar bahwa akan timbul kesulitan dalam menafsirkan pasal-pasal naskah persetujuan apalagi melaksanakannya karena Pemerintah Belanda telah mengikat dirinya dengan penjelasan Komisi Jenderal dan

⁹³ *Ibid.*, hlm. 209.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 233.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 235.

pernyataan sepihak Menteri Jonkman, sedangkan RI tidak merasa dirinya terikat pada penjelasan Komisi Jenderal dan pernyataan Menteri Jonkman.

Perundingan untuk melaksanakan persetujuan dimulai dengan perdebatan sekitar pelaksanaan pasal 14, 15, dan 16. Pasal 14 mencakup masalah pengembalian milik warga Belanda dan asing di wilayah RI, masalah perdagangan, keuangan, dan perekonomian RI dan Belanda. Pasal 15 menyangkut pembentukan Negara Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda. Pasal 16 mencakup persoalan militer yaitu usul pembentukan *gendarmarie* oleh Belanda.⁹⁶ Ternyata perundingan berjalan tersendat-sendat dan menurut Scermerhorn jika perundingan tidak berhasil maka rencana untuk mengadakan Konferensi Kerajaan di bulan Juli atau Agustus tidak dapat dilangsungkan.⁹⁷

Tersendat-sendatnya perundingan itu dikarenakan adanya perbedaan yang sangat mendasar antara pihak RI dan Belanda dalam masalah pelaksanaan Perjanjian Linggajati. Segala perhatian Belanda ditujukan pada fase terakhir perkembangan politik di Indonesia yaitu terbentuknya RIS dan dalam masa peralihan menuju Uni sampai tanggal 1 Januari 1949 harus diambil langkah-langkah penyesuaian. Berdasarkan pasal 15, Belanda mempertahankan pendiriannya bahwa dalam masa peralihan, kerajaan Belanda secara *de yure* tetap memegang kedaulatan RI dalam segala bentuk. Pihak RI menolak dan tetap mempertahankan hak-hak dan wewenangnya sebagai negara merdeka sehingga ketika RIS terbentuk pada tanggal 1 Januari 1949, RI benar-benar muncul sebagai negara yang berdaulat dan tidak sebagai negara bagian sebagaimana

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 248.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 254.

termuat dalam pasal 3 Perjanjian Linggajati.⁹⁸ Akibat keadaan tersebut, perundingan buntu dan situasi semakin tegang.

Komisi Jenderal mengajukan usul untuk memberikan nota terakhir kepada pihak RI mengingat tersendat-sendatnya perundingan yang tidak menghasilkan kesepakatan. Panglima Angkatan Darat Jenderal S.Spoor sudah mengadakan persiapan dengan mendatangkan Divisi April dengan persenjataan canggih yang sebenarnya bertentangan dengan pasal 16 Perjanjian Linggajati. Pada bulan Mei 1947, sebuah divisi baru akan dikirim ke Indonesia untuk memperkuat tentara yang bertugas di Indonesia. Tambahan tentara itu membuat jumlah tentara Belanda sekitar 96.176 orang yang jelas jauh melampaui kekuatan tentara RI. Itulah sebabnya Jenderal S.Spoor dapat meyakinkan PM Beel dan Menteri Jonkman bahwa dalam waktu 3-6 hari Belanda dapat menduduki Yogyakarta dan dalam waktu 3-6 bulan dapat menguasai seluruh Indonesia.⁹⁹

Pada tanggal 27 Mei 1947, Komisi Jenderal menyampaikan nota panjang kepada Delegasi RI yang berisi segala persoalan politik, militer berupa pembentukan *gendarmerie*, ekonomi, dan keuangan dengan merujuk kepada ketentuan Perjanjian Linggajati. Nota tersebut dianggap sebagai usaha terakhir dari pihak Belanda untuk mengadakan pendekatan dengan pihak RI. Pada tanggal 8 Mei nota Belanda dijawab oleh Delegasi RI, selanjutnya Komisariss Jenderal menanggapi dan menyusun nota tambahan yang isinya tidak berusaha untuk

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 258.

⁹⁹ K.M.L. Tobing., *op.cit.*, hlm. 56.

meletakkan jembatan perselisihan tetapi bersifat ultimatif dan menyatakan usul-usul RI tanggal 8 Juni bertentangan dengan Perjanjian Linggajati.¹⁰⁰

Setelah dilakukan pertukaran nota, ternyata rakyat RI menentang kebijakan Soetan Sjahrir yang dianggap bertele-tele dan terlalu memberi konsesi kepada pihak Belanda. Oposisi itu berasal dari PNI, Masyumi, Pesindo, dan beberapa golongan di sayap kiri sehingga pada tanggal 19 Juni 1947 Soetan Sjahrir mengadakan pidato radio yang merupakan pertanggungjawaban atas kebijakannya menghadapi Komisi Jenderal dan menegaskan pendirian RI. Pada tanggal 20 Juni 1947, Soetan Sjahrir menyampaikan nota jawaban yang berisi kesediaan RI menerima usul Belanda mengenai pembentukan pemerintah interim dan kedudukan Wakil Mahkota bersifat *de jure* secara formal. Nota dibalas oleh Komisi Jenderal tanggal 21 Juni dan dibalas oleh Soetan Sjahrir tanggal 23 Juni yang membuktikan suatu nada penuh rekonsiliasi dan memberi konsesi secara maksimal dibuktikan dengan kesediaan membentuk badan-badan federal.¹⁰¹

Akibat kebijakan Soetan Sjahrir tersebut, setelah Soetan Sjahrir tiba di Yogyakarta tanggal 24 Juni 1947, semua kelompok politik dan kabinet menentang keras dan berakibat Soetan Sjahrir meletakkan jabatannya pada tanggal 27 Juni 1947 dan Kabinet Sjahrir III demisioner sehingga RI kembali dipegang oleh Presiden Soekarno dalam kabinet presidensilnya. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Amir Syarifuddin sebagai pembentuk kabinet baru pengganti kabinet Sjahrir III.¹⁰²

¹⁰⁰ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 313.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 323.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 330.

Sebelum kabinet Amir Syarifuddin terbentuk, Presiden Soekarno menjawab nota melalui memorandum kepada Komisi Jenderal tanggal 27 Juni sebagai jawaban atas nota Komisi Jenderal tanggal 23 Juni 1947, isinya dianggap menolak usul Belanda sehingga Gubernur Jenderal van Mook memberi perintah kepada Jenderal S.Spoor untuk segera mempersiapkan aksi militer yang direncanakan tanggal 28 Juni 1947.

Dalam perkembangan rencana melancarkan aksi militer Belanda terhadap RI, timbul intervensi dari AS dan Inggris karena terkesan pada pidato radio Soetan Sjahrir yang dianggap telah memberi konsesi yang memuaskan bagi pihak Belanda dan untuk menghindari malapetaka perang guna kelancaran kepentingan masing-masing negara. Kedua Konsul Jenderal mereka kemudian mengadakan tekanan kepada Belanda sehingga aksi militer dibatalkan.

Gubernur Jenderal van Mook selanjutnya menyampaikan nota baru pada tanggal 29 Juni yang harus dijawab RI dalam waktu satu minggu. Pada tanggal 3 Juli 1947, Kabinet Amir Syarifuddin dilantik, kemudian tanggal 5 Juli 1947, Amir Syarifuddin mengirim nota jawaban yang isinya ditolak oleh Belanda, maka Gubernur Jenderal van Mook dan Scermerhorn merasa sudah tidak perlu menjawab nota dari RI dan menghendaki segera dilancarkan aksi militer. Rencana aksi militer diketahui oleh Setiadjit selaku Wakil PM yang kemudian melaporkan kepada Amir Syarifuddin sehingga atas ijin kabinet, Amir Syarifuddin melakukan pidato radio yang pada prinsipnya menerima usul Belanda agar aksi militer yang rencananya akan dilancarkan tanggal 8-10 Juli

dibatalkan, akibatnya aksi militer dibatalkan yang juga karena intervensi AS dan Inggris.¹⁰³

RI dan Belanda memulai perundingan baru pada tanggal 14-15 Juli 1947, yang intinya RI tetap menolak persoalan susunan dan wewenang *gendarmerie* dan penghentian segala permusuhan serta penarikan pasukan RI dari garis demarkasi. Amir Syarifuddin masih berusaha mencari jalan keluar dan pada tanggal 17 Juli mengadakan pidato radio untuk mendesak Belanda menunda tuntutananya berupa penghentian segala permusuhan, tetapi usul Amir ditolak oleh Gubernur Jenderal van Mook dan dengan demikian *aide memoir* Gubernur Jenderal van Mook juga ditolak oleh pihak RI.¹⁰⁴

Pada tanggal 18 Juli 1947, Menteri Jonkman mengirim kawat kepada Gubernur Jenderal van Mook yang isinya memberi kuasa kepada Gubernur Jenderal van Mook untuk melancarkan aksi militer yang bersifat polisionil dan dilakukan secara terbatas. Gubernur Jenderal van Mook menjawab kawat dari Menteri Jonkman yang menyatakan bahwa aksi militer akan dilancarkan pada hari Minggu tanggal 20 Juli 1947 tengah malam pukul 00.00 atau tanggal 21 Juli 1947 yang diharapkan tidak bocor karena aksi dilakukan secara mendadak agar dapat menguasai tempat-tempat yang strategis. Gubernur Jenderal van Mook juga menyarankan agar AS dan Inggris diberi tahu mengenai rencana aksi militer tetapi tidak memberi tahu waktu pelaksanaan dengan memberikan penjelasan tentang sebab-sebab sikap Belanda menganggap sudah tidak terikat lagi dengan

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 349.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 372.

Perjanjian Gencatan Senjata tanggal 14 Oktober 1946 dan Perjanjian Linggajati 25 Maret 1947.¹⁰⁵

Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal van Mook mengirim surat kepada Presiden Soekarno yang berisi tuduhan kepada pihak RI karena tidak menepati ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Persetujuan Gencatan Senjata dan tindakan RI yang bertentangan dengan Perjanjian Linggajati. Pernyataan Gubernur Jenderal van Mook itu jelas merupakan pembatalan secara sepihak atas persetujuan yang telah disepakati dan Belanda merasa bebas untuk mengambil tindakan militer terhadap RI berdasarkan kuasa dari Pemerintah Belanda sesuai kawat dari Menteri Jonkman tanggal 18 Juli 1947. Gubernur Jenderal van Mook memerintahkan Jenderal S.Spoor untuk melancarkan aksi militernya dan pada hari minggu tanggal 21 Juli 1947 pukul 00.00 seluruh pasukan Belanda digerakkan menuju daerah-daerah RI di bawah komando Jenderal S.Spoor.¹⁰⁶

B. Meletusnya Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947

Dari diplomasi beralih ke agresi, itulah fakta yang ada dalam sejarah revolusi Indonesia. Sebelum Belanda melancarkan agresi pertamanya, ternyata sebelumnya militer Belanda semakin agresif dan melakukan tindakan provokatif serta blokade yang semakin diperkuat. Seminggu sebelum meletusnya agresi militer pertama, Belanda sudah melakukan serangan sepihak baik melalui laut, darat, maupun udara di saat perundingan RI-Belanda untuk melaksanakan Perjanjian Linggajati berlangsung. Tercatat pada bulan Juni 1947 jumlah

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 376.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 379.

pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Belanda bertambah banyak baik di Jawa maupun di Sumatera seperti pengintaian, gerakan pasukan, penyerangan kecil-kecilan, tembakan-tembakan, pelanggaran garis demarkasi, maupun pertempuran besar seperti di Mojokerto, Bandung, dan daerah lain, sehingga situasi semakin genting. Pada bulan Mei 1947, wilayah RI sudah banyak yang jatuh ke tangan Belanda. (Lihat lampiran 1 halaman 136)

Agresi militer Belanda pertama dilancarkan secara mendadak di bawah komando Jenderal S.Spoor baik melalui darat, laut, maupun udara. Belanda mulai melakukan penyerangan, pertempuran secara besar-besaran dan bebas terdiri dari serbuan ke arah pertahanan RI, pendaratan terutama di sepanjang pantai Jawa Timur serta serangan udara atas semua lapangan terbang RI di Jawa dan Sumatera.¹⁰⁷ (Lihat lampiran 2 halaman 137)

Pasukan Belanda dalam agresinya mengandalkan pada tiga unsur, yaitu: unsur kecepatan dan pendudukan dengan mempergunakan tank dan panser sehingga kebal terhadap tembakan senjata ringan, unsur tembakan jarak jauh dan memusnahkan dengan mempergunakan meriam artileri, serta unsur zeni dengan kemampuan cepat mengganti jembatan dan jalan yang dirusak TNI. Jumlah keseluruhan kekuatan tentara Belanda mencapai 100.000 orang tentara Kerajaan Belanda dan 45.000 orang KNIL. Adapun lokasi dari seluruh kekuatan tentara Belanda adalah sebagai berikut:¹⁰⁸ (Lihat lampiran 3 halaman 138)

¹⁰⁷ A.H Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda Pertama*, Angkasa, Bandung, hlm. 127.

¹⁰⁸ Tuk Setyohadi, 2002, *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*, CV. Rajawali Corporation, Jakarta, hlm. 54.

- a. Divisi 7 Desember di bawah komando Mayor Jenderal M. Drurst Brit, berkedudukan di Jakarta.
- b. Divisi B di bawah komando Mayor Jenderal Siem de Waal, berkedudukan di Bandung.
- c. Divisi A Surabaya di bawah komando Mayor Jenderal de Bruyne.
- d. Brigade T di Semarang di bawah komando Kolonel J. van Langen.
- e. Brigade Z di Medan di bawah komando Kolonel Piet Scholten
- f. Brigade U di Padang di bawah komando Letnan Kolonel J.W.Sluyter.
- g. Brigade Y di Palembang di bawah komando Letnan Kolonel Mollinger.

Di Jawa Barat, pasukan dari Divisi 7 Desember dan Divisi B mulai menduduki garis awal sepanjang garis demarkasi. Divisi 7 Desember diberi tugas menyerbu ke arah timur untuk menguasai Kerawang dan Cikampek serta ke selatan mulai dari Bogor untuk menguasai Cibadak dan Sukabumi. Divisi B menyerbu ke utara menguasai Subang dan Pamanukan kemudian menuju ke Cirebon. Kedua Divisi ini berhadapan dengan Divisi Siliwangi dan laskar-laskar pejuang RI lainnya. Kedua Divisi bergabung di Cirebon dan melanjutkan gerakannya ke Pantura untuk menguasai Tegal dan Pekalongan kemudian menguasai Purwokerto dan Cilacap.

Di Jawa Tengah, Brigade "V" KNIL disusul Brigade III Divisi 7 Desember dan Brigade "W" KNIL melancarkan serangan dari darat dan udara atas Godog (antara Demak-Purwodadi). Brigade "V" di bawah komando Kolonel Meier

khusus bertugas menyerbu ke Jawa Tengah untuk merebut daerah Divisi II pimpinan Mayor Jenderal Gatot Subroto.¹⁰⁹ (Lihat lampiran 4 halaman 139)

Berdasarkan Komunike Perang Agresi Militer Belanda I di Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut: tanggal 21, pesawat pembom Belanda menembaki lapangan terbang Panasan, kereta api, di Semarang mengadakan serangan darat; tanggal 22, Belanda membombardir Ungaran, Ambarawa, dan Salatiga dari udara; tanggal 23, Belanda menyerang Salatiga dan Semarang, lapangan Maguwo di Yogyakarta dan Magelang melalui udara; tanggal 24, Belanda tertahan di Semarang, di Cilacap dan Purwokerto menyebarkan pamphlet provokatif; tanggal 25 dan 26, terjadi pertempuran sengit di Semarang, Belanda menyerang Maguwo; tanggal 27-30, Belanda mengepung Tegal dan Slawi.¹¹⁰

Tanggal 28, terjadi pertempuran di Cilacap dan Ambarawa; tanggal 29 dan 30, pesawat terbang Belanda menembaki rakyat di sekitar Pekalongan dan Maguwo; tanggal 1 Agustus, kapal pemburu Belanda menembaki Rembang, Semarang, Maguwo dan dilanjutkan ke Solo dan Madiun; tanggal 2, menyerang Weleri dan Semarang, menembaki kereta api, rumah dinas, kampung-kampung, dan pengungsi di Salatiga; tanggal 3, menyerang stasiun Kedung Jati dan Gubug; tanggal 4, menyerang Ambarawa, Demak, Kudus, dan Maguwo melalui udara; dan tanggal 5, mengadakan tembakan-tembakan dari Ambarawa dan menyerang Salatiga.¹¹¹

¹⁰⁹ A.H Nasution, *op.cit.*, hlm. 128.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm.210.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 246.

Di Jawa Timur, sasaran Belanda merebut daerah perkebunan Malang, Besuki dan Pulau Madura. Penyerbuan daerah Malang mengerahkan Brigade X KNIL dan Mariniers Brigade untuk Besuki. Brigade X menyerang Sidoarjo ke jurusan Malang sambil memperluas pendudukan kota dan pusat-pusat perkebunan, sedangkan Brigade marinirnya mendarat di Pasir Putih sambil mengadakan *raid* di Banyuwangi guna merebut jalan-jalan raya serta kota-kota di daerah Besuki dan Malang Timur.¹¹² (Untuk daerah operasinya lihat lampiran 5 halaman 140)

Di front Mojokerto dan Gresik, Belanda hanya melakukan kegiatan untuk menarik perhatian dan mengikat saja. Berdasarkan komunikasi perang Agresi Militer I di Jawa Timur dapat dideskripsikan sebagai berikut: tanggal 21, pesawat terbang Belanda menyerang Magetan, Mauspati, Gresik ditembaki dari arah laut; tanggal 22 menyerang Gresik dan Madiun; tanggal 23, menyebarkan pamflet di Surabaya; tanggal 24, mundur ke Sukorejo; tanggal 25, bertempur di Mojokerto dan Gresik; tanggal 26, menyerang sebelah barat Surabaya dan memduduki Brantas; tanggal 27-28, menyerang Semampir dan Cerme; tanggal 29 Juli-4 Agustus, menyerang Surabaya dan Cerme; dan tanggal 5 Agustus, menyerang Gresik dan Mojokerto.¹¹³ Tujuan Belanda di Jawa Timur juga untuk memisahkan ujung timur pulau Jawa dari kepulauan Sunda Kecil (Bali) yang sampai saat itu senantiasa diinfiltrasi oleh RI dari Besuki dan Madura serta Negara Indonesia Timur di bawah Presiden Soekowati akan lebih aman jika Belanda dapat

¹¹² *Ibid.*, hlm. 247.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 250-254.



membendung infiltrasi di Pulau Jawa sendiri. Gerakan Belanda dibagi tiga yakni penyerbuan ke Madura, Malang, dan Besuki-Probolinggo-Lumajang.¹¹⁴

Di Sumatera, sebelum Belanda melancarkan agresi militernya di darat, di laut sudah menjadi kenyataan adanya perang. Tentara Belanda giat sekali mencegah adanya lalu lintas RI di laut seperti pelayaran Jambi-Singapura diblokade. Belanda menempatkan dua Brigade yaitu Brigade "Z" Di Sumatera Utara dipimpin oleh Jenderal Mayor Scholten yang mempunyai kekuatan 4 batalyon infanteri dibantu angkatan udara serta Brigade KNIL. Untuk Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan ditempatkan Brigade "U" di bawah pimpinan Letnan Kolonel Mollinger yang membatasi diri dengan tenaga yang ada padanya sekedar untuk meluaskan daerah pendudukannya di sekitar Padang dan Palembang guna memperoleh kedudukan yang lebih baik agar kemungkinan ofensif pada masa yang akan datang lebih mudah dan berkonsentrasi pada pendudukan perkebunan dan ladang minyak. (Daerah operasi militer Belanda di Sumatera lihat lampiran 6 halaman 141)

Di Sumatera Selatan, Divisi VIII Garuda RI yang mempunyai 5 resimen terdiri atas 22 batalyon infanteri berhadapan dengan brigade Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Mollinger yang merupakan Brigade modern yang lengkap dengan kekuatan kurang lebih 6000 orang yang siap melancarkan agresi mulai tanggal 21 Juli 1947. (Daerah operasinya lihat lampiran 7 halaman 142)

Di Sumatera Selatan, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan darat melalui semua jalan ditambah serangan dari udara yaitu menyerang markas brigade pertempuran di Prabumulih, dilanjutkan serangan laut

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 267.

di Tanjung Enim dan Sukaraja. Pertahanan brigade RI diterobos dalam satu hari sehingga dalam waktu satu minggu tentara Belanda dapat maju sampai hampir ke semua kota di pedalaman Palembang.¹¹⁵ Tanggal 22 Juli, Belanda menyerbu dengan *truck* dan kereta api dan berhasil menduduki Niru. Sampai pada tanggal 29 Juli, Belanda melakukan serangan darat dan dapat menduduki Lahat, Tebing Tinggi, Niru-Tanjung Enim. Tanggal 29-30, bergerak melalui sungai-sungai, jalan-jalan kereta api, dan jalan-jalan pipa kemudian menyerang Muara Tiga, Martapura dan Payapangkuang.

Nyata sekali bahwa operasi pasukan Belanda yang terbatas di Sumatera Selatan bermaksud untuk menguasai sumber-sumber dan pipa-pipa minyak yang berada di sekeliling Lingkaran Singsang-Sekayu/Sukaramai-Lahat-Baturaja/Martapura-Kayuagung/Pampangan-Sungsang, demikian pula dikuasainya perhubungan-perhubungan darat dan air yang terpenting. Jelaslah bahwa tujuan penyerangan Belanda yang pertama bersifat ekonomis belaka yaitu menguasai timah Bangka Biliton dan minyak karet Palembang-Lahat-Baturaja.¹¹⁶

Di Sumatera Tengah khususnya di daerah Padang, penyerbuan tentara Belanda sangat terbatas dan tidak ada penyerbuan secara besar untuk menduduki suatu daerah perkebunan atau perusahaan yang penting. Dalam waktu dua hari, Brigade "U" melakukan serangan yang mendadak mulai tanggal 21 Juli 1947 dan dapat mencapai maksudnya dengan melakukan aksi pembersihan sekeliling lapangan Tebing kemudian bergerak ke Lubuk Alung. Pasukan RI mundur ke utara dan di sektor timur, pasukan Belanda menyerbu ke Indarung sehingga

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 278.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 282.

pasukan RI mundur ke Ladang Padi.¹¹⁷ (Daerah operasi Belanda di Sumatera tengah dapat dilihat pada lampiran 8 halaman 143)

Di Sumatera Utara, keadaan tidak kalah genting, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyebarkan pamphlet yang isinya menyatakan bahwa Belanda akan melakukan aksi pembersihan guna menumbangkan pemerintahan yang mementingkan diri sendiri. Tindakan Belanda tersebut merupakan taktik Belanda untuk memancing dan mengikat TNI di garis demarkasi seraya menyerbu dengan pasukan yang telah didaratkan, kemudian melakukan gerakan mengepung jauh dari belakang. Setelah seminggu berlangsung, beberapa kali terjadi pertempuran sengit antara TNI dengan pasukan Belanda, sebagian besar pasukan TNI maju ke pinggir kota Medan.¹¹⁸

Di Aceh, Belanda menyerang melalui udara dan laut, serta markas TNI dibom. Pada tanggal 22 Juli 1947, Belanda menyerang Binjai, tanggal 23, melakukan serangan dari pantai. Pada tanggal 24, melancarkan serangan udara dan menembaki rumah-rumah penduduk di Tanjung Morawa, pada tanggal 2 Agustus, daerah Tapanuli dan Nias diserang, dan tanggal 28 Juli merupakan puncak taktik Belanda di Sumatera Timur, Belanda mendaratkan pasukannya dari 7 buah kapal di Pantai Cermin sehingga terjadi pertempuran dengan pasukan RI yang mampu bertahan. Pada tanggal 29 Juli, Belanda berhasil menerobos pertahanan RI di Rantai Laban dan berhasil memasuki Tebing Tinggi kemudian

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 284.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 289.

meneruskan gerakannya ke Pematang Siantar.¹¹⁹ (Skema penyerangan Belanda dapat dilihat di lampiran 9 halaman 144)

Demikianlah Agresi Militer Belanda I yang dilancarkan mulai tanggal 21 Juli sampai tanggal 4 Agustus 1947. Walaupun pada tanggal 4 Agustus 1947 sudah disepakati adanya gencatan senjata tetapi ternyata tentara Belanda masih juga melakukan penyerangan terhadap wilayah RI. Pasca Agresi I, Belanda berhasil menduduki daerah-daerah RI seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Purwakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Madura, Medan, dan Palembang. (Lihat lampiran 10 halaman 145)

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mendorong Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda yang pertama adalah gagalnya pelaksanaan Perjanjian Linggajati terkait dengan usulan Belanda membentuk polisi bersama antara RI dan Belanda yang ditolak oleh RI. Dari dalam negeri Belanda, kabinet yang berkuasa yaitu kabinet Scermerhorn-Drees yang didukung oleh kekuatan Partai Katolik dan partai Kristen lain memegang peran yang kuat dalam menentukan kebijakan mengenai penyelesaian masalah di Indonesia melalui jalur militer. Berdasarkan intruksi dari Menteri Jonkman, Gubernur Jenderal van Mook melancarkan Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947.

Agresi Militer Belanda I telah berhasil mengubah posisi Belanda, Belanda berhasil memperluas daerah kedudukannya dengan menguasai Jakarta, Bandung, Bogor, Purwakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Madura, Medan, dan Palembang. Agresi Militer Belanda I mengalami kegagalan dalam usahanya menghilangkan kekuasaan *de facto* RI di wilayah Indonesia maupun di luar

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 298.

negeri. Kekuatan militer RI juga masih tetap bertahan dan ini membuktikan bahwa RI masih merupakan negara yang kuat didukung oleh seluruh rakyat dan kekuatan militernya.



BAB III

REAKSI DARI DALAM RI DAN LUAR RI TERHADAP AGRESI MILITER

BELANDA I 21 JULI 1947

A. Reaksi Dari Dalam RI

1. Bidang Militer

Agresi Militer Belanda I dilakukan secara serentak dari semua pangkalan militer Belanda di Jawa dan Sumatera. Khusus di Jawa, gerakan seluruhnya ditujukan untuk dapat mengepung dan menguasai Yogyakarta. Tentara Belanda menghimpit dan mengucilkan Yogyakarta dari daerah-daerah lain dengan siasat menggunting dan berusaha memisahkannya dari kekuatannya di Jawa Barat. Belanda juga menutup jalur perhubungan Yogyakarta ke Pantai Utara dan jalur logistiknya dari Jawa Timur.

Perhitungan Jenderal S. Spoor terlalu banyak didasarkan pada perkiraan-perkiraan yang salah, yang menganggap manusia Indonesia sekalipun sudah melalui penempaan penderitaan dalam dua masa penjajahan Belanda dan Jepang masih akan merasa gentar kalau sudah digertak dengan pasukan yang dipersenjatai lengkap, tank, kendaraan berlapis baja, dan kapal terbang yang memuntahkan peluru 12,7 ke dalam barisan para pengungsi, namun ternyata manusia Indonesia tidak gentar dan lari terbirit-birit seperti yang diperkirakan Belanda. Penarikan atau gerakan mundur tentara RI sudah diperhitungkan sehingga setiap saat pasukan RI dapat kembali lagi.¹²⁰

¹²⁰ K.M.L Tobing, *op.cit.*, hlm.130.

Sebenarnya rencana Belanda melancarkan agresi ke RI sudah tercium oleh rakyat RI dengan fakta pendaratan-endaratan tentara Belanda yang sudah melampaui batas dari awal tahun 1946 sampai menjelang Agresi Militer Belanda I. Belanda sudah melakukan percobaan-percobaan penyerangan untuk menjajal kekuatan RI. Pada tahun 1947, serentetan pertempuran antara RI-Belanda semakin meningkat seperti pertempuran 5 hari di Palembang 1-6 Januari dan pertempuran laut di Teluk Cirebon sehingga KRI Gajah Mada tenggelam tanggal 5 Januari 1947. Penetapan TNI oleh Presiden pada tanggal 3 Juni 1947 merupakan upaya untuk mempersatukan semua kekuatan bersenjata yaitu TRI dan laskar-laskar atau badan pejuang sehingga TNI secara resmi berdiri dan ditunjuk Panglima Besar Angkatan Perang yaitu Panglima Besar Jenderal Soedirman.¹²¹

Ternyata apa yang diperhitungkan Panglima Besar Jenderal Soedirman benar mengenai persiapan militer Belanda untuk melancarkan agresi, dan ternyata kesiapsiagaan TNI tidak percuma sekalipun semua lini di garis demarkasi dapat ditembus, namun semangat perjuangan rakyat RI tidak bisa dipatahkan.¹²²

Ketika Belanda melancarkan agresinya pada tanggal 21 Juli 1947, di bawah komando Panglima Besar Jenderal Soedirman, seluruh prajurit di segala front dengan mendapat bantuan dari segenap lapisan rakyat mempertahankan RI dengan segala kekuatan yang ada terhadap penyerangan Belanda. Sebagai reaksi

¹²¹ Departemen Pendidikan Nasional, 1986, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*, Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, hlm. 133-142.

¹²² N.S.S Tarjo, 1984, *Dari Atas Tandu Pak Dirman Memimpin Perang Rakyat Semesta*, Yayasan Wiratama 1945, Yogyakarta, hlm. 11.

terhadap Agresi Belanda I, Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai pimpinan TNI segera mengeluarkan komando persiapan menghadapi serangan Belanda. Usaha persiapan pertahanan oleh TNI antara lain mengadakan bumi hangus di dekat garis-garis demarkasi dan pembuatan rintangan di jalan-jalan serta pemutusan jembatan-jembatan. Penyusunan pertahanan pada saat itu menganut sistem pertahanan rakyat total dan dengan pertahanan wilayah yang disebut *Wehr Kreise* (WK).¹²³

Seperti yang diperintahkan Panglima Besar Jenderal Soedirman dengan kata sandi melalui RRI Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 1947 berbunyi "Ibu Pertiwi Memanggil" yang diucapkan tiga kali, merupakan perintah yang menyatakan bahwa Belanda telah memulai agresinya.¹²⁴ Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947 ke semua jurusan pertahanan dan perbatasan mendapat perlawanan yang sengit dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Serangan Belanda itu membuktikan bahwa Belanda ingin kembali menjajah Indonesia.

Di Jawa, polisi negara dimiliterisasi sejak tanggal 1 Agustus 1947 atas pertimbangan bahwa untuk kepentingan pertahanan dianggap perlu memasukkan sebagian polisi dalam usaha ketentaraan dalam menghadapi Belanda, hal ini berdasarkan Penetapan PPN No. 112 Instruksi DPN No. 13 dan pengorganisasiannya di bawah pimpinan kader polisi masing-masing wilayah.¹²⁵

Di Jawa Barat, Divisi Siliwangi di bawah Komando Kolonel Abdul Haris Nasution mendapat serangan dadakan di Garut sehingga pasukan terpaksa keluar

¹²³ Sewan Susanto, 1985, *Perjuangan Tentara Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 42.

¹²⁴ Badan Musyawarah Musea, 1985, *Yogyakarta Benteng Proklamasi*, Perwakilan, Yogyakarta, hlm. 114.

¹²⁵ A.H Nasution, *op.cit.*, hlm. 378.

kota dan menyiapkan basis gerilya dan melakukan serangan ke pos-pos dan garis komunikasi lawan. Pasukan RI yang jauh lebih sederhana persenjataanya melakukan perlawanan sengit hanya pada tempat-tempat yang medannya strategis dimana dimungkinkan untuk menghadang kawal depan musuh, namun selanjutnya menghindari pertempuran dengan terlebih dahulu menghancurkan jembatan-jembatan dan jalan guna menghambat gerakan lawan.¹²⁶

Di Jawa Tengah, Divisi III Diponegoro dipindahkan dari Yogyakarta ke Magelang dengan maksud Magelang adalah kota militer, mendekati sektor-sektor pertempuran dan menjauhi pengaruh-pengaruh politik dan partai terhadap militer. Markas tentara dibagi menjadi tiga front dan ditempatkan 4 Divisi yaitu: 1) Divisi III pimpinan Jenderal Mayor Gatot Subroto yang menghadapi Brigade W Belanda yang menyerang Tegal, Brebes, dan Pekalongan serta menghadapi Brigade V yang menyerang Banyumas; 2) Divisi IV pimpinan Jenderal Mayor Susalit berhadapan dengan Brigade V KNIL menyerbu ke Purwokerto dan Cilacap; 3) Divisi V pimpinan Jenderal Mayor Jatikusumo bertugas mempertahankan Semarang; dan 4) Divisi IV di bawah pimpinan Jenderal Mayor Sutarjo bertugas mempertahankan Ambarawa dan Semarang. Di Yogyakarta, Pemerintah RI mengangkat seorang Gubernur Militer untuk mempertahankan Yogyakarta yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dengan pangkat Letnan Jenderal.¹²⁷

Perlawanan TNI terhadap tentara Belanda dibagi menjadi tiga fase yaitu fase pertahanan, fase di daerah pertahanan atau *Wehr Kreise* dan fase

¹²⁶ Tuk Setyohadi, *op.cit.*, hlm. 65.

¹²⁷ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 220.

perlawanan. Perlawanan pada awalnya dilakukan secara defensif pasif. Pasukan Belanda menyerang dengan senjata modern, sedangkan pasukan RI mengadakan perlawanan gerilya, bumi hangus, perusakan jalan, perusakan jembatan dan blokade jalan apabila daerah RI diduduki Belanda.¹²⁸ Pada tanggal 26 Juli 1947, Panglima Divisi III Jenderal Mayor Susalit mengadakan rapat staf untuk melancarkan strategi dan taktik baru dimana taktik defensif dirubah menjadi defensif dan ofensif.¹²⁹

Di Jawa Timur dan Madura, pasukan TNI menempatkan 4 Divisi yaitu dua Divisi VI di bawah pimpinan Jenderal Sungkono dan Divisi VII di bawah pimpinan Jenderal Iman Sujai dengan wakilnya Letnan Kolonel Bambang Supeno di front Surabaya. Taktik yang digunakan Divisi VI dan Divisi VII yaitu bumi hangus yang dibantu oleh Tentara Pelajar setiap terjadi pertempuran dengan pasukan Belanda.¹³⁰ Dua Divisi lain yaitu Divisi IV di front Mojokerto dan Divisi V di front Gresik. Keempat Divisi tersebut menghadapi Brigade X KNIL. Di semenanjung timur Jawa Timur, Belanda melancarkan dua penyerbuan yaitu di Pasir Putih dan penerobosan di front Porong. Dalam aksi ini pasukan Belanda harus berhadapan dengan Divisi VII TNI yang kuat dan lengkap persenjataannya. Aktivitas pasukan Belanda di Bali, dimana sering terjadi tembak-menembak dengan artileri ditujukan untuk mencegah infiltrasi pihak RI ke Bali dan untuk melindungi NIT.¹³¹

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 217.

¹²⁹ Badan Musyawarah Musea, *op.cit.*, hlm. 116.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 254.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 261.

Di Sumatera Selatan, menjelang Agresi Belanda I, Divisi VIII Garuda di bawah pimpinan Kolonel Simbolon mengatur pertahanan. Brigade Pertempuran dari Kolonel Bambang Utoyo menghadapi segala kemungkinan penerobosan musuh ke daerah pedalaman. Ketika meletus Agresi Militer Belanda berupa penyerangan Brigade U di bawah pimpinan Mollinger yang merupakan Brigade modern yang lengkap dengan kekuatan 6000 orang berhadapan dengan Divisi VIII Garuda yang hanya mempunyai 5 resimen terdiri atas 22 batalyon infanteri sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang dan kemalangan menimpa pasukan RI. Gubernur M. Isa tertawan di Muara Enim dan Menteri Agama yaitu Kyai Akhmad Azhari ditangkap oleh pasukan Belanda. Pada umumnya pasukan-pasukan RI mundur lebih ke pedalaman sebagai usaha pertahanan. Berbagai usaha dilakukan untuk merebut kembali atau mengacaukan kota-kota penting yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin rakyat seperti jurusan Lampung dan Baturaja dikacaukan oleh Kyai Ratu Panghulu, sedangkan Patuh Nawawi dan Kyai Hanafiah tetap bertahan di Martapura.¹³²

Di Sumatera Tengah, khususnya di Padang, Brigade U Belanda tidak melakukan penyerbuan besar untuk menduduki suatu perkebunan atau perusahaan penting, walaupun demikian tetap saja terjadi pertempuran di sekitar Indarung dan serangan dari udara atas Lubuk Alung. Pasukan TNI yaitu Divisi IX mengadakan pembalasan secara *raid* yang banyak pula merugikan musuh. Serangan tentara Belanda rupanya bermaksud memperluas wilayah sampai tapal batas Padang-Solok yang kemudian ditetapkan dalam garis demarkasi Van Mook. Gerakan ke Selatan mencapai Siguntur Muda dan akibat agresi ini

¹³² *Ibid.*, hlm. 282.

membawa perubahan kedudukan markas-markas kesatuan RI, namun keadaan pasukan RI di sekitar Padang masih tetap tangguh dan masih melancarkan serangan-serangan gangguan kepada musuh.¹³³

Di Sumatera Timur, pertahanan RI di Medan menjadi tanggung jawab Divisi X TNI di bawah pimpinan Kolonel Husin Yusuf merupakan lawan yang seimbang menghadapi Brigade Z yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Scholten. Komando Medan Area (KMA) berkantor di Tanjung Morawa dipimpin oleh Kolonel H. Sitompul dibantu Kolonel Hasan Kasim yang langsung memberi komando kepada seluruh angkatan bersenjata yang memegang 4 sektor yaitu: 1) Sektor Medan Utara berpusat di Binjai; 2) Sektor Medan Timur berpusat di Batangkuwis; 3) Sektor Medan Selatan berpusat di Tanjung Morawa; dan 4) Sektor Medan Barat berpusat di Delitua. Semua sektor ditempatkan pasukan yang terdiri atas organisasi perjuangan berbagai partai dan laskar rakyat yang berjumlah kurang lebih 20.000 orang.¹³⁴

Di Medan, gerilya dan pertempuran frontal tidak dilakukan karena keadaan geografis yang tidak menguntungkan, sehingga TNI melancarkan penyerbuan serentak ke kota Medan. Pada tanggal 23 Juli 1947, Wakil Presiden Moh. Hatta tiba di Sumatera Timur dan langsung mengatur sistem ketentaraan. Pada tanggal 26 Juli 1947, Barisan Harimau Liar dan Napindo (Nasional Pelopor Indonesia) yang merupakan peleburan laskar PNI dan simpatisan PNI ditimbangterimakan dari M Yakub Siregar dan Mohammad Saleh Umar kepada Kolonel Husin Yusuf dan Kolonel H Sitompul untuk diresmikan menjadi anggota TNI yang dinamakan

¹³³ *Ibid.*, hlm. 287.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 288.

Brigade A Divisi X Sumatera di bawah pimpinan Mayor Selamat Ginting dan Brigade B Divisi X Sumatera dipimpin oleh Mayor Bejo. Langkah selanjutnya dalam menghadapi agresi militer Belanda, diinstruksikan bahwa semua pasukan bergerak maju merebut Medan tetapi Medan gagal dipertahankan.¹³⁵

Di Sumatera Utara, gerakan penyerbuan Belanda di beberapa daerah didahului dengan pemboman dan rentetan tembakan senapan mesin dari udara ke markas pasukan TNI di kota-kota penting seperti, Binjai, Pangkalan Brandan, Pantoan, Pematang Siantar, Rambutan, Tebingtinggi, dan Bah Bireng Ulu. Pasukan RI sudah tidak terkendali dan terpecah-pecah sehingga kota-kota penting tersebut dapat diduduki dengan mudah.¹³⁶ Pada tanggal 25 Juli 1947, Sidang Dewan Pertahanan Daerah Aceh memutuskan untuk memberlakukan mobilisasi umum mulai pukul 10.00 pagi. Kepada seluruh rakyat diperintahkan untuk melatih diri guna persiapan perang gerilya. Panglima Divisi Tengku Chi Ditiro dan Panglima Divisi Rencong memerintahkan kepada seluruh laskar Mujahidin dan segenap anggota Masyumi serta laskar ksatria Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) beserta anggotanya untuk menyerang musuh bekerja sama dengan TNI dan polisi guna melancarkan serangan bumi hangus dan perang gerilya.¹³⁷

A.H. Nasution sebagai Panglima Divisi Siliwangi memberikan perintah siasat yang isinya:¹³⁸

- a. Tidak melakukan pertahanan linier

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 296.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 303.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 305.

¹³⁸ Tatang Sastrawiria & Hasan Wirasutrisna, 1995, *Ensiklopedi Politik*, Jakarta, hlm. 101.

- b. Memperlambat setiap majunya serbuan musuh dan pengungsian total, serta bumi hangus total
- c. Membentuk kantong-kantong di tiap-tiap distrik yang mempunyai kompleks di beberapa pegunungan, pasukan-pasukan yang berasal dari daerah feodal (daerah yang dikuasai oleh tuan tanah pribumi) menyusup ke belakang garis musuh (*wingate*) dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh Pulau Jawa menjadi medan gerilya yang luas

Di luar Jawa dan Sumatera, kabar agresi militer Belanda ditanggapi dengan rasa kesal, akibatnya kegiatan di bawah tanah meningkat seperti di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali dengan bukti semakin meningkatnya organisasi-organisasi subversif yang potensiil. Perlawanan-perlawanan sampai juga ke Ujung Pandang. Di Kalimantan Selatan, mulai terjalin lagi hubungan antara berbagai golongan seperti Hasan Basri, H Aberani, Runturambe dan kelompoknya. Di Bali, lahir pula orientasi baru terhadap perjuangan tetapi kehilangan pimpinan yaitu Letnan Kolonel Ngurah Rai sangat terasa karena menyebabkan sulitnya menyatukan semua golongan yang masing-masing mempunyai pandangan sendiri.¹³⁹

Selain mengandalkan kekuatan TNI, dalam menghadapi agresi Belanda, Pemerintah RI juga memperkuat pertahanannya dengan mengerahkan dan menggerakkan pemuda, pelajar, mahasiswa dan kelaskaran rakyat. Di celah-celah kancah perjuangan nasional, ikut serta pula di dalamnya perjuangan pemuda pelajar yang tergabung dalam Tentara Pelajar (TP), Tentara RI Pelajar (TRIP), Tentara Genie Pelajar (TGP), Corps Mahasiswa (CM), Sarekat Mahasiswa

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 306.

Indonesia, dan laskar perjuangan rakyat seperti Hisbullah, Pesindo, dan lain-lain. Semua organisasi tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Jawa dan Sumatera yang mempunyai andil yang besar dalam perjuangan.

Tugas TP dalam menghadapi agresi militer Belanda disamping menahan serdadu Belanda dan membantu TNI, juga bertugas mengadakan operasi langsung bersama TNI, mengadakan gerakan sabotase, sebagai mata-mata musuh, membuat kubu-kubu pertahanan dan rintangannya. TP turut aktif di front-front pertahanan di berbagai daerah seperti Mojokerto, Bekasi, Yogyakarta, Ambarawa, Banyumas, Karanganyar, dan lain-lain. TP, TRIP, dan TGP melaksanakan tugas pembelaan negara sesuai dengan garis kebijaksanaan pemerintah RI yaitu perang gerilya berlandaskan sistem kelaskaran rakyat.¹⁴⁰ Sebagai contoh adanya sistem gerilya TP di Yogyakarta untuk pertahanan Ibukota RI.

Berkat campur tangan PBB, kedua belah pihak telah mengumumkan gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus 1947, namun Belanda masih terus melakukan perluasan daerah pendudukannya serta melancarkan gerakan pembersihan sampai dengan tanggal 28 Agustus 1947, guna secara sepihak menentukan garis demarkasi yang dikenal dengan nama garis demarkasi Van Mook. Garis demarkasi Van Mook mengakibatkan wilayah RI semakin sempit dan hijrahnya TNI menuju daerah RI. (Lihat lampiran 11 halaman 146) Pemerintah RI menolak garis demarkasi Van Mook dan bahkan adanya garis ini dimanfaatkan oleh pasukan-pasukan RI untuk melancarkan serangan dengan

¹⁴⁰ Sewan Susanto, *op.cit.*, hlm. 122.

menggunakan taktik *Wehr Kreise* dan *Sub Wehr Kreise*.¹⁴¹ Taktik TNI tersebut memberikan pukulan berat kepada tentara Belanda sehingga dalam perundingan dijadikan tuntutan untuk mengosongkan kantong-kantong basis gerilya di daerah pendudukannya.

2. Bidang Politik

Pada hari pertama agresi militer Belanda tanggal 21 Juli 1947, Soetan Sjahrir atas perintah Pemerintah RI segera pergi ke luar negeri untuk mengupayakan bantuan dan melaksanakan upaya diplomatik mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi RI. Dikhawatirkan serangan Belanda berlanjut terus hingga ke Ibukota Yogyakarta sesuai target Belanda dengan cepat diambil keputusan untuk mengirim Soetan Sjahrir menerobos blokade Belanda menuju India.

Usaha Soetan Sjahrir berhasil berkat jasa Patnaik (pilot India) dan Lord Killearn sehingga tanggal 21 Juli 1947, Soetan Sjahrir masih sempat lolos berangkat ke luar negeri untuk mengunjungi beberapa pusat kegiatan politik di luar negeri guna menjelaskan sikap dan kedudukan RI.¹⁴² Misi Soetan Sjahrir ke India pada garis besarnya adalah sebagai berikut:¹⁴³

- a. Misi diplomatik untuk mencari simpati dunia internasional terhadap perjuangan rakyat Indonesia, khususnya dari India. Misi ini berhasil karena Pandit Nehru sendiri telah menyerukan agar perjuangan rakyat Indonesia dibantu oleh seluruh rakyat Asia. Di samping itu Soetan Sjahrir juga

¹⁴¹ Tuk Setyohadi, *op.cit.*, hlm. 72.

¹⁴² A.H Nasution, *op.cit.*, hlm. 116.

¹⁴³ Basuki Suwarno, *op.cit.*, hlm. 307.

mendapat bantuan antara lain pinjaman pesawat terbang sehingga dapat menembus blokade Belanda.

- b. Menyatakan kepada dunia internasional bahwa Belanda telah melanggar Perjanjian Linggajati dan menyerang RI tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang merupakan pelanggaran juga terhadap Hukum Kebiasaan Internasional mengenai perang.
- c. Pernyataan bahwa bangsa Indonesia tidak akan menyerah pada Belanda, perjuangan rakyat akan tetap dilanjutkan dengan perang gerilya atau cara lain.
- d. RI meminta bantuan fisik dari dunia internasional antara lain perlengkapan perang.
- e. RI menyerukan adanya upaya mediasi pihak ketiga atau PBB terutama untuk menghentikan perang di Indonesia.

A.K Gani yang ditangkap oleh Belanda di Jakarta meminta kepada Konsul Jenderal Inggris, Amerika, dan Cina untuk melakukan intervensi guna menghentikan permusuhan RI-Belanda. Presiden Soekarno pada tanggal 25 Juli 1947, menyampaikan seruan khusus kepada pemerintah AS meminta Presiden Truman dan rakyat AS supaya berusaha menghentikan peperangan di Indonesia. Usaha pemerintah RI meminta dukungan politik ke luar negeri berhasil terbukti dengan bantuan moril dari negara-negara Arab dan Asia Selatan atas usaha Soetan Sjahrir.

Para pemuda pejuang Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan kemerdekaan Indonesia yang berada di luar negeri juga berusaha mencari

dukungan politik. Di negara-negara Arab, India, Pakistan, Asia Tenggara, dan Australia mereka berhasil menggerakkan pendapat umum untuk menghukum agresi militer Belanda dan memberikan bantuan politik kepada RI berupa pemboikotan terhadap semua pesawat terbang dan kapal Belanda sehingga mengakibatkan Belanda mengalami kesulitan. Dukungan juga berasal dari Raja Farouk Mesir dan Mufti Besar Palestina, Amien Al Husaini.¹⁴⁴

Palang Merah Internasional memberikan bantuan obat-obatan sesuai syarat-syarat Palang Merah Internasional kepada Palang Merah Indonesia yang merupakan hasil usaha para pejuang RI di luar negeri dan inisiatif India, Malaya, serta Australia dalam usaha mengumpulkan obat-obatan yang dibutuhkan RI.¹⁴⁵

Pada tanggal 31 Juli 1947, Soetan Sjahrir atas nama Pemerintah RI meminta DK PBB melakukan intervensi melalui pengiriman surat yang isinya meminta supaya DK bertindak menyelesaikan sengketa RI-Belanda. Pada tanggal 1 Agustus 1947, masalah RI-Belanda dijadikan agenda dalam sidang DK meskipun diprotes dengan keras oleh Belanda. van Kleffen dari Belanda memprotes dengan argumen Negara Indonesia Timur tidak menginginkan soal RI-Belanda dibicarakan dalam sidang DK seperti yang diucapkan oleh PM NIT Najamuddin Daeng Malewa yang sebenarnya hanyalah perintah Belanda.

Pemerintah RI juga meminta *arbitrage* dan mengundang utusan-utusan DK PBB walaupun RI belum menjadi anggota PBB, tetapi sebagai negara yang menghendaki perdamaian di dunia, RI bersedia mengakui PBB sebagai instansi

¹⁴⁴ A.H Nasution, *op.cit.*, hlm. 312.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 315.

yang tertinggi bagi usaha perdamaian dunia dan hal itu juga sesuai dengan isi Perjanjian Linggajati yang ditolak oleh Belanda.¹⁴⁶

B. Reaksi Dari Luar RI

Agresi yang dilancarkan Belanda mulai tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 menimbulkan reaksi keras dari negara-negara diluar RI di antaranya AS, Australia, Inggris, Arab, negara-negara Asia Tenggara, dan negara-negara Asia Selatan. Pada umumnya negara-negara tetangga menentang aksi Belanda dan mendukung RI yang diwujudkan paling besar dalam bidang politik dan juga dukungan moril serta material berupa senjata dan obat-obatan.

Amerika dan Australia sangat aktif menawarkan diri menjadi perantara, simpati dan tawaran itu juga muncul dari Filipina dan India. Pendirian Australia, dan New Zealand berdasarkan pasal 39 Konstitusi Australia, sedangkan kecaman dari Arab, Inggris, Rusia, dan Prancis karena bertentangan dengan pasal 32 Piagam PBB. Reaksi dari luar RI merupakan wujud dari keinginan mereka menciptakan perdamaian dan menyelesaikan pertikaian antara RI-Belanda. Usaha dari negara-negara di luar RI berhasil dengan bukti adanya resolusi DK PBB tentang gencatan senjata, Komisi Tiga Negara, dan disetujuinya Perjanjian Renville sebagai usaha menyelesaikan masalah secara diplomatik.

1. Resolusi DK PBB tentang Gencatan Senjata

Pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia menyampaikan resolusi kepada sekretariat PBB supaya berusaha menegakkan perdamaian di Indonesia.

India memperlakukan perang di Indonesia berdasarkan piagam PBB pasal 35

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm 319.

butir 1, sedangkan Australia mendasarkan resolusinya pada pasal 39, dengan demikian soal Indonesia dimasukkan dalam agenda DK. Resolusi Australia pada pokoknya mendesak supaya:

- a. Kedua belah pihak segera mengadakan gencatan senjata;
- b. Permasalahan yang menyangkut kedua belah pihak berdasarkan pasal 17 Perjanjian Linggajati diserahkan pada sebuah badan arbitrase untuk diselesaikan.

Resolusi Australia didukung oleh India yang diwakili oleh Sen, Kolumbia, dan Amerika tetapi ditentang oleh Belgia dengan wakilnya Van Langenhoven dan Rusia dengan wakilnya Gromyko. AS dan Polandia mengamandir resolusi Australia yang kemudian diterima oleh DK PBB yang berbunyi: DK menyatakan sangat merisaukan permusuhan yang terjadi di Indonesia antara pasukan-pasukan Belanda dan RI, oleh karena itu DK mendesak kedua belah pihak supaya:¹⁴⁷

- a. Segera menghentikan tindakan-tindakan permusuhan
- b. Untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan cara damai melalui arbitrase atau badan penengah lainnya yang disetujui bersama
- c. Memberi laporan secara berkala kepada DK tentang perkembangan selanjutnya

Pembicaraan dalam sidang DK PBB mengenai masalah Indonesia membuktikan bahwa kecuali negara-negara kolonial, semua anggota PBB menghukum agresi militer Belanda dan berpendapat harus segera diperintahkan

¹⁴⁷ K.M.L. Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 145.

penghentian pertempuran.¹⁴⁸ Akhirnya pada tanggal 2 Agustus 1947, DK mengeluarkan resolusi penghentian pertempuran, kemudian menunggu jawaban dari pihak RI dan Belanda. Belanda di Den Haag memutuskan untuk secara formal memenuhi resolusi DK PBB. Gubernur Jenderal van Mook dikuasakan memerintahkan *cease fire* dan selanjutnya Gubernur Jenderal van Mook memberikan kawat DK PBB tersebut kepada AK Gani yang baru dibebaskan bersama dengan Tamsil dan Natsir dari tawanan Belanda, untuk selanjutnya diberikan kepada pihak RI tetapi AK Gani menolak karena ia belum mengetahui perkembangan situasi di Indonesia. Akhirnya kawat DK PBB dibawa ke Yogyakarta oleh pesawat Belanda dan dijatuhkan tepat di istana negara dan diterima oleh Amir Syarifuddin. Kawat dari DK kepada PM Amir Syarifuddin berupa resolusi untuk menghentikan tembak menembak berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Amir Syarifuddin, PM Pemerintah Indonesia di Yogyakarta

“Saya memberitahukan dengan hormat bahwa DK dalam sidangnya yang ke-173 mengambil resolusi sebagai berikut: DK yang dengan rasa cemas memperhatikan pertikaian pertikaian yang berlangsung antara pasukan-pasukan bersenjata dari Netherland dan RI, minta kepada kedua belah pihak supaya menyelesaikan dengan segera menghentikan permusuhan dan supaya menyelesaikan perselisihannya dengan jalan *arbitrage* atau jalan damai lainnya! Selanjutnya supaya DK diberitahukan tentang kemajuan dalam usaha penyelesaian itu. Hendaknya segera mengabarkan jika pemberitahuan ini diterima.”

Ttd. Faris El Khouri
Ketua DK

Pada tanggal 4 Agustus 1947, Amir Syarifuddin mengabarkan kepada DK PBB berupa ucapan terima kasih dan menerima resolusi DK. *Cease fire*

¹⁴⁸ A.H Nasution, *op.cit.*, hlm. 320.

diperintahkan oleh Presiden Soekarno di pihak Indonesia dan oleh Gubernur Jenderal van Mook di pihak Belanda. Pada tanggal 4 Agustus 1947, Presiden Soekarno mengumumkan *cease fire* mulai berlaku tanggal 4 Agustus pukul 00.00 menjelang tanggal 5 Agustus. Pada tanggal 5 Agustus, Wakil Presiden Moh. Hatta juga memerintahkan *cease fire order* di Bukittinggi.¹⁴⁹

2. Komisi Tiga Negara

Pada tanggal 7 Agustus 1947, DK melanjutkan pembahasan mengenai masalah pertikaian di Indonesia. Kolonel Hodgson dari Australia mengemukakan bahwa pertikaian harus diselesaikan dengan arbitrase dan mengharap DK PBB mengirimkan peninjau-peninjau untuk mengawasi gencatan senjata serta meminta Filipina untuk bisa turut mengambil bagian dalam pertikaian Belanda-RI, usul Australia ini ditolak oleh sidang. India meminta DK supaya mengeluarkan perintah kepada kedua belah pihak untuk menarik mundur pasukan ke kedudukan sebelum aksi militer dan mengajukan arbitrase sebagai cara penyelesaian masalah. Rusia meminta DK supaya RI dilibatkan dalam persidangan. Sedangkan Belanda diwakili oleh Van Kleffens membacakan surat protes Indonesia Timur yang berisi menentang campur tangan AS, Australia dan India dan mendukung tindakan agresi Belanda.¹⁵⁰

Dalam sidang tanggal 12 Agustus 1947, terjadi perdebatan tentang perlu tidaknya RI dilibatkan dalam persidangan. Dewan memutuskan mengadakan pungutan suara, di samping India, Rusia, dan AS, wakil-wakil Polandia, Cina, Australia, dan Kolumbia menyatakan setuju, sedangkan yang tidak setuju adalah

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 333.

¹⁵⁰ K.M.L. Tobing, *op.cit.*, hlm. 148.

Belgia, Inggris dan Prancis sehingga 7 suara berhasil menempatkan RI dalam persidangan. DK memperkenalkan delegasi RI yang terdiri dari Soetan Sjahrir, Haji Agus Salim, Sujatmoko, dan Sumitro Djoyohadikusumo. Usul Belgia dan Belanda untuk mengikutsertakan Negara Indonesia Timur dan Borneo dalam persidangan ditolak oleh Dewan.

Amerika tampil kemuka dengan kesediaanya menjadi perantara untuk menyelesaikan sengketa RI-Belanda, tetapi RI tetap berpegang pada keputusan DK PBB karena memang dari semula sudah menjadi harapan pemerintah RI agar negara-negara lain membantu RI khususnya DK PBB. Tanggal 16 Agustus 1947, Konsul Jenderal AS di Jakarta, Walter Foote dan Konsul Jenderal Australia, Chifley menawarkan menjadi perantara pihak RI tetapi ditolak oleh RI karena RI menghendaki adanya arbitrase dan menerima tawaran Australia.¹⁵¹ Selanjutnya Rusia mengusulkan untuk membentuk Komisi Pengawas Gencatan Senjata didukung oleh AS, Australia, Brazilia, Kolumbia, Polandia dan Suria, tetapi diveto oleh Prancis, karena dianggap terlalu menguntungkan RI. Dalam sidang disetujui pembentukan Komisi Konsuler (terdiri dari sejumlah konsul yang berada di Jakarta) yang bertindak sebagai pengawas dan yang harus melaporkan bagaimana pelaksanaan gencatan senjata kepada DK PBB. Komisi Konsuler terdiri dari konsul-konsul Inggris, Australia, Perancis, Cina, Belgia, dan AS.¹⁵²

Tanggal 22 Agustus 1947, dalam sidang DK dibahas tiga resolusi yang diajukan AS, Australia-Cina, dan Australia. Resolusi AS meminta supaya DK menawarkan jasa-jasa baiknya kepada Belanda dan RI. Resolusi Australia-Cina

¹⁵¹ A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 355.

¹⁵² G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 18.

meminta negara-negara yang mempunyai perwakilan di Jakarta untuk memerintahkan konsulnya mengadakan pengamatan dan melaporkan hasilnya kepada DK. Resolusi ketiga dari Australia meminta DK membentuk komisi arbitrase terdiri dari negara-negara yang ditunjuk oleh RI, seorang lagi ditunjuk oleh Belanda bersama wakil yang diangkat oleh DK. Ketiga resolusi itu ditentang oleh Rusia, Rusia mengajukan usul supaya DK membentuk dua komisi yang seluruhnya terdiri dari wakil-wakil DK. Satu komisi untuk mengawasi gencatan senjata dan satunya untuk mengadakan arbitrase.

AS mengajukan resolusinya yang meminta DK menawarkan jasa-jasa baiknya kepada pemerintah RI dan Belanda. Jika kedua belah pihak menghendaki, DK akan berusaha mencari penyelesaian terbaik dengan membentuk suatu komisi DK yang terdiri dari tiga orang. Satu dipilih oleh RI dan satu dipilih oleh Belanda, kemudian kedua negara yang dipilih menunjuk anggota ketiga. Dalam pungutan suara yang dilakukan, resolusi itu mendapat 8 suara setuju dan 3 suara blanko.¹⁵³

Tanggal 26 Agustus 1947, resolusi Belgia yang menghendaki supaya DK meminta pendapat Badan Pengadilan Internasional tentang hak dan wewenang DK untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia ditolak oleh Dewan. Resolusi Polandia sebagai resolusi terakhir yang meminta DK memperingatkan kedua belah pihak yang bersengketa supaya lebih mematuhi perintah gencatan senjata berdasarkan resolusi tanggal 1 Agustus 1947 dibahas dan diterima dengan 10 suara setuju dan 1 suara kosong yaitu Inggris, sehingga secara definitif DK

¹⁵³ K.M.L. Tobing, *op.cit.*, hlm. 164.

menutup pembahasan babak pertama tentang pertikaian Belanda-RI.¹⁵⁴ Pada tanggal 18 September, atas dasar keputusan DK tersebut maka Belanda kemudian memilih Belgia, RI memilih Australia dan kemudian kedua negara itu memilih negara ketiga yaitu AS sebagai penengah.¹⁵⁵

Pada bulan September 1947, DK menerima laporan komisi para konsul di Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut: pengumuman gencatan senjata tidak seluruhnya dipatuhi, tentara Belanda melakukan operasi kipas sejak 21 Juli sampai 4 Agustus 1947 sehingga terbentuk daerah-daerah kantong yang masih dikuasai RI, TNI bergerak mundur melakukan taktik bumi hangus, perampokan dan penculikan terutama pada harta dan orang-orang Cina.¹⁵⁶ Rusia menanggapi laporan para konsul dan menyimpulkan bahwa Belanda meremehkan resolusi DK kemudian mengajukan resolusi supaya DK mendesak kedua belah pihak menarik pasukan masing-masing ke kedudukan sebelum aksi militer. Pada tanggal 7 Oktober 1947, sidang membahas resolusi Australia yang berisi supaya DK.¹⁵⁷

- a. Menetapkan supaya sekretariat PBB sebagai lembaga yang memanggil KTN untuk bersidang
- b. Urusan organisasi KTN seluruhnya diselenggarakan oleh sekretariat PBB
- c. Mendesak KTN supaya segera melakukan tugas-tugas pengamatannya.

Dalam sidang tanggal 20 Oktober 1947, AS menyampaikan resolusi yang berisi supaya:

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 165.

¹⁵⁵ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 17.

¹⁵⁶ K.M.L. Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 8.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 10.



- a. DK meminta KTN memberi bantuan kepada kedua belah pihak untuk mencapai suatu dasar pelaksanaan gencatan senjata yang sebaik-baiknya.
- b. Meminta komisi para konsul dengan staf militernya memberi bantuan pada KTN.

Tanggal 27 Oktober 1947, Dewan membahas laporan akhir yang disusun komisi para konsul di Indonesia dengan bantuan staf militer masing-masing bahwa perintah gencatan senjata tidak dilakukan oleh Belanda. Akhirnya atas usul AS, DK memutuskan usul kompromi pada tanggal 1 Nopember, isinya: mendesak kedua pihak untuk berunding agar dicapai melalui perantaraan KTN.¹⁵⁸ Tanggal 27 Oktober 1947, bertepatan dengan penutupan pembahasan masalah Belanda-RI babak kedua di DK, anggota-anggota KTN tiba di Indonesia terdiri dari Frank Graham (AS), Richard Kirby (Australia) dan Paul van Zeeland (Belgia) ditambah dengan sekretaris Komisi Narayanan (India) bersama dua orang anggota staf sekretariat.¹⁵⁹

Pihak RI menyambut kedatangan KTN dengan harapan bercampur rasa ragu karena keputusan DK tidak memberi kepastian kepada kedua belah pihak dan KTN hanya akan memberi jasa-jasa baik dan tidak berwenang mengambil keputusan sekalipun terjadi kemacetan yang tidak dapat dikompromikan. Sebaliknya pihak Belanda menyambut KTN dengan perasaan kecewa dan terpaksa karena tidak berani menghadapi tuduhan bahwa Belanda ingin menegakkan penjajahan kembali di Indonesia. Oleh sebab itu, Belanda harus bisa meyakinkan KTN bahwa satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

mengamankan nilai-nilai ekonomis Indonesia adalah menghapuskan RI sekarang dan mengharapkan agar AS dan Inggris mendukungnya sehingga bantuan lewat Marshall Plan tidak berubah. Soal persetujuan bukan tujuan utama tetapi yang lebih utama adalah membuktikan bahwa pada hakikatnya RI tidak mempunyai kekuasaan atas rakyat Indonesia.

Belanda membesar-besarkan pergolakan politik di Indonesia guna meminta simpati dari KTN. Usaha Belanda sekalipun didukung dengan dana yang besar serta janji jabatan yang memadai bagi pendukung politiknya ternyata gagal. Di Jawa Barat, pembentukan negara separatis yaitu Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei ternyata tidak memberi andil kepada usaha Belanda. Di Indonesia Timur, pengaruh politik bapakisme mereka sudah tidak diinginkan lagi.

Tugas KTN sebagai perunding perantara antara kedua belah pihak yang saling tidak percaya sangat berat dan memerlukan ketekunan dan kesabaran. Sebagai wakil dari negaranya, KTN jelas tidak seluruhnya terbebas dari ketentuan-ketentuan pemerintahnya yang telah mengikat diri pada pihak tertentu. Dengan demikian wajar jika Paul van Zeeland (Belgia) harus menyesuaikan pendapatnya pada politik Belanda, sedangkan Richard Kirby (Australia) harus berusaha menjadi penerjemah bagi politik RI. Frank Graham sebagai pihak ketiga harus mampu mempertemukan dua pendapat yang saling bertentangan sesuai dengan pendapatnya yang sejalan dengan konsep politik AS. Menurut ketentuan yang ada, setiap usul atau tindakan yang diusulkan KTN harus lebih dulu disetujui oleh ketiga anggotanya. Hal itu berarti bahwa masing-masing

anggota telah membahas rencana itu dengan pihak yang diwakili dan berdasarkan pengalaman pada masa perundingan Linggajati.

KTN menghadapi tugas yang yang sulit tetapi wewenangnya terbatas, walaupun demikian KTN mencapai sukses berkat Frank Graham (AS) dan kesediaan RI untuk mempercayai KTN sepenuhnya. Dengan kepercayaan pula bahwa usul Frank Graham nanti akan didukung oleh pemerintah AS. Sementara itu Belanda merasa yakin akan sanggup menghancurkan RI sehingga tidak bisa menjadi anggota NIS seperti yang dijanjikannya. Oleh karena itu, yang harus dicapai dalam taraf ini oleh Frank Graham dan Kirby ialah menjaga agar RI tidak hancur tetapi tetap bisa menjadi anggota NIS seperti yang direncanakan.

3. Perjanjian Renville

Pada minggu pertama KTN berada di Indonesia, KTN berusaha mengenal dan memahami keadaan dan persoalan yang harus dihadapi. Untuk hal itu, berdasarkan keputusan DK PBB mereka menggunakan jasa-jasa komisi para konsul beserta peninjau-peninjau militer yang menyusun laporan yang disampaikan dan diterima DK tanggal 14 Oktober 1947. Tanggal 2 Nopember 1947, pemerintah Belanda berdasarkan surat keputusan kabinet Belanda membentuk delegasi untuk menghadapi KTN dan RI dalam perundingan yang akan dilaksanakan. Pihak RI sudah menyusun delegasinya pada tanggal 22 September 1947 tetapi pada bulan Oktober ditambah lagi dengan wakil-wakil dari Sumatera, Dahlan Jambek dan Nasrun (Gubernur Sumatera Barat).¹⁶⁰

Akhirnya KTN berhasil mempertemukan wakil-wakil Belanda dan RI di kapal AS "US Renville" sebuah kapal transport angkatan laut AS yang berlabuh

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm.24.

di pelabuhan Tanjung Priok. Usul-usul pertama KTN diterima oleh RI sepenuhnya tetapi hanya sebagian diterima oleh Belanda, begitu juga usul-usul yang kedua. Tawar-menawar usul terjadi sehingga sampai menjelang Natal belum tercapai persetujuan karena adanya tentangan Belanda, KTN akhirnya mengeluarkan pesan Natal tertanggal 26 Desember yang berisi usul-usul yang sangat lebih dekat dengan keinginan Belanda. Pesan Natal itu menghendaki perdamaian dengan syarat RI menyetujui garis van Mook, suatu hal yang menjadi tuntutan Belanda harus diterima sebagai batas kedudukan militer kedua belah pihak tetapi dengan catatan bahwa dalam waktu tidak kurang dari 3 bulan Belanda akan menarik tentaranya ke tempat kedudukannya sebelum aksi militer dan pemerintah RI akan difungsikan kembali setelah penarikan tentara Belanda.¹⁶¹

Belanda dalam jawabannya tertanggal 2 Januari 1948 hanya menerima sebagian dari usul KTN dengan memasukkannya dalam usul balasan yang terdiri atas 12 pasal serta menegaskan adanya garis van Mook sebagai garis demarkasi. Usul Belanda ditentang keras oleh pihak RI sehingga terjadi kemacetan perundingan. Pada tanggal 9 Januari 1948, Belanda mengajukan ultimatum supaya RI dalam 3 hari memberi jawaban tentang penerimaan atau penolakan garis van Mook sebagai garis demarkasi. Jika RI menolak maka Belanda menganggap dirinya tidak terikat lagi pada perintah gencatan senjata dan akan meneruskan aksi militernya ke Yogyakarta.¹⁶²

¹⁶¹ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 20.

¹⁶² K.M.L. Tobing, *op.cit.*, hlm. 31.

Pada tanggal 11 Januari 1948, KTN mengetahui kalau pihak RI pasti akan menolak usul 12 pasal dari Belanda dan garis demarkasi van Mook, maka untuk mengatasi jalan buntu KTN menawarkan 6 pasal tambahan. Pelaksanaan pasal-pasal ini akan menjamin bangsa Indonesia menentukan nasib sendiri misalnya melalui plebisit. Sementara itu Belanda akan merasa puas karena pokok tambahan tersebut menentukan bahwa kedaulatan Belanda atas Indonesia sesudah masa peralihan akan diserahkan kepada NIS di mana RI akan merupakan suatu negara bagian. Belanda mau menerima 6 pasal tambahan KTN kalau pihak RI juga menerima usul Belanda. KTN memperingatkan RI bahwa penolakan persetujuan gencatan senjata dengan garis demarkasi Van Mook, 12 pasal usul Belanda (yang kemudian menjadi *Renville Principles* atau Dasar-dasar Politik Renville) dan 6 pasal tambahan KTN berarti berakhirnya peranan KTN dan perselisihan RI-Belanda akan kembali ke DK PBB di mana *veto* Prancis tersedia untuk setiap usaha membentuk Komisi Arbitrase.¹⁶³

Frank Graham meyakinkan RI bahwa hanya dengan penerimaan ketiga naskah persetujuan itu pemerintah AS akan melindungi RI dari setiap tindakan kekerasan oleh Belanda dan AS akan menggunakan segala pengaruhnya agar ketentuan plebisit yang bebas akan terselenggara di bawah pengawasan PBB. Akhirnya RI menerima usul Belanda dan KTN setelah ultimatum Belanda diperpanjang 48 jam atas desakan KTN. Semula RI menolak persetujuan tersebut, tetapi mengingat persediaan amunisi yang menipis dan adanya kepastian bahwa penolakan berarti serangan baru dari pihak Belanda semakin

¹⁶³ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 21.

hebat, serta tiada jaminan bahwa DK PBB bisa menolong, menyebabkan pemimpin-pemimpin RI bersedia menerima persetujuan Renville. Jadi kalau RI menolak ia harus berperang sendiri melawan Belanda dengan korban yang pasti sangat besar. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, RI terpaksa menerima persetujuan Renville yang seluruhnya terdiri dari tiga naskah yakni: ¹⁶⁴

(Lihat lampiran 12 halaman 147)

- a. Persetujuan gencatan perang (senjata) yang antara lain berisi ketentuan diterimanya garis demarkasi Van Mook;
- b. Dasar-dasar Politik Renville (*Renville Principles*) yang pada pokoknya berisi kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan jalan damai dan dengan bantuan KTN;
- c. 6 pasal tambahan dari KTN yang antara lain berisi ketentuan bahwa kedaulatan diserahkan kepada pihak NIS.

Kedua naskah pertama ditandatangani pada tanggal 17 Januari dan naskah terakhir pada tanggal 19 Januari 1948. Dengan tercapainya persetujuan Renville pertikaian Indonesia-Belanda akan diselesaikan dengan jalan damai melalui perundingan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda menimbulkan reaksi baik dari dalam negeri RI maupun dari negara-negara di luar RI atau dunia internasional. Reaksi yang muncul dari dalam negeri RI dapat dilihat dari bidang militer dan bidang politik. Dalam bidang militer, seluruh kekuatan militer RI dan organisasi kelaskaran bergerak maju menentang agresi militer dengan jalan melakukan pertahanan

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

dengan pertempuran, blokade jalan, perusakan jalan dan jembatan maupun melalui perang gerilya. Sistem pertahanan linier TNI diganti dengan sistem pertahanan rakyat total dan dengan pertahanan wilayah yang disebut *Wehr Kreise* (WK) yang berhasil mempertahankan kedudukan wilayah RI khususnya Ibukota Yogyakarta dari serangan Belanda. Dalam bidang politik, Soetan Sjahrir dan Presiden Soekarno berusaha mencari dukungan ke luar negeri baik ke negara tetangga maupun ke negara-negara Eropa dan Afrika serta melalui forum PBB. Jalan diplomasi masih diunggulkan guna menghentikan permusuhan dengan Belanda dan penghentian pertempuran.

Reaksi yang muncul dari luar RI datang dari negara-negara tetangga dan PBB dalam bentuk dukungan politis. Berdasarkan Piagam PBB pasal 35 pasal 1, India dan Australia mengajukan resolusinya menentang Agresi Militer Belanda I didukung oleh AS, Polandia, Columbia, Inggris, dan negara-negara Asia Tenggara yang akhirnya disetujui PBB. Selanjutnya PBB mengeluarkan Resolusi tentang Gencatan Senjata dan memprakarsai dibentuknya KTN sebagai sarana perantara perundingan antara RI dan Belanda yang akhirnya menghasilkan Perjanjian Renville sebagai sarana penyelesaian persengketaan RI-Belanda.

BAB IV

**PENGARUH AGRESI MILITER BELANDA 121 JULI 1947 TERHADAP
KEDUDUKAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI RI**

A. Dalam RI

1. Kedudukan RI di Wilayah yang Diakui Secara *De Facto*

Pasca kemerdekaan, situasi di wilayah RI labil dan pada bulan Januari 1946 pendudukan Belanda atas Jakarta telah berjalan begitu jauh. Gawatnya keadaan menyebabkan dalam sidang kabinet pada tanggal 3 Januari 1946 diambil keputusan untuk memindahkan kedudukan pemerintah pusat RI dari Jakarta ke Yogyakarta sehingga Yogyakarta menjadi Ibukota RI yang merdeka selama masa revolusi. Setelah Belanda melancarkan agresinya, daerah RI menjadi semakin sempit akibat kekalahan perang dan konsekuensi RI menerima Perjanjian Renville yang mana mengharuskan RI menerima garis demarkasi Van Mook yang merugikan RI.

Pada tanggal 21 Juli 1947 ketika Belanda memulai agresi pertamanya, Pemerintah RI yang berpusat di Yogyakarta dan pemerintah daerah Yogyakarta sedang terjadi ketegangan karena penyesuaian birokrasi pemerintahan DIY dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah Pusat berjalan tidak serasi. Hal tersebut berawal ketika Pemerintah Pusat berharap dapat membina dan memelihara hubungan langsung dengan pemerintah Kota agar tugas pemerintahan pusat dapat berjalan lancar. Berdasarkan kebijakan tersebut, Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan UU No. 17 Tahun 1947 tentang

Pembentukan Haminte Kota Yogyakarta. Selanjutnya setelah UU itu diumumkan, Presiden Soekarno mengangkat Moch. Enoch menjadi walikota Yogyakarta dan jabatan bupati Kabupaten Kota dihapus. Berdasarkan UU No. 17/1947 Kota Yogyakarta terlepas sama sekali dari DIY, hal ini membuat Sultan kecewa dan mengajukan protes sehingga pemerintahan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹⁶⁵

Pemerintah Pusat mengetahui persoalan yang sedang terjadi di Yogyakarta dan selanjutnya berusaha melibatkan Sultan Hamengkubuwono IX dalam pemerintahan Kota Yogyakarta. Ketika Amir Syarifuddin membentuk kabinet pada bulan Juli 1947, Moch. Enoch diangkat menjadi Menteri Pekerjaan Umum yang menyebabkan jabatan walikota dirangkapnya. Pada tanggal 21 Juli 1947, Pemerintah Pusat di Yogyakarta memerintahkan agar kabinet bersidang pada sore harinya yang antara lain mengambil keputusan bahwa Presiden supaya pindah ke Gunung Wilis dengan disertai beberapa menteri termasuk Moch. Enoch, dengan demikian jabatan walikota menjadi lowong dan Sultan Hamengkubuwono IX dalam rapat kabinet mengusulkan pencalonan Sudarisman Purwokusumo sebagai gantinya dan pada tanggal 22 Juli Sudarisman Purwokusumo diangkat menjadi Walikota Haminte Kota Yogyakarta dengan mendapat tiga surat pengangkatan dari Presiden Soekarno, Menteri Dalam Negeri, dan Sultan Hamengkubuwono IX, dengan demikian ketegangan antara DIY dan Pemerintah Pusat sudah dapat diredakan.¹⁶⁶

¹⁶⁵ P.J. Suwarno, 1994, *Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 238.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 240.

Menanggapi agresi yang dilancarkan Belanda, pemerintah RI menerima setiap kewajiban yang bersangkutan dengan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, pemerintah juga bersedia menerima komisi internasional yang dikirim oleh Dewan Keamanan PBB untuk meninjau keadaan daerah yang telah merdeka dari kekuasaan Belanda. Pemerintah RI dan rakyat bertekad untuk melanjutkan perjuangan sampai akhir demi mencapai tujuan negara merdeka.¹⁶⁷ Pada tanggal 31 Oktober 1947, Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri RI memberikan keterangan tentang politik RI dengan sebuah pidato radio yang ditujukan kepada luar negeri. Ia menegaskan bahwa sudah hampir tiga bulan lewat sejak DK memerintahkan *cease fire* dan dalam pada itu pemerintah RI tetap pada tuntutannya bahwa syarat mutlak untuk menimbulkan keadaan yang memungkinkan tercapainya penyelesaian secepat-cepatnya ialah:

- a. Status RI sebelum Belanda melakukan aksi militernya pada tanggal 21 Juli 1947 harus diakui tanpa sesuatu syarat.
- b. Pasukan-pasukan Belanda harus diundurkan pada kedudukan sebelum Agresi Militer Belanda 21 Juli 1947.

Pada tanggal 8 Nopember 1947, Presiden Soekarno menjelaskan siasat RI yaitu, sesudah *cease fire* penyelesaian yang akan dicapai melalui jalan diplomasi dan keputusan DK harus diperhatikan demi kelangsungan perjuangan nasional.¹⁶⁸ KTN yang diprakarsai oleh PBB sebagai mediasi untuk menyelesaikan masalah RI-Belanda berhasil menghantarkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan

¹⁶⁷ A.H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 6 Perang Gerilya Semesta I*, Angkasa, Bandung, hlm. 59.

¹⁶⁸ *ibid.*, hlm. 65.

dan berhasil mencapai persetujuan Renville yang masih menyisakan pro dan kontra.

Perjanjian Renville dianggap membawa kemunduran bagi RI. Perjanjian Renville tidak bisa diterima oleh koalisi pemerintah. Setelah Amir Syarifuddin menandatangani Persetujuan Renville pada tanggal 17 Januari 1948, dia ditinggalkan oleh partner koalisinya. Sementara itu, pertikaian yang terjadi di kalangan RI sebagai akibat dari Persetujuan Renville, kegoncangan di kalangan TNI sehubungan dengan adanya rekonstruksi dan rasionalisasi yang menelan daya upaya dan kekuatan RI, memberi kesempatan bagi Belanda untuk lebih menekan RI. Perundingan yang dilakukan dengan pihak Belanda di bawah pengawasan KTN mengalami kebuntuan sehingga memicu Belanda semakin giat menekan RI.

Pasca agresi pertama terjadi kekacauan dalam bidang politik maupun pemerintahan yang dipicu juga akibat ketidaksetujuan sebagian pemimpin dan rakyat terhadap Perjanjian Renville yang berakibat jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Masyumi dan PNI menarik dukungannya terhadap kabinet Amir Syarifuddin, begitu juga grup Soetan Sjahrir dari PSI. Dalam keadaan seperti itu krisis kabinet tidak dapat dihindarkan,¹⁶⁹ walaupun pada tanggal 11 Nopember 1947 kabinet Amir Syarifuddin yang dilantik tanggal 3 Juli sebagai kabinet nasional kelima diperkuat dengan masuknya Masyumi, tetapi pada tanggal 23 Januari 1948 kabinet bubar setelah Amir Syarifuddin beserta kabinetnya mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno didorong oleh keluarnya

¹⁶⁹ G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 23.

Masyumi pada pertengahan Januari dan karena tuntutan PNI supaya diadakan perombakan kabinet.¹⁷⁰

Menghadapi krisis politik diperlukan suatu pemerintahan yang kuat untuk melaksanakan Perjanjian Renville karena situasi yang dihadapi begitu sulit baik karena hal lain dalam ketentaraan, kabinet baru perlu segera dibentuk. Pembentukan kabinet presidensiil dengan dukungan nasional merupakan satu-satunya jalan untuk membentuk kabinet yang kuat dalam waktu yang singkat. Presiden selanjutnya menunjuk Moh. Hatta menjadi pembentuk kabinet presidensiil dan berhasil terbentuk pada tanggal 29 Januari 1948 dengan dominasi Masyumi dan PNI. Kabinet ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Soekarno. Adapun susunan kabinet yang berkantor di Yogyakarta adalah sebagai berikut.¹⁷¹

- a. Perdana Menteri - Moh. Hatta
- b. Menteri Dalam Negeri - Sukiman
- c. Menteri Luar Negeri - H Agus Salim
- d. Menteri Penerangan - Moh.Natsir
- e. Menteri Keuangan - A.A. Maramis
- f. Menteri Perhubungan - Juanda
- g. Menteri Kesehatan - Leimena
- h. Menteri Perburuhan dan Sosial - Kusnan
- i. Menteri Kehakiman - Susanto Tirtoprodjo
- j. Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan - Ali Sastroamidjojo

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁷¹ Badan Musyawarah Musea, *op.cit.*, hlm. 261.

Kebudayaan

- k. Menteri Pekerjaan Umum - Laoh
- l. Menteri Kemakmuran - Syarifuddin Prawiranegara
- m. Menteri Pembagian Makanan Rakyat - I.Kasimo
- n. Menteri Agama - KH.Masjkur
- o. Menteri Negara Koordinator - Sultan Hamengkubuwono IX

Keamanan

- p. Menteri Pembangunan dan Pemuda - Supeno

Adapun program kerja kabinet Hatta adalah:¹⁷²

- b. Melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan Renville dan melanjutkan perundingan dengan Belanda melalui perantara KTN
- c. Mempercepat pembentukan NIS yang merdeka dan berdaulat
- d. Rasionalisasi tentara dan ekonomi RI
- e. Pembangunan kembali kerusakan-kerusakan yang disebabkan perang dan pendudukan Jepang

Di bidang militer, TNI masih merupakan kekuatan yang bisa diandalkan untuk mempertahankan wilayah yang tersisa pasca agresi, walaupun kondisi militer pada saat itu lemah dan kekurangan senjata. Garis demarkasi van Mook merupakan kekalahan RI secara geografis maupun militer karena dengan garis ini wilayah RI menjadi semakin sempit. Garis ini menghubungkan titik-titik paling depan dari posisi-posisi terdepan pasukan Belanda dan kadang-kadang

¹⁷² G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 24.

melampaui dan dimasukkan dalam kekuasaan Belanda serta operasi pembersihan dilancarkan terhadap pasukan RI yang masih berada di sana.¹⁷³

Akibat adanya garis demarkasi van Mook yang merugikan RI karena pasukan TNI harus meninggalkan daerah kantong yang sebenarnya hal yang sukar bagi pemerintah RI untuk mengharuskan TNI berhijrah karena daerah kantong-kantong itu bisa dipertahankan secara efektif oleh kesatuan-kesatuan gerilya. Hanya karena jaminan KTN bahwa kelak akan ada plebisit di bawah pengawasan mereka yang menyebabkan TNI mau berhijrah. Pada tanggal 26 Februari 1948, di Jawa Barat dimulailah hijrah TNI yang berjumlah 35.000 orang telah meninggalkan daerah-daerah di belakang garis demarkasi (kantong) menuju daerah RI yang bebas (yang tidak termasuk daerah yang diserahkan kepada Belanda). Di Jawa Timur, sekalipun jumlah pasukan kurang lebih 6.000 orang harus pindah ke daerah RI. Di Sumatera, hanya sedikit yang harus dihijrahkan karena pasukan TNI yang terpusat dalam daerah kantong tidaklah banyak.¹⁷⁴

Pasca Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 kondisi ekonomi lemah karena adanya blokade ekonomi dari Belanda yang semakin diperketat sehingga terjadi inflasi, walaupun demikian RI tetap berusaha membangun perekonomian negara dengan melakukan hubungan perdagangan dengan negara-negara tetangga dan menentang blokade ekonomi dengan jalan diplomasi.

Kedudukan Belanda pasca agresi sangat kuat, sebaliknya kedudukan RI lemah. Wilayah kekuasaan RI semakin sempit disertai dengan meningkatnya pergolakan politik. Hijrahnya TNI meninggalkan kantong-kantong gerilya sebagai

¹⁷³ Ulf. Sudhaussen, 1986, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, LP3ES, Jakarta, hlm. 61.

¹⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 165.

konsekuensi diterimanya Perjanjian Renville oleh RI merupakan kekalahan secara politis karena merugikan RI, dimana daerah yang diduduki Belanda adalah daerah yang kaya. Kepungan atas Ibukota RI juga semakin rapat. Perjanjian Renville dianggap membawa kemunduran bagi RI.

Pasca agresi militer Belanda, secara politis kedudukan RI tetap terjamin. RI tetap menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Reaksi terhadap agresi yang dilancarkan Belanda disebut sebagai Perang Kemerdekaan I, hal ini membuktikan kalau RI benar-benar merupakan negara yang merdeka dan diakui oleh rakyatnya terbukti dengan kesanggupan rakyat membela kemerdekaan negaranya dengan mengorbankan harta dan nyawa. Kegagalan Belanda menguasai RI membuktikan bahwa RI adalah negara yang kuat dan didukung oleh rakyatnya, tidak seperti perkiraan Belanda bahwa RI hanya buatan Jepang.

2. Kedudukan RI di Wilayah di luar Kekuasaan *De Facto*

Di luar kekuasaan *de facto* RI seperti di Indonesia bagian timur dan Kalimantan, kedudukan RI pada awalnya lemah dikarenakan Belanda mengambil kesempatan menyusun kekuatan dengan dukungan wilayah di luar kekuasaan *de facto* RI. Belanda terus bergerak maju dalam upaya membentuk negara-negara federal di wilayah-wilayah yang telah direbutnya, tetapi hanya memperoleh sedikit keberhasilan karena dukungan yang Belanda dapat menghilangkan dengan cepat. Politik memecah belah yang dijalankan Belanda untuk melemahkan kedudukan RI tidak banyak mendukung ambisi Belanda menguasai seluruh Hindia Belanda.

Pada bulan Desember 1947, Belanda membentuk negara Sumatera Timur, pada tanggal 23 Januari 1948, menghasilkan negara boneka baru yaitu negara Madura dengan wali negara terpilih R.A.A Tjakraningrat. Pada tanggal 5 Maret 1948, negara Pasundan (Jawa Barat) secara resmi berdiri dan R.A.A. Wiranatakusumah dipilih menjadi wali negara dan dilantik pada tanggal 26 April 1948.¹⁷⁵ Pada bulan September 1948 membentuk negara Sumatera Selatan, Nopember 1948 negara Jawa Timur, dan dengan keputusan Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda, lahirlah negara Sumatera Timur pada tanggal 24 Maret dengan wakilnya Tengku Mansyur. Sementara itu Gubernur Jenderal Van Mook meneruskan usahanya dan pada bulan Maret 1948, di Jakarta membentuk Pemerintah Federal Sementara. Gubernur Jenderal Van Mook juga melanjutkan usahanya sampai terdapat 15 negara federal.¹⁷⁶

Dalam rangka menciptakan kekuatan, pada konferensi federal tanggal 29 Mei 1948 di Bandung, Belanda membentuk BFO (*Bijeenkomst Federal Overleg*) atau Badan Permusyawaratan Federal yaitu lembaga permusyawaratan antara wakil-wakil negara bagian dan daerah-daerah di luar wilayah RI. Untuk selanjutnya Belanda mengikat negara-negara bonekanya dalam suatu persetujuan yang disebut dengan BIO (*Besluit Bewind Indonesie in Overgangstijd*) pada tanggal 14 Desember 1948, yaitu tatanan hukum baru di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Tatapraja dalam Masa Peralihan (sebuah undang-undang yang berisi jaminan akan kedaulatan Belanda di Indonesia).¹⁷⁷

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 171.

¹⁷⁶ Mc. Ricklefs, 2001, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, PT Ikcar Mandiri Abadi, Jakarta, hlm. 455.

¹⁷⁷ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hlm. 420

Dukungan di luar kekuasaan *de facto* RI juga terlihat di Denpasar, dimana ide-ide nasionalis tetap kuat, bahkan lagu Indonesia Raya dipakai sebagai lagu kebangsaan NIT dan seorang Bugis yang pro-RI nyaris terpilih sebagai presidennya. Di Kalimantan usaha untuk mendirikan negara boneka Belanda mustahil berhasil karena kaum muslim di pantai selatan dan timur sangat pro-RI. Sebuah negara yang terpisah untuk Kalimantan Barat dibentuk di bawah Sultan Abdul Hamid II dari Pontianak. Perkembangan-perkembangan tersebut justru memperdalam kecurigaan pihak RI terhadap Belanda.

Sebuah misi parlemen NIT di bawah pimpinan Arnold Mononutu mengunjungi Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 1948, di samping bertemu dengan Presiden Soekarno juga menemui Badan Pekerja KNIP. Kesan yang mereka peroleh selama berkunjung ke Yogyakarta besar sekali pengaruhnya terhadap pandangan mereka mengenai negara kesatuan.¹⁷⁸

Belanda bermaksud membentuk NIS yang berbentuk federal dengan atau tanpa persetujuan RI, tetapi di dalam negara-negara federal tersebut terdapat perasaan pro-RI yang begitu besar di kalangan elit dan dukungan kecil terhadap federalisme di kalangan rakyat, oleh karena itu, pihak Belanda melangkah lebih jauh dengan pertimbangan penyelesaian terakhir secara militer.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa usaha Belanda untuk membina kekuatan diluar kekuasaan RI sebagai kekuatan pendukung tidak berjalan lancar dan dukungan yang diharapkan tidak membuahkan hasil. Perwakilan yang diajukan Belanda dari negara-negara bonekanya untuk mendukung Belanda di forum internasional ditolak PBB. Disini jelas bahwa kedudukan RI diluar kekuasaan *de*

¹⁷⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.* hlr. 174.

facto juga kuat dan RI dipandang sebagai negara yang modern dan dapat dicontoh oleh negara-negara boneka Belanda. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kharisma Presiden Soekarno dengan anti imperialisme dan neokolonialismenya.

B. Luar RI

1. Negara-negara Asia dan Eropa

Aksi militer Belanda tanggal 21 Juli 1947 tidak berlalu begitu saja tanpa mendapat perhatian dunia internasional terutama negara-negara besar yang mengikuti perkembangan politik di wilayah Indonesia. Negara-negara yang bersimpati terhadap sengketa RI-Belanda diantaranya: Amerika Serikat, Inggris, Australia, India, dan Liga Arab. Mereka memberikan simpati terhadap RI yang telah memproklamkan kemerdekaannya dan berusaha mempertahankan kemerdekaan melalui jalan diplomasi maupun militer yang merupakan reaksi dari agresi yang dilancarkan Belanda dengan tujuan menguasai kembali Hindia Belanda.

Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak memberikan dukungan politik, terhadap RI. Sebelum melakukan aksi militer, Belanda telah menghubungi Pemerintah AS dan Pemerintah Inggris sehingga kedua negara itu cepat memberikan reaksi menganjurkan agar diupayakan penyelesaian dengan jalan damai, tanpa menggunakan kekerasan, tetapi rupanya Belanda sudah terburu melakukan aksi yang disebutnya Aksi Kepolisian.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Basuki Suwarno, *op.cit.*, hlm. 311.

Bagi Pemerintah AS, tahun 1947 adalah tahun dimana Pemerintah AS mempertimbangkan dan kemudian memberikan kemerdekaan bagi Filipina. Pada tahun ini juga, pandangan rakyat AS berubah khususnya terhadap rakyat-rakyat Asia. AS menganjurkan agar mereka diberikan kemerdekaan. Kalau sebelum itu, pandangan AS sering membenarkan tindakan Belanda untuk mengembalikan kejayaan Hindia Belanda, maka setelah tahun 1947 pandangan demikian berubah sama sekali. Inilah yang menyebabkan sejak bulan Juni 1947, AS telah memperingatkan Belanda bahwa mereka sangat menyesalkan diadakannya aksi militer di wilayah RI karena Pemerintah AS selalu mendorong agar penyelesaian dilakukan dengan perundingan dan menasehatkan bahwa pembentukan Uni Indonesia Belanda haruslah benar-benar atas dasar sukarela dan tanpa paksaan.

180

Presiden Roosevelt adalah salah satu tokoh yang menandatangani *Atlantic Charter*, itu berarti AS adalah penganjur agar bagi rakyat yang belum merdeka, mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh kemerdekaan dan menentukan bentuk pemerintahan sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu setelah Jepang menyerah, AS menentukan garis politik yang jelas dalam menghadapi rakyat terjajah. Mengetahui sikap Belanda yang sangat berambisi menguasai kembali Hindia Belanda, AS bersikap tegas tidak akan membantu Belanda dalam upaya menguasai Indonesia apalagi melalui tindakan militer.¹⁸¹

Melihat sikap AS tersebut, Belanda menyampaikan niatnya melancarkan aksi militer terhadap RI kepada AS sehari sebelum aksi dimulai, sehingga tiada

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 316.

¹⁸¹ Basuki Suwarno, 1999, *Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950, Jilid I*, PAN Percetakan Upakara, Jakarta, hlm.341.

waktu cukup bagi AS melakukan tindakan efektif mencegah aksi tersebut.¹⁸² Ketika Belanda melancarkan agresinya, AS menolak membantu Belanda berupa penolakan AS terhadap keinginan Belanda membeli sisa *supply* persenjataan pasca PD II yang tertinggal di Jayapura yang cukup untuk mempersenjatai ± 30.000 tentara. AS juga tidak menilai kemerdekaan RI sebagai kreasi Jepang, sikap AS ini sangat menguntungkan RI dan RI menang secara moril atas Belanda karena AS sebagai negara adikuasa mendukung RI dan memperkuat kedudukan RI di luar negeri.¹⁸³

Inggris yang sejak tahun 1945 mewakili kekuatan Sekutu di Asia Tenggara lebih intensif dalam melakukan campur tangan agar pertikaian antara Belanda-RI dapat diselesaikan dengan jalan damai. Inggris telah melibatkan empat orang diplomatnya yang secara aktif berusaha memberikan jasa baiknya guna sedapat mungkin menghindari kekerasan antara kedua pihak, karena Belanda menyatakan perlunya ada aksi kepolisian, Inggris telah mengusulkan diperbantukannya Komisaris Polisi dari negara netral ke RI. Usul Inggris tersebut tentu saja tidak mendapat tanggapan positif dari pihak Belanda. Inggris telah berusaha keras untuk mencegah aksi militer setelah diberi tahu Belanda pada tanggal 20 Juli 1947, Assistant Under Secretary Michael Wright segera mengeluarkan pesan kepada Kedutaan Besar Belanda di London untuk disampaikan ke Den Haag, yang berisi penyesalan Pemerintah Inggris terhadap rencana aksi militer Belanda.¹⁸⁴

¹⁸² Basuki Suwarno, *op.cit.*, hlm. 316.

¹⁸³ Basuki Suwarno, *op.cit.*, hlm. 61.

¹⁸⁴ Basuki Suwarno, *op.cit.*, hlm. 317.

Pemerintah Inggris berkali-kali menawarkan jasa baiknya, dengan tujuan agar aksi militer dibatalkan, tetapi Pemerintah Inggris dalam bertindak selalu tidak melupakan adanya ikatan aliansi/Sekutu dalam PD II, oleh karena itu Inggris selalu berkonsultasi lebih dulu dengan AS. Inggris juga menghormati *Atlantic Charter* yang ditandatangani antara lain oleh PM Churchill, yang isinya mendukung kehendak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Melalui Jenderal Christison, Inggris tidak menentang Pemerintah RI, ini berarti pengakuan *de facto* RI.¹⁸⁵ Sikap Inggris mendukung RI sangat menguntungkan perjuangan diplomasi RI, dimana Inggris selalu memberikan masukan dan bantuan kepada RI.

Australia kurang senang melihat kedatangan Belanda ke wilayah Indonesia untuk menegakkan Hindia Belanda, hal ini terbukti banyaknya pemboikotan yang dilakukan oleh para buruh pelabuhan terhadap kapal-kapal Belanda yang menuju ke Indonesia dengan membawa muatan tentara, atau perlengkapan perang lainnya.¹⁸⁶

India merupakan negara yang menjalin hubungan persahabatan dengan RI akibat usaha “diplomasi beras” Soetan Sjahrir. Reaksi India terhadap agresi yang dilancarkan Belanda berupa pengecaman India terhadap agresi dan segera melakukan berbagai tindakan mendukung RI melalui usahanya mengajukan resolusi kepada DK PBB agar masalah RI-Belanda menjadi agenda rapat DK.¹⁸⁷

Andil warga negara RI yang berada di luar negeri sangat besar, mereka itulah yang mempropagandakan kemerdekaan RI di luar negeri. Di Kairo-Mesir,

¹⁸⁵ Basuki Suwarno, *op.cit.*, hlm. 42.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

¹⁸⁷ Basuki Suwarno, *op.cit.*, hlm. 300.

mereka ikut secara gigih mempropagandakan kemerdekaan RI. Langkah-langkah yang mereka ambil diantaranya:

- a. Memperbanyak artikel tentang Indonesia yang sekiranya menguntungkan perjuangan RI
- b. Menghubungi para prominem maupun tokoh internasional untuk memberikan penjelasan tentang situasi di Indonesia
- c. Kepada Liga Arab, para mahasiswa di Mesir menyerukan agar Liga Arab memberikan bantuan kepada RI
- d. Mereka menjalin hubungan dengan partai politik setempat dan meminta perhatian dan bantuan kepada RI

Pengaruh kegiatan mahasiswa tersebut sangat positif terhadap perjuangan RI, banyak negara-negara Asia dan Eropa menjadi paham mengenai perang kemerdekaan di Indonesia. Mesir menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan bagi RI melalui pernyataan Raja Farouk, demikian juga Liga Arab yang mengirimkan utusannya ke Yogyakarta dan memberikan dukungan moril serta banyak negara-negara anggota Liga Arab yang memberi dukungan kepada RI. Hal tersebut memperkuat kedudukan RI di wilayah Asia yang juga berkat solidaritas dari warga muslim Asia dan perjuangan mahasiswa di Mesir.¹⁸⁸

Agresi Belanda telah membawa kemarahan dari negara-negara lain yang mempunyai rasa solidaritas keislaman yaitu Liga Arab yang pada bulan Februari 1948 memprotes keras agresi dan mengakui kedaulatan RI. Rupanya agresi telah mengakibatkan permusuhan negara-negara Arab terhadap Belanda dan memberi dukungan terhadap perjuangan RI, dengan demikian jelaslah aksi militer Belanda

¹⁸⁸ Basuki Suwarno, *op.cit.*, hlm. 320.

telah memperkuat posisi RI secara politis di kawasan Timur Tengah berupa pengakuan RI secara *de facto*.

Demikianlah Agresi Militer Belanda I yang tidak terlalu efektif, karena adanya tekanan dari negara-negara besar seperti AS, Inggris, Australia, dan negara-negara Asia yang tidak hanya memberikan dukungan, tetapi bahkan menyangkan terjadinya aksi tersebut serta menyerukan agar perundingan merupakan jalan penyelesaian masalah.¹⁸⁹

2. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Tujuan utama PBB pada hakikatnya adalah untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang. Piagam PBB memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus diikuti oleh negara, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB apabila terlibat dalam suatu perselisihan. Dewan Keamanan dianggap sebagai wasit, mengingat tanggung jawab utamanya dibidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Itulah sebabnya ketika masalah RI-Belanda dihadapkan kepada PBB, pilihan pertama dan yang paling sederhana disarankan kepada para pesengketa adalah agar mereka menyelesaikannya dengan salah satu cara secara damai seperti tertera dalam pasal 33 Aayat 1 Piagam PBB yang berbunyi:¹⁹⁰

- a. Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 319.

¹⁹⁰ M. Hutauruk, 1989, *Kewallah PBB*, Erlangga, Jakarta, hlm. 8.

menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

- b. Bila perlu DK meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara yang serupa itu.

Dalam pasal 40 Piagam PBB, DK diberikan wewenang untuk menyerukan pihak-pihak yang bersengketa mengambil tindakan atau langkah-langkah sementara. Menurut pasal 41 dan pasal 42, DK dapat memerintahkan di semua arah dalam rangka tindakan bersama (*collective measures*). Dalam kenyataannya, DK tidak menanggapi secara serius terhadap wewenang dan petunjuk-petunjuk khusus Piagam PBB dan lebih banyak mengambil sikap yang luwes dalam menentukan tindakan yaitu dengan mengikuti sifat tertentu situasi atau pertikaian sesuai pasal 39 Piagam PBB. Keputusan DK dituntun oleh perkiraan yang dapat diterima baik oleh pihak yang bersengketa maupun oleh ketentuan-ketentuan khusus dari Piagam PBB.¹⁹¹

Dalam kasus agresi di Indonesia, masalah agresi dibicarakan dalam sidang DK PBB. DK bersedia untuk tidak menyangkutkan secara ketat kepada pasal-pasal Piagam PBB agar dapat menghasilkan persetujuan yang dikehendaki, khususnya mengenai usul yang menjanjikan guna mengakhiri pertempuran. Dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan, DK juga dibatasi oleh pasal 24 Piagam PBB mengenai fungsi dan kekuasaan DK.¹⁹²

Dalam menangani pertikaian RI-Belanda, DK berhasil mengatasi tidak saja untuk mencapai gencatan senjata, tetapi juga memainkan peranan sebagai

¹⁹¹ Syahmin. A.K, 1988, *Masalah Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Armico, Bandung, hlm. 105.

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 106.

penengah yang sangat penting dalam membawa penyelesaian yang tuntas atas dasar pengakuan terhadap kemerdekaan RI.¹⁹³ Berakhirnya Agresi Militer Belanda I berkat intervensi PBB dengan mengeluarkan resolusi gencatan senjata tanggal 1 Agustus 1947 sehingga pada tanggal 4 Agustus tengah malam kedua belah pihak mengumumkan gencatan senjata. Ikut campur tangan PBB dalam masalah Indonesia berarti suatu kekalahan politik bagi Belanda, apalagi pada tanggal 25 Agustus 1947, DK PBB menerima sebuah resolusi dari AS yang mengusulkan dibentuk KTN guna menangani masalah RI dan Belanda. RI juga disertakan dalam persidangan di DK PBB sebagai pihak yang bersengketa, ini membuktikan bahwa RI diakui sebagai sebuah negara dan masalah yang ada adalah masalah antara RI dan Belanda sebagai sebuah negara yang sah bukan masalah dalam negeri Belanda di Seberang Lautan. Dengan demikian, secara tidak langsung PBB juga telah memberi pengakuan secara *de facto* atas negara RI.

Perjanjian Renville yang diterima secara terpaksa oleh RI berarti pula kesempatan yang lebih baik untuk membina kembali kekuatan militernya dan timbulnya simpati dunia yang makin lama makin besar karena RI selalu bersedia menerima petunjuk-petunjuk KTN yang mewakili PBB serta menunjukkan sikapnya yang cinta damai. Selain itu, penerimaan Perjanjian Renville oleh RI memberikan simpati yang besar dari AS kepada RI dimana AS akan melindungi RI dari setiap tindakan kekerasan oleh Belanda dan akan menggunakan pengaruhnya untuk membantu RI.

¹⁹³ Sumaryo Suryokusumo, 1987, *Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 12.



Walaupun di dalam negeri RI lemah dalam bidang militer dan ekonomi, tetapi dalam bidang politik, dengan adanya simpati dari negara-negara luar RI dan forum internasional yaitu PBB, merupakan jaminan akan adanya jalan keluar penyelesaian masalah dan terjaminnya kedudukan RI di dunia internasional.

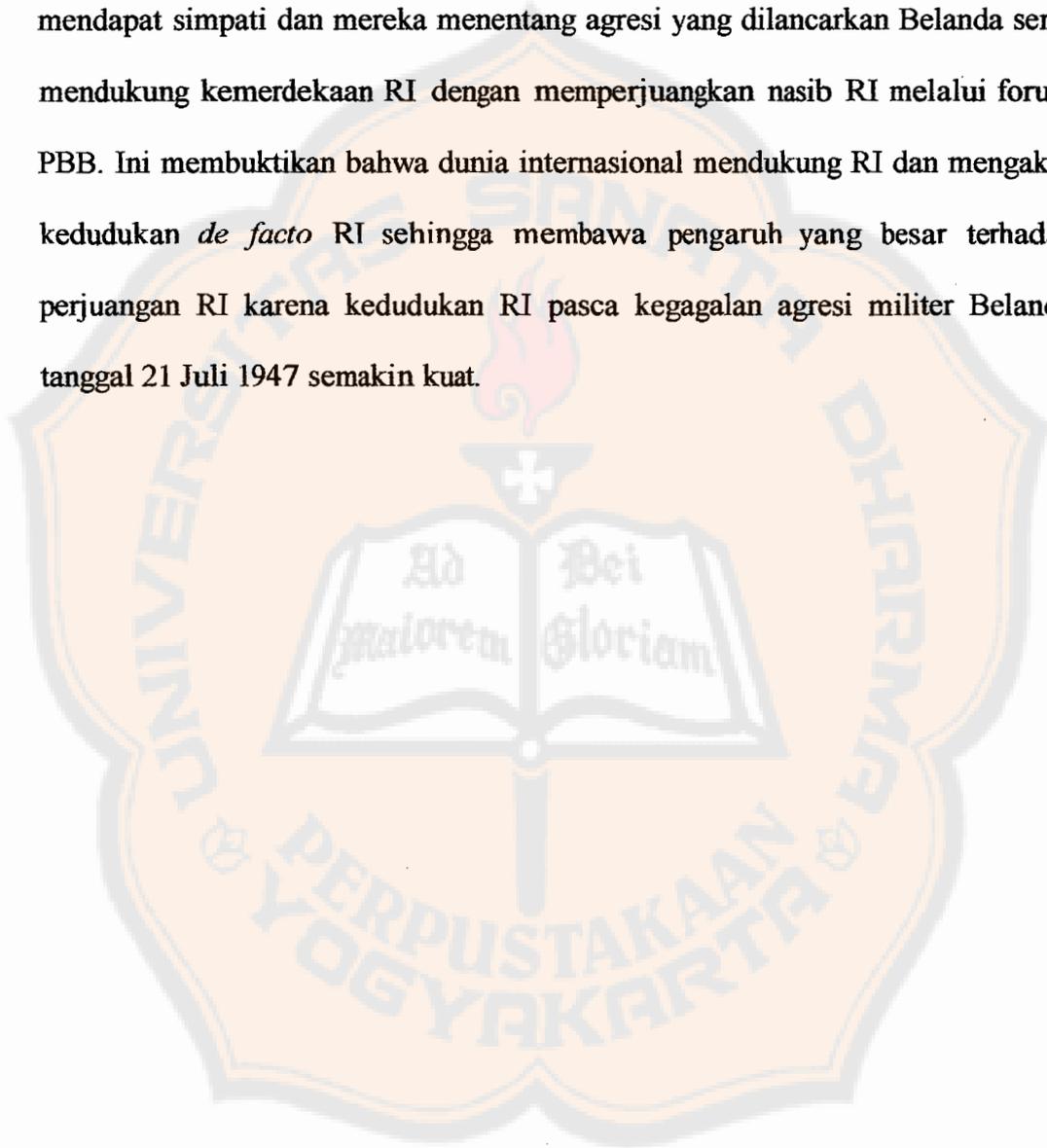
Perjuangan para diplomat pada masa revolusi fisik ini tidaklah mudah. Mereka harus dapat bekerja dalam situasi yang serba sulit, ruang gerak yang terbatas, keuangan yang minim, lingkungan korp diplomatik yang belum tentu membantu dan banyak kendala lain. Keunggulan Belanda adalah pada masa itu negara Belanda lebih dikenal di forum internasional ketimbang RI yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam situasi demikianlah para diplomat pejuang RI harus berkiprah dengan tugas utama mengusahakan agar kemerdekaan RI segera mendapat pengakuan dunia internasional. Perjuangan diplomasi RI untuk mendapat pengakuan pasca agresi dilakukan secara gigih juga oleh pemerintah di Yogyakarta.¹⁹⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Agresi Militer Belanda I mengalami kegagalan dalam usahanya menghancurkan RI secara total. Kedudukan RI baik di wilayah yang diakui secara *de facto* maupun diluar kekuasaan *de facto* semakin kuat dan mendapat dukungan yang luas. Memaksakan kehendak untuk mengembalikan kolonialisme, serta tindakan perampasan hak oleh bangsa satu terhadap bangsa lain adalah bertentangan dengan Piagam PBB. Menurut *Atlantic Charter*, bangsa Indonesia berhak untuk mendapatkan kemerdekaan dan menentukan bentuk pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, Agresi Militer Belanda I mendapat tentangan dari negara-negara

¹⁹⁴ Basuki Suwarno, op.cit., hlm. 341.

pendukung Piagam PBB dan *Atlantic Charter* sehingga mereka menentang agresi dan mendukung RI.

Di luar negeri, baik di negara tetangga maupun di forum internasional, RI mendapat simpati dan mereka menentang agresi yang dilancarkan Belanda serta mendukung kemerdekaan RI dengan memperjuangkan nasib RI melalui forum PBB. Ini membuktikan bahwa dunia internasional mendukung RI dan mengakui kedudukan *de facto* RI sehingga membawa pengaruh yang besar terhadap perjuangan RI karena kedudukan RI pasca kegagalan agresi militer Belanda tanggal 21 Juli 1947 semakin kuat.



BAB V

KESIMPULAN

Latar belakang Belanda ingin menguasai Indonesia kembali pasca PD II agar Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sebelum tahun 1942 dapat dipulihkan kembali sehingga Pemerintah Belanda dapat meneruskan kembali pemerintah jajahan di Hindia Belanda. Belanda hanya bersedia mengadakan sekedar perubahan politik sesuai dengan pidato Ratu Belanda, Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942. Melalui NICA yang berkedudukan di Brisbane (Australia), Belanda siap menerima penyerahan kedaulatan Indonesia pasca pendudukan tentara sekutu. Sebelum Belanda berhasil melaksanakan cita-citanya, ternyata Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menuntut Belanda melakukan suatu tindakan guna merebut RI dan berhadapan dengan RI.

Belanda dan RI mengklaim wilayah yang sama yaitu Hindia Belanda menurut tata hukum pemerintahan masing-masing. Belanda mendasarkan penguasaan terhadap Hindia Belanda karena menurut hukum internasional wilayah Indonesia pasca PD II diserahkan kembali kepada penguasa sebelumnya yaitu Belanda, sedangkan RI mengklaim wilayah ini karena telah memproklamasikan kemerdekaan dan memenuhi syarat syah sebagai negara merdeka.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, peneliti mengajukan tiga rumusan masalah yaitu: 1) faktor apa saja yang mendorong Belanda mengambil tindakan militer terhadap RI, 2) reaksi dari dalam RI maupun luar RI akibat agresi militer

Belanda, dan 3) pengaruh agresi militer Belanda yang pertama terhadap kedudukan RI baik di dalam negeri maupun di luar negeri RI.

Setelah melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa, hipotesis pertama yaitu kalau pelaksanaan Perjanjian Linggajati gagal maka Belanda mengambil tindakan militer yang pertama terhadap RI terbukti karena Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947. Agresi Militer Belanda I meletus karena didukung oleh kedudukan Partai Katolik yang kuat dalam kabinet Scermerhorn-Drees yang merupakan suatu rintangan bagi keberhasilan jalan diplomasi yang dilakukan antara pihak RI dan Belanda guna menyelesaikan sengketa. Keberhasilan Komisi Jenderal dan Delegasi Indonesia mencetuskan Perjanjian Linggajati ternyata tidak bisa dilaksanakan. Usul pemebentukan *gendarmerie* oleh Belanda sangat memberatkan kedudukan RI, sehingga penolakan RI mengenai usul *gendarmerie* merupakan peluang yang bagus bagi Belanda untuk melancarkan aksi militer yang bertujuan menghancurkan RI dengan menghilangkan *de facto* RI, mengadakan blokade ekonomi, dan menghancurkan TNI. Belanda mengalami kegagalan dan bersedia menerima Resolusi Gencatan Senjata dari PBB. Kedua belah pihak mengumumkan *cease fire* pada tanggal 4 Agustus 1947 yang berarti penghentian pertempuran.

Hipotesis kedua, kalau RI dan negara di luar RI mendukung Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 maka mereka akan bereaksi menentang Agresi militer Belanda I terbukti karena negara RI maupun luar RI menentang agresi militer Belanda. Agresi Militer Belanda I menimbulkan reaksi baik dalam negeri RI maupun dari luar negeri. Reaksi yang muncul dari dalam RI dalam bidang militer

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syukur,
2005, *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 8*, Ichtiar Baru Van Hoeve,
Jakarta.

_____,
2005, *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 9*, Ichtiar Baru Van Hoeve,
Jakarta.

Abdurrahman Suryamihardjo,
1997, *Dinamika Revolusi Indonesia dalam Sejarah Indonesia*, Pusat
Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas
Indonesia.

Aboe Bakar Loebis,
1992, *Kilas Balik Revolusi*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Badan Musyawarah Musea,
1985, *Yogyakarta Benteng Proklamasi*, Perwakilan, Yogyakarta.

Basuki Suwarno,
1999, *Hubungan Indonesia Belanda Periode 1945-1950 Jilid I*, PAN
Percetakan Upakara, Jakarta.

_____,
1999, *Hubungan Indonesia Belanda Periode 1945-1950 Jilid II*, PT
Setio Acness, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional,
1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

_____,
1986, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*, Citra Lamtoro Gung Persada,
Jakarta.

Gottschalk, Louis,
1975, *Mengerti Sejarah*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Graff, Ant. P,
1997, *Napak Tilas Tentara Belanda dan TNI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Hutauruk, M,
1989, *Kenallah PBB*, Erlangga, Jakarta.

- Ide Anak Agung Gde Agung,
1983, *Renviile*, Sinar Harapan, Jakarta.
-
- 1985, *Dari Negara Indonesia Timur Ke RI Serikat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
-
- 1995, *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*, Yayasan Pustaka Nusantara-Sebelas Maret University Press.
- Jahja Muhaimin, dkk,
1985, *Kamus Istilah Politik*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Kahin, George Mc Turnan
1995, *Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Kartini Kartono,
1980, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, ALUMNI, Bandung.
- Kuntowijoyo,
1999, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Moedjanto, G,
1988, *Indonesia Abad ke-20 jilid 1*, Kanisius, Yogyakarta.
-
- 1988, *Indonesia Abad ke-20 jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mohammad Nazir,
1992, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Ridhwan dan Sophian Marthabaya,
1987, *Peristiwa-peristiwa di Sekitar Proklamasi 17-8-1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution, A.H,
1968, *Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, Seruling Masa, Jakarta.
-
- 1978, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 4 Periode Linggarjati*, Angkasa, Bandung.

- _____,
1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda I*, Angkasa, Bandung.
- _____,
1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 6 Perang Gerilya Semester I*, Angkasa, Bandung.
- Nugroho Notosusanto,
1985, *Pejuang Dan Prajurit*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Purnawirawan Tjondronegoro,
1982, *Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku I*, Nugraha, Jakarta.
- Ramadhan K. H,
1988, *AE Kawilarang Untuk Sang Merah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ricklefs, M.C,
2001, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, PT Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta.
- Samawi,
1970, *25 Tahun Indonesia Merdeka*, Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.
- Sarjono, V dan GL. Marsadji,
1982, *Pemerintah Darurat RI Penyelamat Negara dan Bangsa Indonesia*, Tintamas, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo,
1970, *Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sejarah Indonesia*, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Seskoed,
1990, *Serangan Umum 1 Maret 1949*, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta.
- Sewan Susanto,
1985, *Perjuangan Tentara Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (eds),
1987, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

- Smit, C,
1986, *Dekolonisasi Indonesia*, Pustaka Azet, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo,
1987, *Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta.
- Sundhaussen, Ulf,
1986, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, LP3ES, Jakarta.
- Suraputra, D. Sidik,
1991, *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional*, Universitas Indonesia Press.
- Susanto Tirtoprojo,
1963, *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*, PT Pembangunan Jakarta.
- Suwarno, P.J,
1994, *Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Kanisius, Yogyakarta.
- Syahmin A.K,
1988, *Masalah Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Armico, Bandung.
- Tarjo, N.S.S,
1984, *Dari Atas Tandu Pak Dirman Memimpin Perang Rakyat Semesta*, Yayasan Wiratama, Yogyakarta.
- Tatang Sastrawira & Hasan Wirasutrisna,
1995, *Ensiklopedi Politik*, Erlangga, Jakarta.
- Tim Penyusun,
1989, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar Jilid 7*, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta.
- Tim Penyusun,
2005, *Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Sejarah*, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Tobing, K.M.L,
1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, Gunung Agung, Jakarta.

1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renviile*, Gunung Agung, Jakarta.

Tuk Setyohadi,
2002, *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*, CV. Rajawali Corporations, Jakarta.



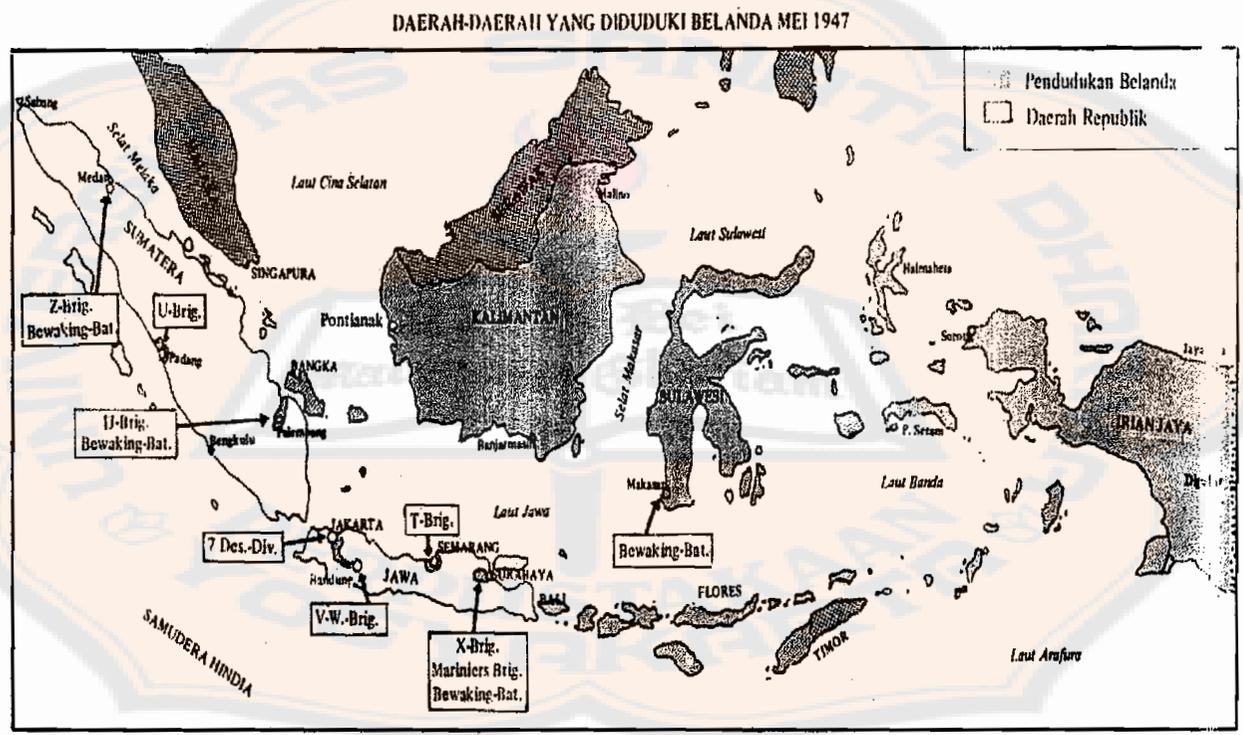
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

Lampiran 1

Peta Daerah yang Diduduki Belanda Bulan Mei 1947

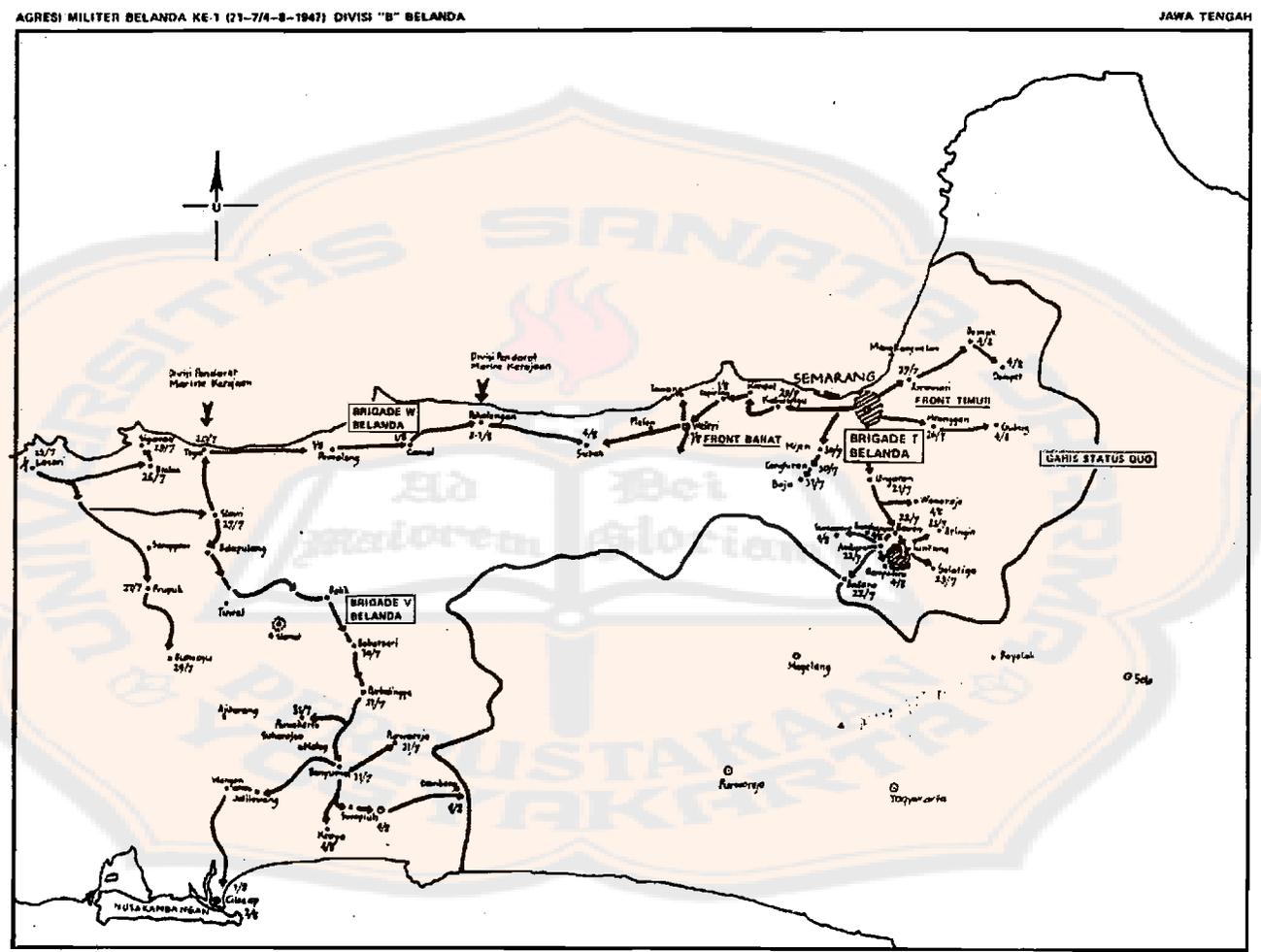


Sumber:

K.M.L. Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggariati*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 80.

Lampiran 3

Peta Agresi Militer Belanda 21 Juli 1947 di Jawa Tengah

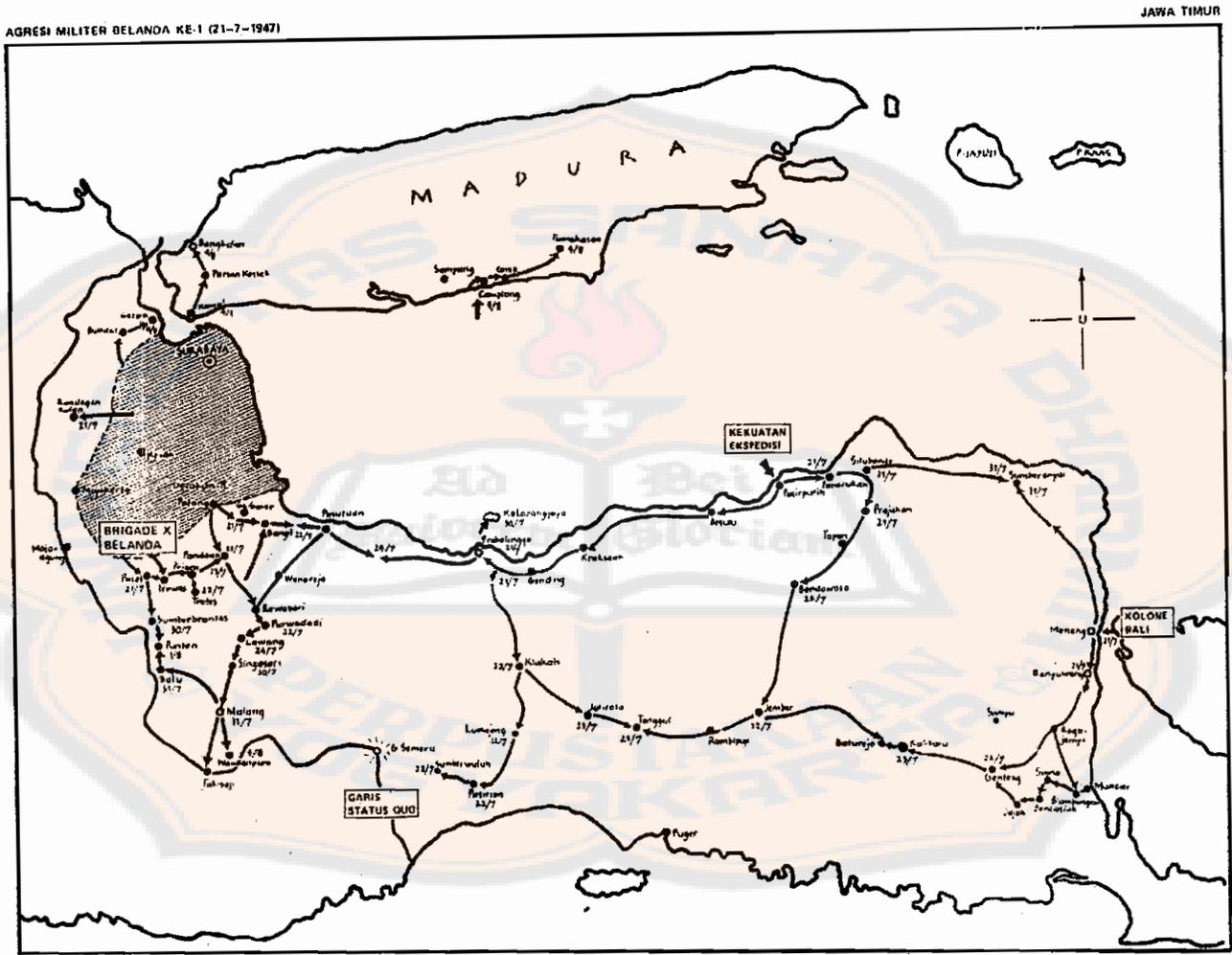


Sumber:

A.H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda I*, Angkasa, Bandung, hlm. 213.

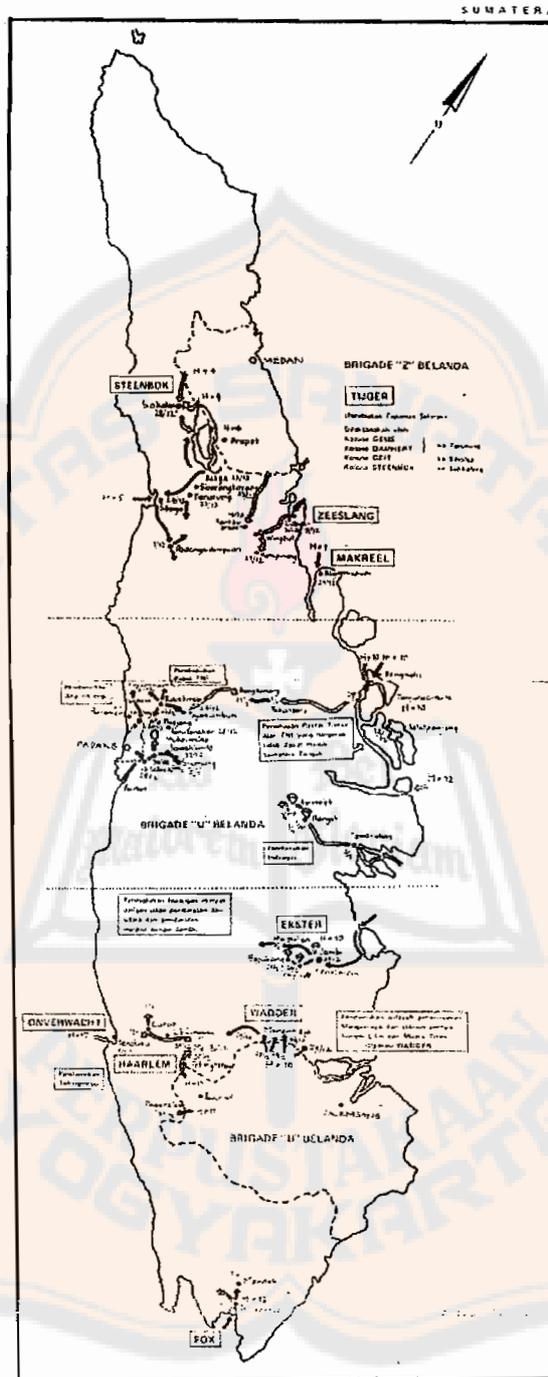
Lampiran 4

Peta Agresi Militer Belanda 21 Juli 1947 di Jawa Timur



Sumber:
 A.H. Nasution, 1979, *Sektor Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda I*, Angkasa, Bandung, hlm. 253.

Lampiran 5
Peta
Kedudukan
Brigade
Belanda di
Sumatera

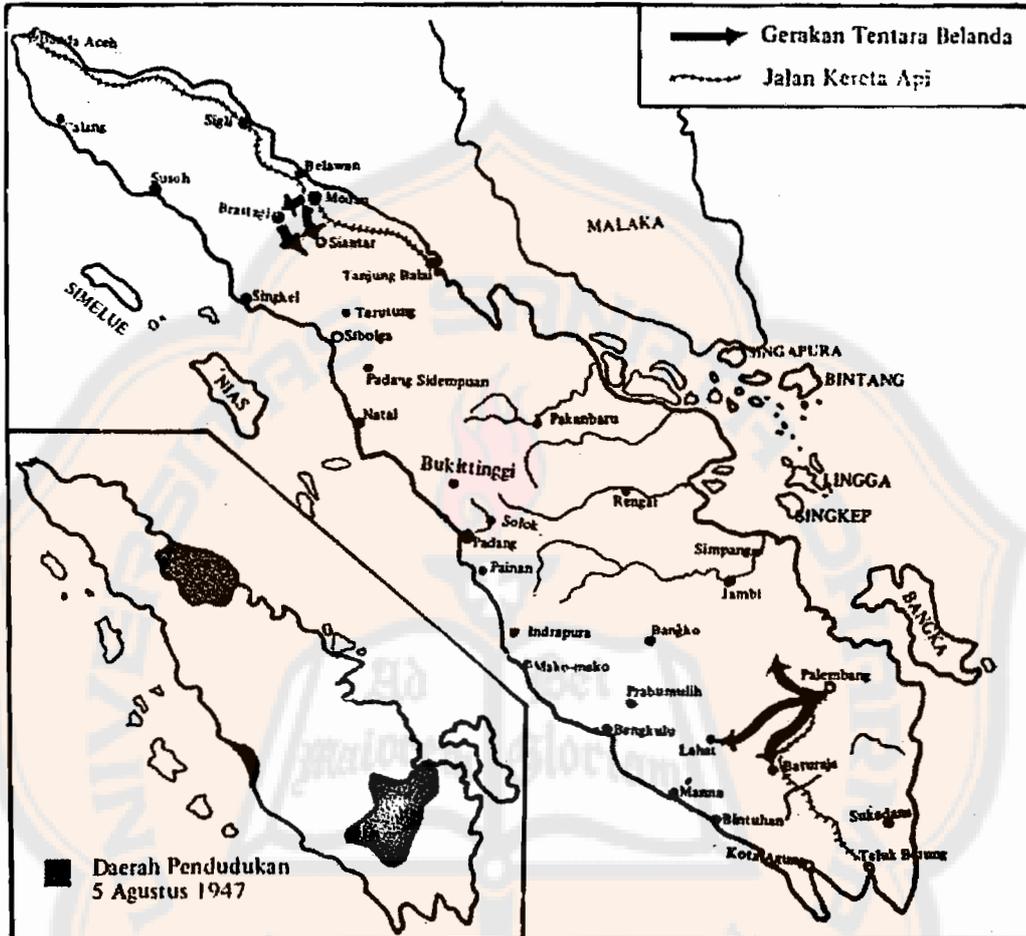


Sumber:

A.H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda I*, Angkasa, Bandung, hlm. 274-275.

Lampiran 6

PETA GERAKAN BELANDA 21 JULI 1947 DI SUMATERA

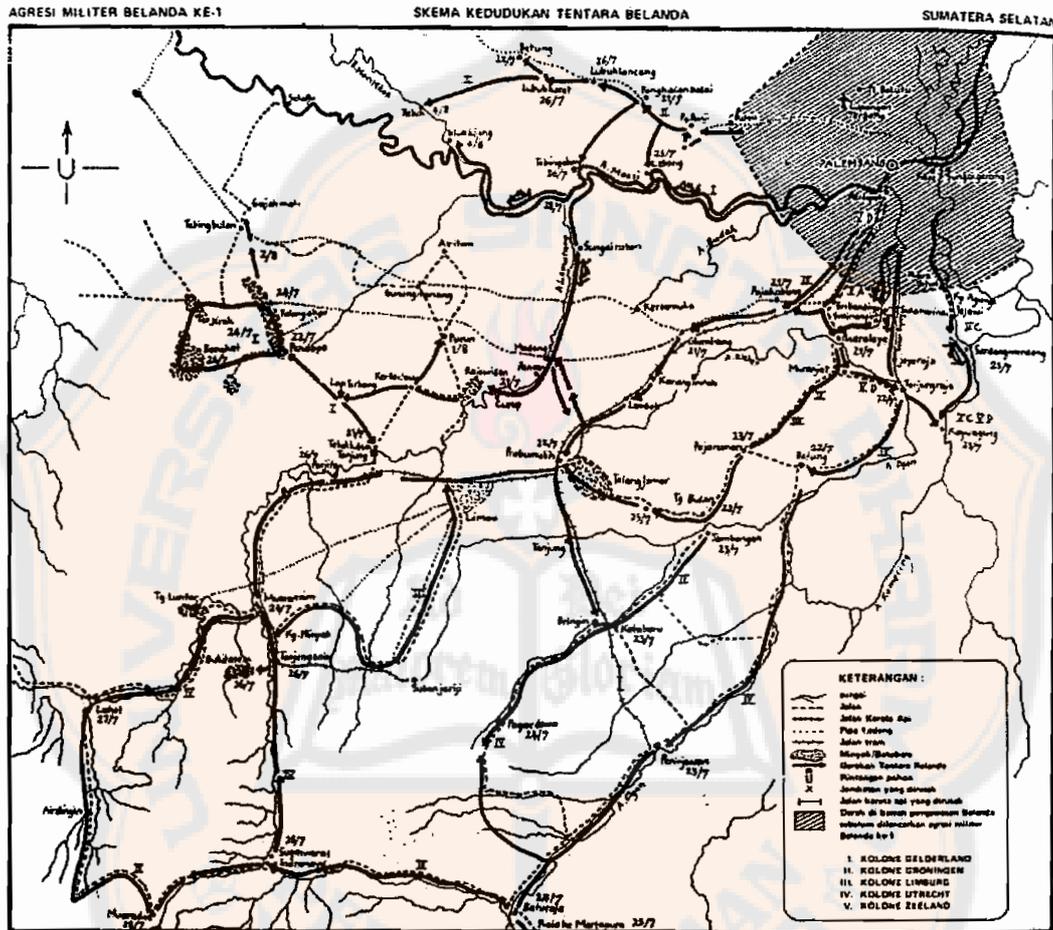


Sumber:

K.M.L.Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, PT Gunung Agung, Jakarta, hlm. 124.

Lampiran 7

Peta Kedudukan Belanda pada Agresi Militer Belanda I di Sumatera Selatan

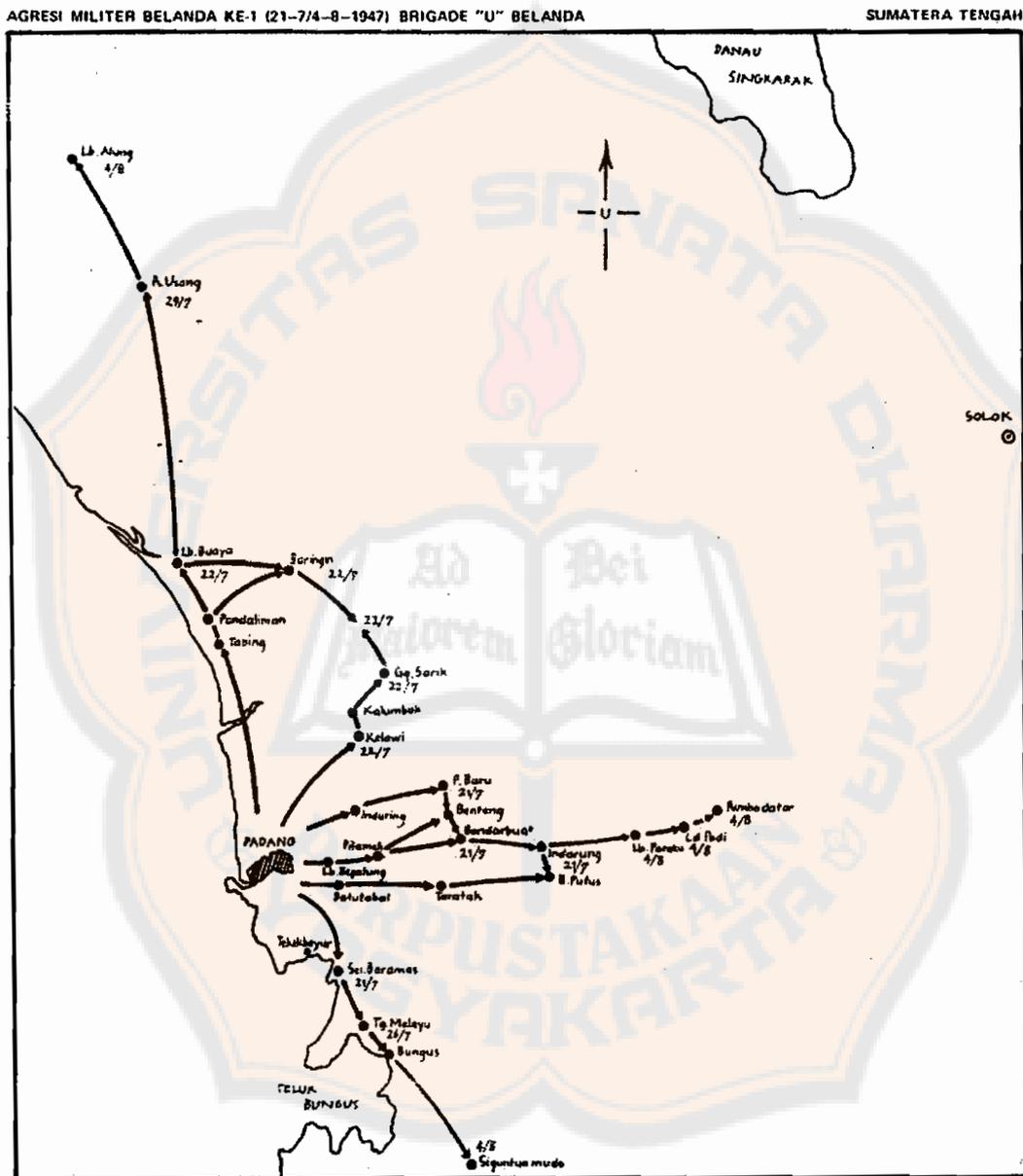


Sumber:

A.H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda I*, Angkasa, Bandung, hlm. 276.

Lampiran 8

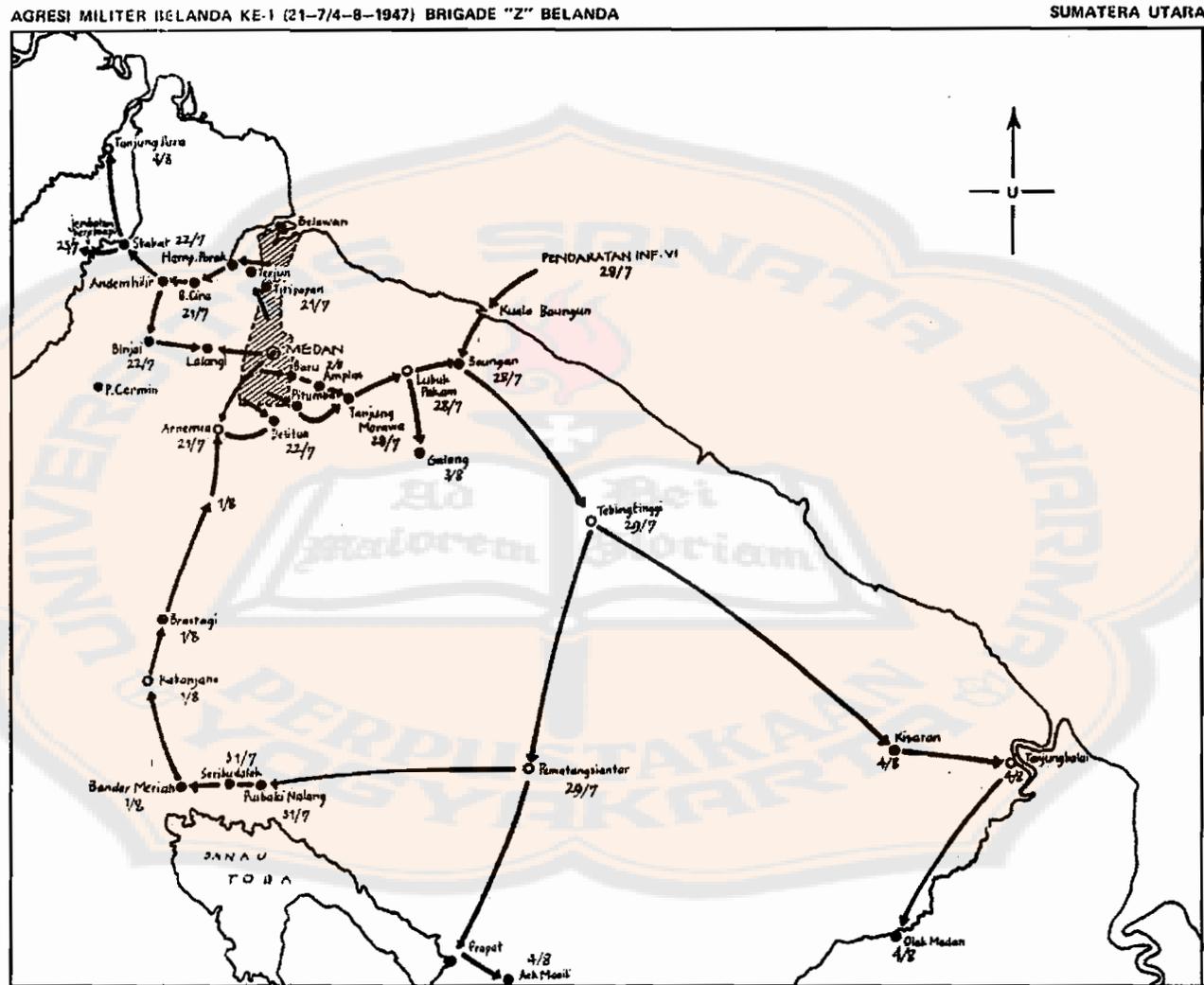
Peta Kedudukan Belanda pada Agresi Militer Belanda I di Sumatera Tengah



Sumber:

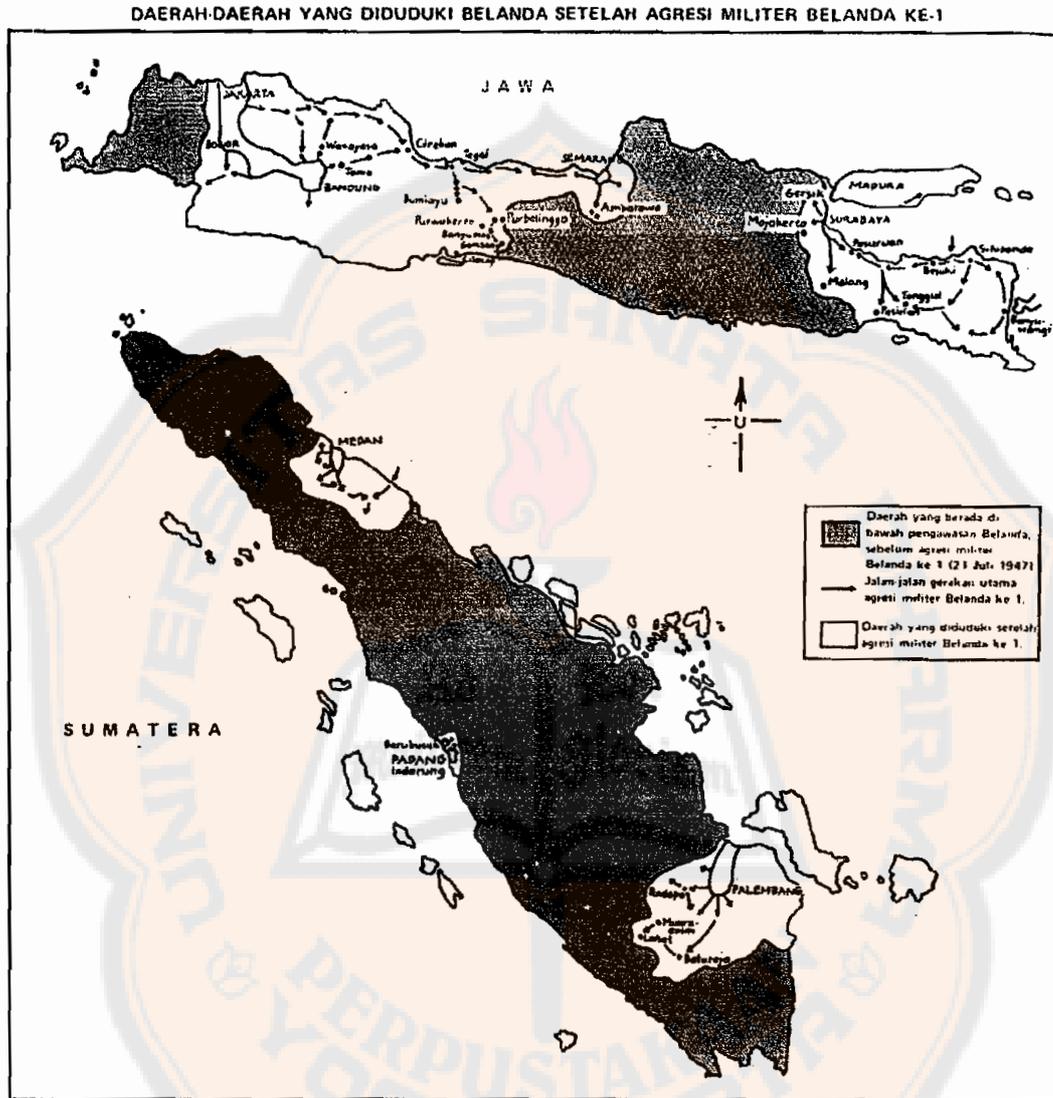
A.H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda I*, Angkasa, Bandung, hlm. 283.

Lampiran 9
Peta Kedudukan Belanda pada Agresi Militer Belanda I di Sumatera Utara



Sumber:
A.H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda I*, Angkasa, Bandung, hlm. 294.

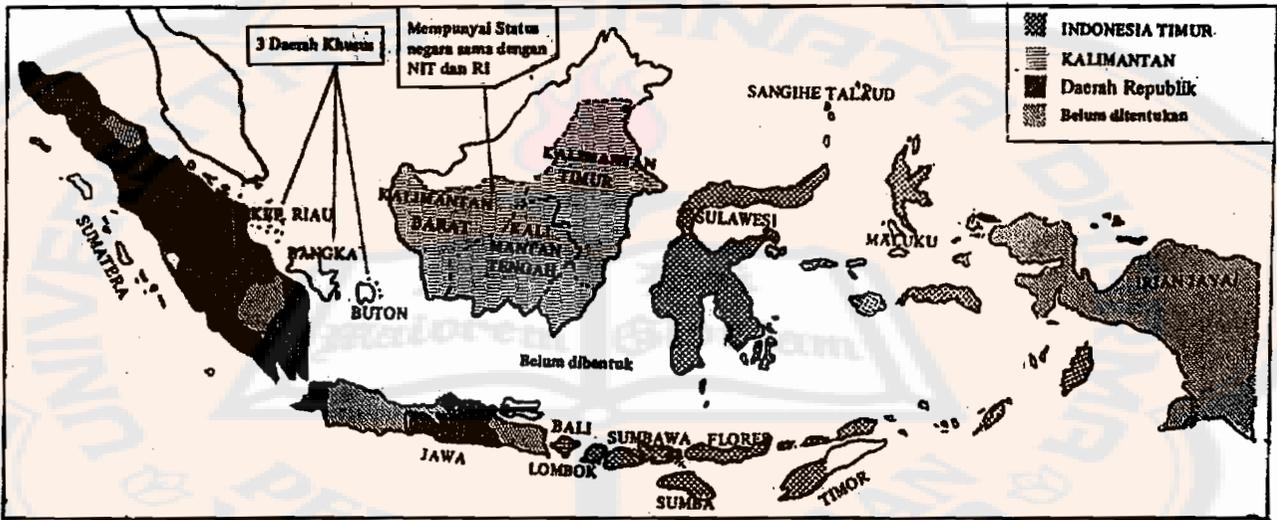
Lampiran 10



Sumber:

A.H. Nasution, 1979, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda I*, Angkasa, Bandung, hlm. 300.

Peta Garis Demarkasi Van Mook



Penetapan "garis van Mook" secara sepihak setelah Belanda melancarkan Aksi Militer I. Penetapan itu diumumkan pada tanggal 5 September 1947.

Sumber:

K.M.I. Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggajati*, PT Gunung Agung, Jakarta, hlm. 173.

Lampiran 12

PERJANJIAN RENVILLE

Adapun naskah yang diajukan oleh pihak KTN pada tanggal 17 Januari 1948 adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian gencatan perang yang disetujui oleh Indonesia dan Belanda, dan ditandatangani pada siding ke-empat di atas kapal "Renville" pada tanggal 17 Januari 1948.

Pemerintah Kerajaan Belanda dan pemerintah RI dan seterusnya dinamai pihak-pihak, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

- a) Dengan segera, setelah perjanjian ini ditandatangani, kedua belah pihak akan mengeluarkan perintah menghentikan tembak-menembak dalam tempo 48 jam. Perintah ini akan berlaku atas pasukan kedua belah pihak, pada sebelah tempat masing-masing yang telah diterangkan dalam pengumuman dari pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Agustus 1947; garis-garis tersebut dinamakan garis *status quo* dan di daerah-daerah termaktub dalam ayat yang berikut;
- b) Dalam instansi (tingkatan) pertama dan untuk sementara akan diadakan daerah-daerah (*zones*) sesuai dengan garis *status quo*; sebagai kebiasaan daerah-daerah ini melingkungi garis-garis *status quo* pada sebelah pihak, garis dari pihak Belanda yang terkemuka dan pada pihak lain, garis dari pihak Republik yang paling depan, sedang lebarnya sesuatu daerah (*zone*) harus sama.
- c) Mengadakan daerah-daerah yang tidak diduduki oleh militer (*gedemilitariseerd*) sekali-sekali tidak menyangkut hak dari kedua belah pihak menurut resolusi dari Dewan Keamanan pada tanggal 1, 25 dan 26 Agustus dan tanggal 1 Nopember 1947;
- d) Setelah yang diatas diterima oleh kedua belah pihak, maka komisi akan menyerahkan pembantu-pembantu militernya kepada kedua belah pihak, sedang pembantu-pembantu tersebut akan meneriama petunjuk-petunjuk (*instructies*) dan menerima pertanggungjawaban untuk menentukan, apakah penyelidikan atas sesuatu insiden diperlukan oleh pembesar-pembesar dari satu atau kedua pihak;
- e) Sambil menunggu keputusan dalam soal politik, tanggung jawab atas tertib-tenteram dan keselamatan jiwa dan harta benda penduduk dalam daerah-daerah yang dikosongkan (*gedemilitariseerd*) akan dipegang oleh polisi sipil dari kedua belah pihak. Polisi untuk sementara waktu, memakai tenaga personil militer sebagai polisi sipil dengan perjanjian, bahwa kekuasaan polisi di bawah kontrol sipil.

Pembantu-pembantu militer dari komisi setiap waktu bersedia memberi nasehat kepada kedua belah pihak dan menyerahkan tenaganya, bila dianggap perlu. Diantaranya mereka itu mesti:

- 1) Mendapat bantuan dari opsir-opsir polisi, yang ditempatkan oleh salah satu pihak dalam tempat-tempat yang tidak diduduki lagi oleh militer untuk menemani mereka itu dalam menyelenggarakan kewajiban mereka. Opsir-opsir dari satu pihak tidak dibenarkan berada di daerah pihak lainnya, kecuali bersama-sama dengan pembantu militer komisi dan opsir polisi dari pihak lain;
- 2) Menambah kerja sama antara kedua belah pihak polisi;
- f) Perdagangan dan lalu lintas antara daerah-daerah diusahakan supaya lebih maju dan meningkat pada hal-hal yang perlu, maka kedua belah pihak akan mengadakan perjanjian di bawah pengawasan komisi dan wakil-wakilnya, bilamana hal ini dirasa perlu;
- g) Perjanjian ini juga memuat hal-hal sebagai tertulis di bawah ini, yang mana dasar-dasarnya telah disetujui oleh kedua belah pihak:
 - 1) Dilarang mengadakan *sabotase*, menakut-nakuti (intimidasi), pembalasan dendam dan lain-lain tindakan yang serupa terhadap orang-orang dan harta benda, baikpun perusahaan atau barang-barang dari apa saja dan dari tiap-tiap orang dan memakai alat-alat apa saja, supaya mencapai maksud tersebut;
 - 2) Tidak akan mengadakan siaran-siaran radio atau propaganda-propaganda yang lain untuk menentang atau mengacaukan tentara dan rakyat;
 - 3) Siaran-siaran radio dan lain-lain untuk maksud memberi tahu kepada tentara dan rakyat tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menepati pasal-pasal yang tersebut dalam sub a dan b;
 - 4) Memberikan segala kesempatan untuk penyelidikan oleh pembantu-pembantu militer dan sipil, yang diperbantukan pada Komisi Tiga Negara.
 - 5) Penghentian dengan segera penyiaran-penyiaran pengumuman harian tentang gerakan-gerakan atau macam pemberitahuan tentang gerakan-gerakan ketentaraan, kecuali jika sebelumnya telah disetujui dengan tulisan oleh kedua pihak, tidak termasuk penyiaran-penyiaran minggu dari daftar daftar orang-orang (dengan menyebutkan nama, nomor, kenyataan dan alamat rumah), yang tewas atau meninggal karena luka-luka yang didapatnya dalam menjalankan kewajiban.
 - 6) Penerimaan atas pembebasan tawanan-tawanan dari kedua pihak dan pemulaian perundingan tentang sesuatu pengwujudan yang secepat-cepatnya dan setepat-setepatnya, pembebasan mana dalam asasnya akan berlaku dengan tidak mengingat pada jumlah tawanan kedua pihak;
- h) Bahwa, setelah menerima hal tersebut tadi, pembantu-pembantu militer komisi itu akan segera mengadakan penyelidikan untuk menentukan apakah atau di mana, terutama di Jawa Barat, kesatuan-kesatuan tentara Republik mengadakan perlawanan di belakang pendudukan terdepan dari Tentara

Belanda yang sekarang. Jika penyelidikan itu membuktikan adanya kesatuan-kesatuan itu secepat mungkin, tapi bagaimanapun juga dalam waktu 21 hari, akan mengundurkan diri secara yang disebutkan dalam pasal berikut;

- i) Bahwa seluruh kekuatan tentara dari kedua pihak masing-masing dalam sesuatu daerah, yang diterima sebagai daerah yang dimiliterisasi, atau dalam sesuatu daerah di sebelah daerah yang dimiliterisasi dari pihak yang lain, akan mengundurkan diri, di bawah pengawasan pembantu militer komisi itu dan dengan membawa senjatanya dan keperluan bertempur, dengan tenang menuju daerah yang didemiliterisasi. Kedua pihak berjanji akan melancarkan pengungsian kekuatan tentaranya masing-masing dengan cepat dan tenang;
 - j) Persetujuan ini dipandang masih mengikat selama waktu empat belas (14) hari dan selalu dengan endirinya diperpanjang dengan empat belas (14) hari, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan pada KTN dan pada pihak yang lain, yang berpendapat, bahwa peraturan-peraturan gencatan senjata tidak ditaati oleh pihak yang lain dan oleh karenanya persetujuan itu hendaknya diakhiri pada akhir waktu empat belas hari yang berlangsung.
- 2. 12 Dasar Persetujuan Politik Renville**

Pokok-pokok yang merupakan dasar-dasar yang sudah disetujui delegasi pemerintah Belanda dengan delegasi pemerintah Republik Indonesia untuk perundingan-perundingan politik pada sidang ke-empat yang diadakan Komisi Tiga Negara pada tanggal 17 Januari 1948.

Komisi Tiga Negara telah diberitahukan oleh kedua delegasi, bahwa pemerintah masing-masing telah menerima pokok-pokok perjanjian penghentian permusuhan yang sudah ditandatangani dan merupakan dasar untuk perundingan politik buat selanjutnya, ialah sebagai berikut:

- a) Bantuan dari Komisi Tiga Negara akan diteruskan untuk melaksanakan dan mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian politik di pulau-pulau Jawa, Sumatra dan Madura, berdasarkan prinsip-prinsip naskah perjanjian "linggarjati"
- b) Telah sewajarnya, bahwa kedua pihak tidak berhak menghalangi pergerakan-pergerakan rakyat untuk mengemukakan suaranya dengan leluasa dan merdeka, yang sesuai dengan perjanjian Linggarjati. Juga telah disetujui, bahwa kedua pihak akan memberi jaminan tentang adanya kemerdekaan bersidang dan berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan suara dan pendapatnya dan kemerdekaan dalam penyiaran (publikasi), asal jaminan ini tidak dianggap meliputi juga proganda untuk menjelaskan kekerasan dan pembalasan (*repressailles*).
- c) Telah sewajarnya, bahwa keputusan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan pamong praja di daerah-daerah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sepenuhnya dan sukarela dari penduduk di daerah-daerah itu pada suatu saat, setelah dapat dijamin keamanan dan ketentraman dan tidak adanya lagi paksaan kepada rakyat.



- d) Bahwa dalam mengadakan suatu perjanjian politik dilakukan pula persiapan-persiapan untuk lambat-laun mengurangi jumlah kekuatan tentaranya masing-masing.
 - e) Bahwa, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian-perjanjian penghentian permusuhan dan sebaik dapat dilakukan perjanjian itu, maka kegiatan dalam lapangan ekonomi, perdagangan, penghubungan dan pengangkutan akan diperbaiki dengan segera, dengan bekerja bersama-sama di mana harus diperhatikan kepentingan-kepentingan semua bagian lain di Indonesia.
 - f) Bahwa akan diadakan plebisit sesudah waktu yang tidak kurang dari enam bulan dan tidak lebih dari satu tahun, setelah ditandatangani perjanjian, dalam waktu mana dapat terjadi tukar-menukar pikiran, dan pertimbangan tentang soal-soal yang penting secara merdeka dan dengan tidak ada paksaan. Dalam waktu itu, dapat diadakan pemilihan umum secara merdeka, agar rakyat Indonesia dapat menentukan kedudukannya sendiri di lapangan politik dalam hubungan dengan Negara Indonesia Serikat.
 - g) Bahwa suatu dewan yang akan menetapkan undang-undang dasar(konstitusi) akan dipilih secara demokrasi untuk menetapkan suatu undang-undang dasar buat Negara Indonesia Serikat.
 - h) Telah didapat persetujuan, bahwa, setelah ditandatanganinya perjanjian, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, jika salah satu dari kedua pihak meminta kepada perserikatan bangsa-bangsa untuk mengadakan suatu badan buat melakukan pengawasan sampai saat diserahkan kedaulatan pemerintah belanda kepada pemerintah Negara Indonesia Serikat, maka pihak yang kedua akan menimbanginya dengan sungguh-sungguh. Dasar-dasar seperti di bawah ini diambil dari naskah perjanjian " Linggarjati"
 - i) Kemerdekaan bebas buat bangsa Indonesia seluruhnya.
 - j) Bekerja bersama antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia
 - k) Satu negara berdasarkan bangsa belanda dan bangsa Indonesia undang-undang dasar yang timbulnya melalui jalan-jalan demokrasi.
 - l) Suatu uni (persatuan) dari Negara Indonesia Serikat dengan kerajaan belanda dan bagian-bagiannya yang lain, di bawah turunan raja Belanda.
- 3. 6 dasar tambahan dari Komisi Tiga Negara untuk pembukaan perundingan politik antara delegasi RI dengan delegasi kerajaan Belanda, tanggal 17 Januari 1948 dan disetujui tanggal 19 Januari 1948.**

Komisi Tiga Negara berpendapat, bahwa keterangan dasar di bawah ini antara lain akan dipergunakan sebagai dasar perundingan untuk penyelesaian politik, yaitu sebagai berikut:

- a) Kedaulatan atas Hindia Belanda seluruhnya ada dan akan tetap berada di tangan Kerajaan Belanda sampai waktu yang ditetapkan. Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan ini kepada Negara Indonesia Serikat. Sebelum masa peralihan demikian itu habis temponya, kerajaan Belanda dapat menyerahkan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah federal sementara yang dibentuk dari daerah-daerah yang nantinya

akan merupakan Negara Indonesia Serikat. Jika sudah terbentuk, Negara Indonesia Serikat akan merupakan Negara yang berdaulat dan merdeka berkedudukan sejajar dengan Kerajaan Belanda dalam Uni Belanda Indonesia, dikepalai oleh Turunan Raja Belanda. Hal status Republik Indonesia adalah sebagai Negara yang bergabung dalam Negara Indonesia Serikat.

- b) Dalam pemerintah federal sementara, sebelum diadakan perubahan dalam undang-undang Negara Indonesia Serikat, kepada negara-negara bagian akan diberikan perwakilan yang adil;
- c) Sebelum Komisi Tiga Negara dibubarkan, tiap-tiap pihak boleh meminta supaya pekerjaan komisi diteruskan, yaitu guna membantu menyelesaikan perselisihan berkenaan dengan penyelesaian politik, yang mungkin terbit selama masa peralihan. Pihak yang lainnya tidak boleh berkeberatan atas permintaan demikian itu; permintaan tersebut harus dimajukan oleh pemerintah Belanda kepada Dewan Keamanan.
- d) Dalam waktu yang kurang dari 6 bulan tapi tidak lebih dari satu tahun sesudah persetujuan ini ditandatangani, maka di daerah-daerah di Jawa, Sumatra, dan Madura akan diadakan pemungutan suara (plebisit) untuk menentukan apakah rakyat di daerah-daerah tersebut akan dalam Republik Indonesia atau masuk bagian yang lain di dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat. Plebisit ini diadakan di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara, jika kedua pihak dapat persetujuan dalam artikel 3 yang menentukan, supaya Komisi Tiga Negara memberikan bantuan dalam soal tersebut.
Kemungkinan tetap terbuka jika kedua pihak dapat persetujuan akan menggunakan cara lain dari pemungutan suara untuk menyatakan kehendak rakyat di daerah-daerah itu;
- e) Sesudah ditetapkan batas-batas negara-negara bagian yang dimaksud itu, maka akan diadakan rapat pembentukan undang-undang dasar menurut cara demokrasi, untuk menetapkan konstitusi buat Negara Indonesia Serikat. Wakil-wakil dari Negara-negara bagian akan mewakili seluruh rakyat.

Jika ada Negara bagian memutuskan tidak akan berturut serta menandatangani konstitusi tersebut sesuai dengan pasal 3 dan 4 dalam persetujuan Linggarjati, kedua pihak tidak akan keberatan diadakan perundingan untuk menetapkan perhubungan istimewa dengan Negara Indonesia Serikat.¹

¹ KML. Tobing, 1986, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, PT Gunung Agung, Jakarta, hlm 36-43.

SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas
 Mata Pelajaran : Sejarah
 Semester : XII IPS
 Standar Kompetensi : Kemampuan memahami perjalanan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan sampai dengan jatuhnya pemerintah Orde Baru

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator	Uraian Materi	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian			Waktu	Sumber dan Media
					Jenis Tagihan	Bentuk Tagihan	Contoh Tagihan		
1.1 Kemampuan menganalisis perkembangan ekonomi-kebudayaan, politik dan konflik Indonesia-Belanda 1945-1949	Konflik Indonesia-Belanda 1945-1949	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membuat peta wilayah pendudukan Belanda dan pusat-pusat konflik Indonesia-Belanda di berbagai daerah secara kronologis. ➤ Menghubungkan perbedaan ideologi dan strategi dalam menghadapi Belanda dengan konflik antara kelompok politik di Indonesia. 	<p>I.Faktor pendorong Belanda mengambil tindakan militer yang pertama terhadap RI.</p> <p>A.Faktor pendorong Belanda mengambil tindakan militer yang pertama terhadap RI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkuasanya Kabinet Scermerhorn-Dress 2. Keadaan Indonesia pasca Kemerdekaan. 3. Gagalnya Pelaksanaan Perjanjian Linggajati <p>B.Meletusnya Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947</p> <p>II.Reaksi dari dalam dan Luar RI terhadap Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947</p> <p>A. Reaksi dari dalam RI</p>	<p>Pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apersepsi: Pengenalan materi yang akan disampaikan dilanjutkan <i>pre test</i> secara lisan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Contoh: Apa yang dimaksud dengan agresi militer? ➤ Motivasi: Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan memberikan gambaran mengenai materi yang akan disampaikan. <p>Kegiatan Inti</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Orientasi: Guru menjelaskan materi dilanjutkan tanya 	<p>Tes</p> <p>Proses</p> <p>Tugas Kelompok</p>	<p>Lisan</p> <p>Lembar Observasi</p> <p>Peta</p>	<p>Apa saja alasan Belanda ingin menguasai RI kembali?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor pendorong Belanda melancarkan Agresi Militer I 21 Juli 1947 terhadap RI. 2. Bagaimana reaksi dalam bidang militer terhadap Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947? <p>Buatlah peta Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 di Jawa dan Sumatera!</p>	1 x 45 menit	<p>Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aboe Bakar Loebis, 1992, <i>Kilas Balik Revolusi</i>, Universitas Indonesia, Jakarta. 2. Badan Musyawarah Musea, 1985, <i>Yogyakarta Benteng Proklamasi</i>, Perwakilan, Yogyakarta. 3. Ide Anak Agung Gde Agung, 1983, <i>Renville</i>, Sinar Harapan, Jakarta. 4. _____, 1985, <i>Dari Negara Indonesia Timur ke RI Serikat</i>, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 5. Moedjanto, G, 1988, <i>Indonesia Abad ke- 20 Jilid 2</i>, Kanisius, Yogyakarta. 6. Nasution, A.H, 1979,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		<p>1. Bidang Militer 2. Bidang Politik</p> <p>B. Reaksi dari luar RI 1. Resolusi DK PBB tentang Gencatan Senjata 2. Komisi Tiga Negara 3. Perjanjian Renville</p> <p>III. Pengaruh Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 terhadap Kedudukan RI Dalam Negeri dan Luar Negeri RI</p> <p>A. Dalam RI 1. Kedudukan RI di Wilayah yang diakui secara <i>de facto</i>. 2. Kedudukan RI di luar kekuasaan <i>de facto</i>.</p> <p>B. Luar Negeri RI 1. Negara-negara Asia dan Eropa. 2. Perserikatan Bangsa Bangsa</p>	<p>jawab.</p> <p>➤ Latihan: Siswa membentuk kelompok masing-masing 3 orang kemudian berdiskusi untuk membahas pertanyaan dari guru tentang peristiwa Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947.</p> <p>➤ Umpan Balik: Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dilanjutkan tanya jawab. Guru memberikan penguatan atas hasil diskusi siswa dan melengkapi pembahasan kelompok</p> <p>Penutup ➤ Guru menyimpulkan materi pembelajaran ➤ Guru memberikan tugas kelompok yaitu siswa membuat peta-peta penyerangan militer Belanda di Jawa dan Sumatera</p>				<p><i>Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 5 Agresi Militer Belanda I</i>, Angkasa, Bandung.</p> <p>7. Samawi, 1970, <i>25 Tahun Indonesia Merdeka</i>, Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.</p> <p>8. Tuk Setyohadi, 2002, <i>Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa</i>, CV. Rajawali Corporations, Jakarta.</p> <p>Media</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Time Chart 2. Gambar Pahlawan Nasional 3. Peta Agresi Militer Belanda I 21 Juli 1947 di Jawa dan Sumatera. 4. Peta garis demarkasi van Mook
--	--	---	---	--	--	--	---



Yogyakarta,
Guru Mata Pelajaran

Purniyawati